



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 56 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
SELINGKAR ALASPURWO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alaspurwo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SELINGKAR ALASPURWO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Kawasan Perdesaan Tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
14. Pihak Ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
15. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk memajukan tertib rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini ialah:

- a. untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial, mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten.
- b. upaya mempercepat pembangunan antar desa dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan Penetapan Kawasan Perdesaan.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ialah:

- a. Maksud dan Tujuan
- b. Strategi dan Kebijakan/Program;
- c. Pengendalian dan Evaluasi;
- d. Dokumen;
- e. Pendanaan.

## BAB III

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN/PROGRAM

#### Pasal 5

Pembangunan kawasan perdesaan perlu memprioritaskan strategi dan Kebijakan/Program dengan urutan sebagai berikut:

- a. perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif;
- b. pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan;
- c. peningkatan kualitas SDM;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat;
- f. revitalisasi kelembagaan masyarakat;

- g. pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penetapan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan.
- (4) Program Pembangunan Daerah Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan rencana dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

## BAB V DOKUMEN

### Pasal 7

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Tahun 2021-2025 beserta dokumen reviewnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

- (1) TKPKP Selingkar Alaspurwo Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga ahli yang ditugaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

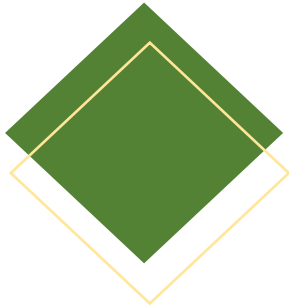
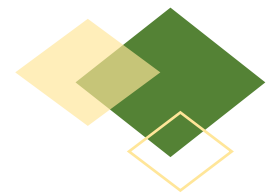
H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 56

# Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan **Selingkar Alas Purwo**



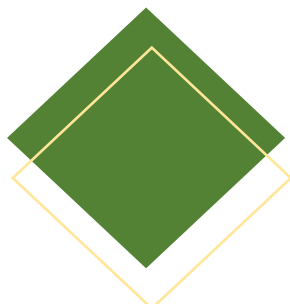
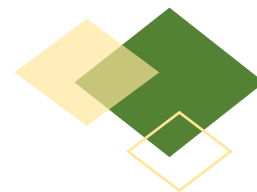
2021



## KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan di kawasan perdesaan yang telah ditetapkan. RPKP yang telah disusun ini dapat diubah menyesuaikan kondisi perkembangan kebutuhan kawasan. Penyusunan RPKP ini, diharapkan ada masukan yang cukup berarti baik isi/substansi terhadap dokumen ini demi kelancaran proses kerja perencanaan dalam upaya pelaksanaan fasilitasi daerah dalam penetapan kawasan perdesaan Alas Purwo. Guna terwujudnya dokumen RPKP ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama para pemangku kepentingan di daerah maupun dari Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah membantu sehingga tersusunnya dokumen RPKP ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kawasan perdesaan Alas Purwo khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

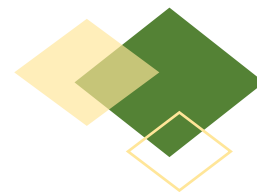
Penyusun,



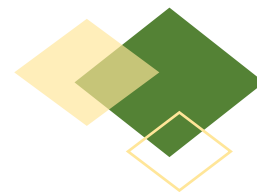
## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran</b> .....	2
<b>1.2.1 Maksud</b> .....	2
<b>1.2.2 Tujuan</b> .....	2
<b>1.2.3 Sasaran</b> .....	2
<b>1.3 Ruang Lingkup</b> .....	2
<b>1.4 Kedudukan RPKP</b> .....	3
<b>BAB II PENDEKATAN DAN METODOLOGI</b> .....	5
<b>2.1 Pendekatan</b> .....	5
<b>2.2 Metodologi</b> .....	6
<b>2.2.1 Kerangka Berpikir</b> .....	6
<b>2.2.2 Jenis dan Sumber Data</b> .....	7
<b>2.2.3 Analisis Data</b> .....	7
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI</b> .....	9
<b>3.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif</b> .....	9
<b>3.2 Fisik Dasar</b> .....	9
<b>3.2.1 Iklim</b> .....	9
<b>3.2.2 Topografi</b> .....	12
<b>3.2.3 Jenis Tanah</b> .....	14
<b>3.2.4 Penggunaan Lahan</b> .....	15
<b>3.4 Perekonomian Wilayah</b> .....	19
<b>3.5 Kondisi Infrastruktur</b> .....	21
<b>3.5.1 Jalan dan Jembatan</b> .....	21
<b>3.5.2 Sarana Transportasi</b> .....	22
<b>3.5.3 Air Bersih</b> .....	23

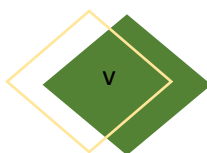


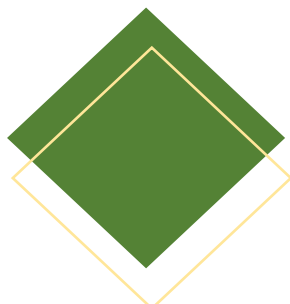
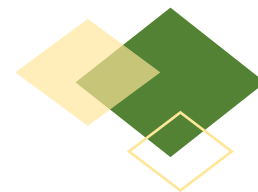


3.5.4 Sanitasi .....	25
3.5.5 Jaringan Energi Listrik.....	25
3.6 Potensi Wilayah .....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Penetapan dan Delineasi Kawasan Perdesaan .....	36
4.2 Fisik Lingkungan .....	39
4.2.1 Luas Wilayah dan Topografi.....	39
4.2.2 Jenis Tanah .....	45
4.2.3 Kebencanaan.....	46
4.3 Produk Unggulan Kawasan Perdesaan.....	47
4.3.1 Klaster Tanaman Pangan Jagung .....	47
4.3.2 Klaster Tanaman Pangan Kedelai .....	48
4.3.3 Klaster Holtikultura Jeruk Manis .....	49
4.3.4 Klaster Holtikultura Buah Naga .....	49
4.3.5 Klaster Perkebunan Kelapa .....	50
4.3.6 Klaster Peternakan Sapi.....	51
4.3.7 Kalster Peternakan Ayam .....	52
4.3.8 Klaster Peternakan Kambing Etawa.....	53
4.3.9 Klaster Peternakan Bebek .....	54
4.3.10 Klaster Perikanan .....	55
4.3.11 Klaster Pariwisata .....	56
4.4 Kependudukan dan Sosial Budaya .....	57
4.4.1 Jumlah Penduduk .....	57
4.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	60
4.4.3 Komposisi Penduduk.....	62
4.4.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	63
4.4.5 Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja.....	64
4.4.6 Mata Pencaharian.....	65
4.5 Sarana dan Prasarana .....	67
4.5.1 Sarana Pendidikan .....	67
4.5.2 Sarana Kesehatan .....	69
4.5.3 Sarana Ekonomi .....	71
4.5.4 Sarana Pendukung.....	73
<b>BAB V PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN.</b>	<b>76</b>
5.1 Tinjauan Kebijakan .....	76
5.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ...	76



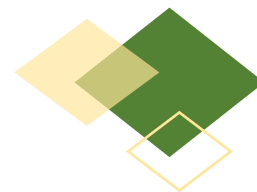
5.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten ....	82
5.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.....	84
5.1.4 Dokumen Rencana Lain Terkait Tema Kawasan Perdesaan .....	85
5.1.5 Posisi Kawasan Perdesaan Dalam Konstelasi Regional dan Nasional .....	86
5.2 Konsep Pengembangan Kawasan.....	90
5.2.2 Tema Pengembangan Kawasan .....	90
5.2.2 Hulu Hilir Pengembangan Kawasan.....	91
5.3 Pengembangan Jejaring Kawasan Perdesaan .....	97
5.3.1 Kawasan Pemasaran.....	98
5.3.2 Kawasan Agroindustri.....	103
5.3.3 Kawasan Agrowisata.....	108
5.3.4 Kawasan Wisata .....	113
<b>BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM.....</b>	<b>114</b>
6.1 Potensi dan Permasalahan.....	114
6.1.1 Potensi .....	114
6.2 Isu Strategis.....	116
6.2.1 Isu Internal .....	116
6.2.2 Isu Eksternal.....	117
6.3 Tujuan dan Sasaran.....	118
6.4 Visi dan Misi .....	118
6.5 Strategi dan Arah Kebijakan .....	119
6.5.1 Strategi Pembangunan Potensi Unggulan Kawaan .....	119
6.5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan .....	119
6.6 Program dan Kegiatan .....	126
<b>BAB VII NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN .....</b>	<b>154</b>
7.1 Produk Barang dan Jasa.....	154
7.2 Penyerapan Tenaga Kerja .....	158
7.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.....	160
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>164</b>
8.1 Kesimpulan.....	164
8.2 Saran .....	165



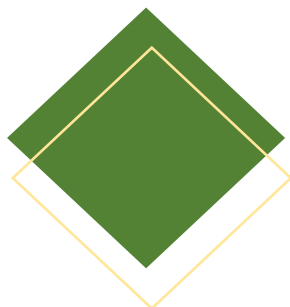
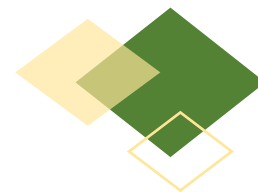


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Curah Hujan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.....	10
Tabel 3.2 Kelembaban Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	10
Tabel 3.3 Rata-Rata Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	11
Tabel 3.4 Tekanan Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	11
Tabel 3.5 Penyinaran Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	12
Tabel 3.6 Ketinggian Wilayah Kabupaten Banyuwangi Menurut Kecamatan.....	13
Tabel 3.7 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi .....	14
Tabel 3.8 Penggunaan Lahan Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaan.....	16
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	17
Tabel 3.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2016-2020 .....	19
Tabel 3.11 Sentra IKM per Kecamatan di kabupaten Banyuwangi.....	27
Tabel 3.12 Industri Unggulan Kabupaten Banyuwangi.....	31
Tabel 4.1 Jenis Tanah Di Kabupaten Banyuwangi.....	45
Tabel 4.2 Potensi Bencana Di Kabupaten Banyuwangi.....	46
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.4 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	63
Tabel 4.5 Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja.....	64
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sumberberas, Wringinputih, Kedungringin dan Kedungrejo Tahun 2020 .....	67
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Patoman dan Desa Blimbingsari Tahun 2020 .....	68
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Plampangrejo dan Desa Kaliploso Tahun 2020 .....	68
Tabel 4.9 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Grajagan dan Desa Sumberasri Tahun 2020 .....	69
Tabel 4.10 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kedunggebang dan Desa Kalipait Tahun 2020 .....	69
Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Sumberberas, Desa Wringinputih, Desa Kedungringin dan Desa Kedungrejo Tahun 2020.....	70
Tabel 4.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Patoman dan Desa Blimbingsari Tahun 2020 .....	70
Tabel 4.13 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Plampangrejo dan Desa Kaliploso Tahun 2020 .....	70
Tabel 4.14 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Grajagan dan Desa Sumberasri Tahun 2020 .....	71
Tabel 4.15 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Kedunggebang dan Desa Kalipait Tahun 2020 .....	71

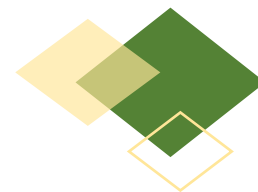


Tabel 4.16 Jumlah Koperasi di Kecamatan Muncar, Blimbingsari, Cluring, Purwoharjo dan Tegaldlimo Menurut Desa Tahun 2020 .....	73
Tabel 4.17 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Sumberberas, Desa Wringinputih, Desa Kedungringin dan Desa Kedungrejo Tahun 2020.....	73
Tabel 4.18 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Patoman dan Desa Blimbingsari Tahun 2020 .....	74
Tabel 4.19 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Plampangrejo dan Desa Kaliposo Tahun 2020 .....	74
Tabel 4.20 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Grajagan dan Desa Sumberasri Tahun 2020 .....	74
Tabel 4.21 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Kedunggebang dan Desa Kalipait Tahun 2020 .....	75
Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.....	76
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	83
Tabel 5.3 Tipe Keterkaitan Kawasan Perdesaan dalam Pendukung Regional maupun Nasional.....	88
Tabel 5.4 Pusat Produksi Kawasan Perdesaan Alas Purwo.....	92
Tabel 5.5 Pusat Pengolahan Kawasan Perdesaan Alas Purwo.....	94
Tabel 5.6 Pusat Pemasaran Kawasan Perdesaan Alas Purwo .....	96
Tabel 5.7 Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan Alas Purwo .....	113
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan.....	126
Tabel 7.1 Nilai Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kawasan Alas Purwo.....	155
Tabel 7.2 Nilai Produksi Perkebunan di Kawasan Alas Purwo .....	156
Tabel 7.3 Nilai Produksi Perternakan di Kawasan Alas Purwo .....	157
Tabel 7.4 Nilai Produksi Perikanan di Kawasan Alas Purwo .....	157
Tabel 7.5 Nilai Produksi Pariwisata di Kawasan Alas Purwo .....	158
Tabel 7.6 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian di Kawasan Alas Purwo.....	158
Tabel 7.7 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Perkebunan di Kawasan Alas Purwo.....	159
Tabel 7.8 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Perternakan di Kawasan Alas Purwo.....	159
Tabel 7.9 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan di Kawasan Alas Purwo .....	160
Tabel 7.10 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Pariwisata di Kawasan Alas Purwo.....	160
Tabel 7.11 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Kluster Pertanian Kawasan Alas Purwo.....	161
Tabel 7.12 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Kluster Perkebunan Kawasan Alas Purwo .....	161
Tabel 7.13 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Kluster Perternakan Kawasan Alas Purwo.....	162
Tabel 7.14 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Kluster Perikanan Kawasan Alas Purwo .....	162
Tabel 7.15 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Kluster Pariwisata Kawasan Alas Purwo.....	163

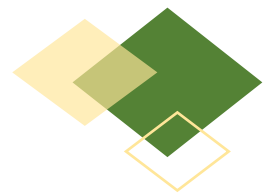


## DAFTAR GAMBAR

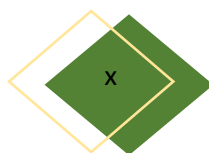
Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ...	4
Gambar 3.1 Komposisi Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi .....	15
Gambar 3.2 Penggunaan Lahan Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaan .....	16
Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi .....	18
Gambar 3.4 Distribusi Presentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2018.....	20
Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018- 2020 .....	20
Gambar 3.6 Jaringan Jalan Kabupaten Banyuwangi .....	21
Gambar 3.7 Jaringan Transportasi Kabupaten Banyuwangi.....	23
Gambar 3.8 Jaringan Air Bersih Kabupaten Banyuwangi .....	24
Gambar 3.9 Jaringan Listrik Kabupaten Banyuwangi .....	26
Gambar 3.10 Perkembangan IKM Kabupaten Banyuwangi.....	28
Gambar 3.11 Pertumbuhan IKM Kabupaten Banyuwangi.....	28
Gambar 3.12 Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi .....	29
Gambar 3.13 Kinerja Investasi IKM kabupaten Banyuwangi .....	30
Gambar 4.1 Peta Delineasi Agrowisata Kawasan Alas Purwo .....	37
Gambar 4.2 Peta Delineasi Agroindustri Kawasan Alas Purwo .....	37
Gambar 4.3 Peta Delineasi Pemasaran Kawasan Alas Purwo .....	38
Gambar 4.4 Peta Delineasi Wisata Kawasan Alas Purwo.....	38
Gambar 4.5 Luas Wilayah Kecamatan Muncar Menurut Desa.....	39
Gambar 4.6 Ketinggian Wilayah Kecamatan Muncar Menurut Desa .....	40
Gambar 4.7 Luas Wilayah Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa .....	41
Gambar 4.8 Ketinggian Wilayah Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa .....	41
Gambar 4.9 Luas Wilayah Kecamatan Cluring Menurut Desa .....	42
Gambar 4.10 Ketinggian Wilayah Kecamatan Cluring Menurut Desa.....	42
Gambar 4.11 Luas Wilayah Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa .....	43
Gambar 4.12 Ketinggian Wilayah Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa .....	44
Gambar 4.13 Luas Wilayah Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa .....	44
Gambar 4.14 Ketinggian Wilayah Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa .....	45
Gambar 4.15 Kluster Tanaman Pangan Jagung.....	47
Gambar 4.16 Kluster Tanaman Pangan Kedelai .....	48
Gambar 4.17 Kluster Holtikultura Jeruk Manis .....	49
Gambar 4.18 Kluster Holtikultura Buah Naga.....	50
Gambar 4.19 Kluster Perkebunan Kelapa.....	51
Gambar 4.20 Kluster Peternakan Sapi .....	52
Gambar 4.21 Kluster Peternakan Ayam.....	53
Gambar 4.22 Kluster Peternakan Kambing Etawa .....	53

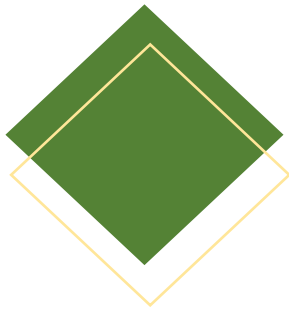


Gambar 4.23 Kluster Peternakan Bebek.....	54
Gambar 4.24 Kluster Perikanan.....	55
Gambar 4.25 Kluster Wisata .....	56
Gambar 4.26 Jumlah Penduduk Kecamatan Muncar Menurut Desa .....	58
Gambar 4.27 Jumlah Penduduk Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa .....	58
Gambar 4.28 Jumlah Penduduk Kecamatan Cluring Menurut Desa .....	59
Gambar 4.29 Jumlah Penduduk Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa .....	59
Gambar 4.30 Jumlah Penduduk Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa .....	59
Gambar 4.31 Laju Penduduk Kecamatan Muncar Menurut Desa.....	60
Gambar 4.32 Laju Penduduk Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa .....	60
Gambar 4.33 Laju Penduduk Kecamatan Cluring Menurut Desa .....	61
Gambar 4.34 Laju Penduduk Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa.....	61
Gambar 4.35 Laju Penduduk Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa .....	61
Gambar 4.36 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedungrejo, WringinPutih, Kedungringin dan Sumberberas .....	65
Gambar 4.37 Mata Pencaharian Penduduk Desa Blimbingsari dan Desa Patoman .....	65
Gambar 4.38 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kaliploso dan Desa Plampangrejo .....	66
Gambar 4.39 Mata Pencaharian Penduduk Desa Grajagan dan Desa Sumberasri .....	66
Gambar 4.40 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalipait dan Desa Kedunggebang.....	67
Gambar 4.41 Sarana Ekonomi Kawasan Perdesaan Kabupaten Banyuwangi .....	72
Gambar 5.1 Wilayah Pengembangan Jawa-Bali .....	81
Gambar 5.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata .....	82
Gambar 5.3 Sebaran Obyek Daya Tarik Wisata Alam Alas Purwo Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi .....	86
Gambar 5.4 Kawasan Pemasaran Komoditas Jagung .....	98
Gambar 5.5 Kawasan Pemasaran Komoditas Kedelai .....	98
Gambar 5.6 Kawasan Pemasaran Komoditas Jeruk Manis .....	99
Gambar 5.7 Kawasan Pemasaran Komoditas Buah Naga .....	99
Gambar 5.8 Kawasan Pemasaran Komoditas Kelapa .....	100
Gambar 5.9 Kawasan Pemasaran Komoditas Sapi .....	100
Gambar 5.10 Kawasan Pemasaran Komoditas Ayam .....	101
Gambar 5.11 Kawasan Pemasaran Komoditas Kambing Etawa .....	101
Gambar 5.12 Kawasan Pemasaran Komoditas Bebek.....	102
Gambar 5.12 Kawasan Pemasaran Komoditas Perikanan .....	102
Gambar 5.13 Kawasan Agroindustri Komoditas Jagung .....	103
Gambar 5.14 Kawasan Agroindustri Komoditas Kedelai .....	103
Gambar 5.15 Kawasan Agroindustri Komoditas Jeruk Manis.....	104
Gambar 5.16 Kawasan Agroindustri Komoditas Buah Naga .....	104
Gambar 5.17 Kawasan Agroindustri Komoditas Kelapa .....	105
Gambar 5.18 Kawasan Agroindustri Komoditas Sapi .....	105
Gambar 5.19 Kawasan Agroindustri Komoditas Ayam .....	106
Gambar 5.20 Kawasan Agroindustri Komoditas Kambing Etawa .....	106
Gambar 5.21 Kawasan Agroindustri Komoditas Bebek .....	107
Gambar 5.22 Kawasan Agroindustri Komoditas Perikanan .....	107
Gambar 5.23 Kawasan Agrowisata Komoditas Jagung.....	108
Gambar 5.24 Kawasan Agrowisata Komoditas Kedelai .....	108
Gambar 5.25 Kawasan Agrowisata Komoditas Jeruk Manis .....	109



Gambar 5.26 Kawasan Agrowisata Komoditas Buah Naga.....	109
Gambar 5.27 Kawasan Agrowisata Komoditas Kelapa .....	110
Gambar 5.28 Kawasan Agrowisata Komoditas Sapi.....	110
Gambar 5.29 Kawasan Agrowisata Komoditas Ayam.....	111
Gambar 5.30 Kawasan Agrowisata Komoditas Kambing Etawa.....	111
Gambar 5.31 Kawasan Agrowisata Komoditas Bebek .....	112
Gambar 5.32 Kawasan Agrowisata Komoditas Perikanan.....	112
Gambar 5.33 Kawasan Wisata Selingkar Alas Purwo .....	113
Gambar 6.1 Sinkronisasi Kawasan Perdesaan Alas Purwo.....	120
Gambar 6.2 Model Community Based Tourism .....	123
Gambar 6.3 Tahapan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo .....	124





# BAB I

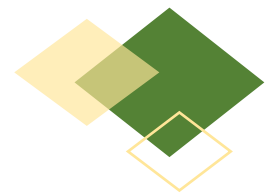
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan desa atau daerah perdesaan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting. Sangat pentingnya peranan desa dalam pembangunan, karena sebagian besar penduduk di Indonesia tinggal di perdesaan. Jumlah penduduk yang besar tersebut merupakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan yang sangat potensial dalam mengolah lahan perdesaan sangat luas di bidang pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan). Sebagai poros pembangunan, desa dijadikan sebagai pusat implementasi dari pelaksanaan pembangunan daerah, pembangunan bukan sekedar mengembangkan atau mengadakan infrastruktur namun lebih dari pada itu, pembangunan melingkupi yang terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (desa) dan mikro (individu). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress) dan pertumbuhan.

Sangat strategis fungsinya, desa merupakan daerah penghasil berbagai komoditas, terutama bahan pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Desa mempunyai karakter potensi sendiri, namun masih lemah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu dalam percepatan pembangunan desa melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Pemerintah pusat memiliki komitmen besar untuk pembangunan kawasan perdesaan dengan mulai memberlakukannya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang telah dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Perlu perencanaan yang terstruktur untuk mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan, serta destinasi pariwisata di desa. Setidaknya hampir keseluruhan desa di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi tersebut namun tinggal bagaimana pola pengelolaan tersebut mampu mendongkrak kehidupan



masyarakat desa setempat. Dan juga perlu mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.

Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur serta sinergisme antar sektor, pasar, dan masyarakat dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing - masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah pemerintah daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal desa.

## 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

### 1.2.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Alas Purwo dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan rencana aksi program dan kegiatan untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan yang ada di kawasan Alas Purwo.

### 1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Banyuwangi adalah melakukan analisis potensi kawasan perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi dan penguatan arah pengembangan kawasan perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

### 1.2.3 Sasaran

Sasaran dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Banyuwangi adalah 12 desa di Kabupaten Banyuwangi yang meliputi Desa Blimbingsari, Patoman, Kedungringin, Kedungrejo, Sumberberas, Wringinputih, Kaliploso, Plampangrejo, Grajagan, Sumberasri, Kedunggebang dan Kalipait.

## 1.3 Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan dengan melakukan kajian terhadap potensi kawasan perdesaan Alas Purwo dan membuat arah pengembangan kawasan berdasarkan dokumen penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah tersedia dan dijadikan acuan.



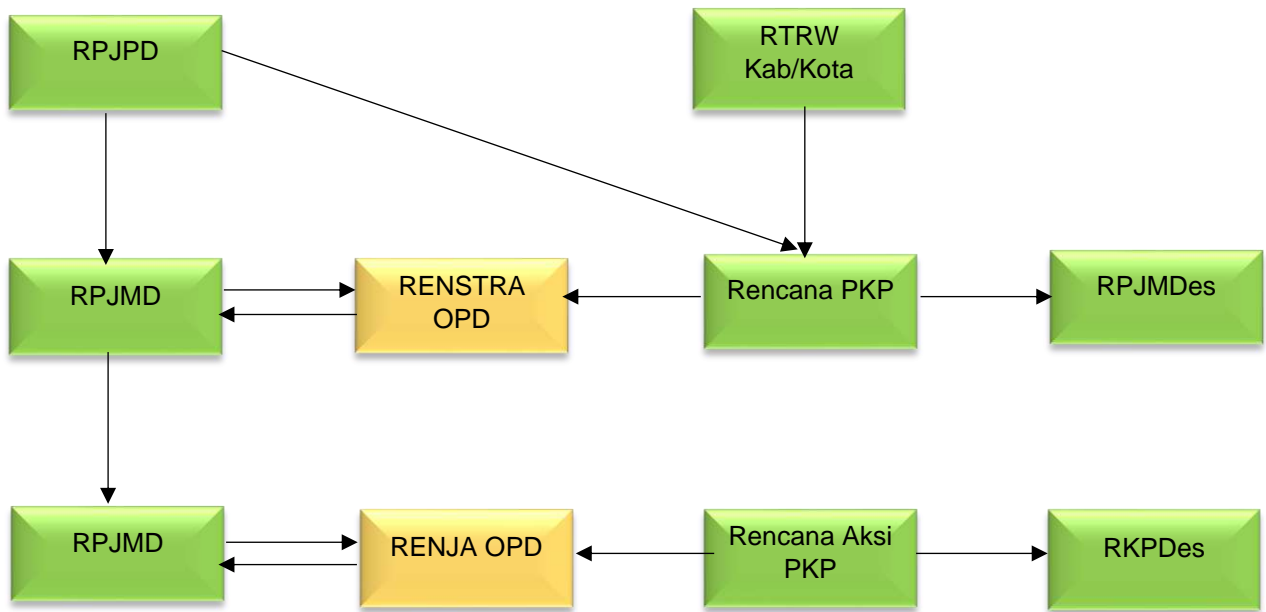
## 1.4 Kedudukan RPKP

Menurut pasal 79 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen:

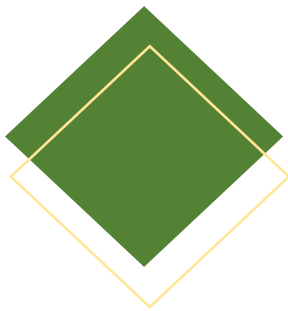
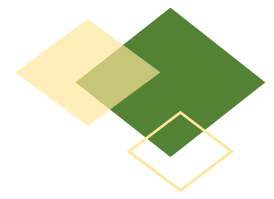
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termaktub dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya yang tersaji pada Gambar 1.1



**Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)**



## BAB II PENDEKATAN DAN METODOLOGI

### 2.1 Pendekatan

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Alas Purwo ini diharapkan dapat mendorong dan memberikan daya ungkit (*leveraging*) kepada pertumbuhan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam lingkup lokal maupun secara nasional. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPKP Alas Purwo ini berbasis pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan untuk melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Pendekatan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

Korten dalam Supriatna (2000:65) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Begitu juga menurut Conyers (1991: 154), yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu: *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan *Kedua*, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.



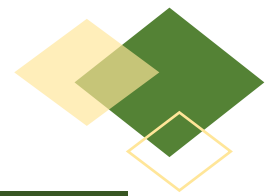
## 2.2 Metodologi

### 2.2.1 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Kajian penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Alas Purwo didasarkan atas studi literatur yang dilandaskan oleh peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Keputusan Dirjen 14/DPKP/SK/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang kemudian dari landasan tersebut dapat memberikan informasi gambaran awal mengenai perhitungan dan teknik analisis terkait potensi unggulan kawasan Alas Purwo. Dengan demikian output akhir yang akan diperoleh dapat berupa pemetaan potensi unggulan kawasan dan arah pengembangan kluster kawasan perdesaan Alas Purwo.



### 2.2.2 Jenis dan Sumber Data

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Alas Purwo menggunakan jenis data primer dan sekunder. Yang mana data primer adalah data yang diperoleh peneliti yang berasal dari lapangan secara langsung. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai potensi unggulan yang ada di kawasan tersebut serta perkembangan dari kondisi per desa kawasan yang ada di kawasan Alas Purwo yang diperoleh dari kegiatan survei. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa dokumen publikasi Kabupaten Banyuwangi baik menurut kabupaten dalam angka maupun kecamatan dalam angka guna untuk menunjang kajian penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Alas Purwo.

### 2.2.3 Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis statistika deskriptif dan analisis Location Quotient (LQ). Menurut Walpole (1995), statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif merupakan salah satu cara menyederhanakan dan menata data untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari peubah atau karakteristik yang dipelajari atau diamati (Suntoyo, 1990). Perlu dipahami bahwa statistka deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama sekali tidak menarik kesimpulan atau inferensia apapun tentang gugus data induknya yang lebih besar. Penyusunan tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran termasuk dalam kategori statistika deskriptif (Walpole, 1995). Jadi dapat disimpulkan bahwa statistika deskriptif adalah metode yang digunakan dalam mendeskripsikan data.

Sedangkan untuk teknik analisis LQ ini digunakan untuk mengukur sektor potensial pada sub sektor ekonomi dengan melihat kontribusi terhadap perekonomian perdesaan. Metode ini digunakan untuk mengetahui sektor unggulan (basis) yang dapat dikembangkan di suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 2010). Secara matematis menghitung nilai LQ dapat dihitung sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$



Keterangan:

LQ = Location Quotient

$V_i$  = Produksi komoditas  $i$  pada tingkat desa

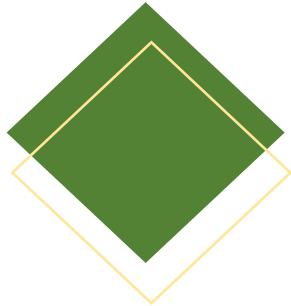
$V_t$  = Produksi total sub sektor komoditas  $i$  pada tingkat desa

$Y_i$  = Produksi komoditas  $i$  pada tingkat kecamatan

$Y_t$  = Produksi total sub sektor komoditas  $i$  pada tingkat kecamatan

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai LQ di komoditas  $i = 1$ . Ini berarti bahwa laju pertumbuhan komoditas  $i$  pada tingkat desa adalah sama dengan laju pertumbuhan komoditas yang sama dalam perekonomian tingkat kecamatan;
2. Nilai LQ di komoditas  $i > 1$ . Ini berarti bahwa laju pertumbuhan komoditas  $i$  pada tingkat desa adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan komoditas yang sama dalam perekonomian tingkat kecamatan. Dengan demikian, komoditas  $i$  merupakan komoditas unggulan tingkat desa sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh desa tersebut.
3. Nilai LQ di komoditas  $i < 1$ . Ini berarti bahwa laju pertumbuhan komoditas  $i$  di tingkat desa adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan komoditas yang sama dalam perekonomian tingkat kecamatan. Dengan demikian, komoditas  $i$  bukan merupakan komoditas unggulan desa dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh desa tersebut.



## BAB III

# GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

### 3.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif



Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan sebagian wilayahnya terdiri atas dataran tinggi yang berupa pegunungan yang menjadi daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah yang menjadi daerah berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang menjadi daerah penghasil berbagai biota laut.

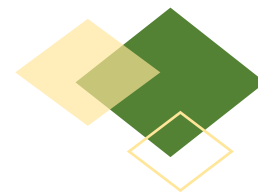
Batas administratif Kabupaten Banyuwangi sebagaimana berikut :

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso
- Sebelah Timur : Selat Bali

### 3.2 Fisik Dasar

#### 3.2.1 Iklim

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang di kelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis. Beberapa hal yang menggambarkan kondisi klimatologi meliputi jumlah curah hujan, kelembapan udara, rata – rata suhu, tekanan udara dan penyinaran matahari.



**Tabel 3.1 Jumlah Curah Hujan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)
Januari	136,6
Februari	257,0
Maret	217,1
April	40,7
Mei	232,4
Juni	77,9
Juli	81,7
Agustus	48,0
September	93,9
Oktober	242,0
November	28,6
Desember	148,9

Sumber : Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2021

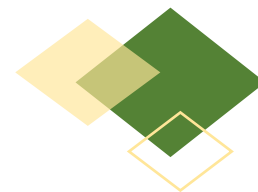
Musim hujan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 bermula di bulan Desember. Pada bulan Desember ini, curah hujan di Kabupaten Banyuwangi mulai meningkat dari yang semula 28,6 mm (bulan November) menjadi 148,9 mm (bulan Desember). Musim hujan di Kabupaten Banyuwangi berlangsung pada bulan-bulan berikutnya, meski dengan curah hujan tiap bulan yang tidak stabil pada tiap bulannya. Jumlah curah hujan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 paling banyak adalah pada bulan Februari yakni sebesar 257,0 mm. Sedangkan, jumlah curah hujan yang paling sedikit adalah pada Bulan November yakni sebesar 28,6 mm.

**Tabel 3.2 Kelembaban Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

Bulan	Kelembaban Udara (%)
Januari	74
Februari	80
Maret	79
April	77
Mei	81
Juni	80
Juli	79
Agustus	80
September	78
Oktober	81
November	77
Desember	81

Sumber : Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kelembaban udara Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 antara 74-81%. Kelembaban udara di Kabupaten



Banyuwangi terendah adalah pada Bulan Januari yakni sebesar 74%. Sedangkan, kelembaban udara terbesar adalah pada Bulan Mei, Oktober dan Desember yakni sebesar 81%.

**Tabel 3.3 Rata-Rata Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

Bulan	Rata-Rata Suhu Udara (°C)
Januari	28,5
Februari	28,0
Maret	28,2
April	28,7
Mei	28,0
Juni	27,0
Juli	26,3
Agustus	26,3
September	27,0
Oktober	27,2
November	28,2
Desember	27,2

Sumber : Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2021

Sedangkan rata-rata suhu udara Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 antara 26-28 °C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Banyuwangi terendah terjadi pada Bulan Juli dan Agustus yakni sebesar 26,3 °C. Sedangkan, rata-rata suhu udara terbesar atau terpanas adalah pada Bulan April yakni sebesar 28,7°C.

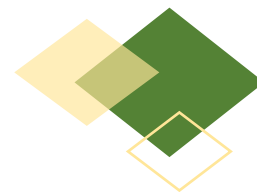
**Tabel 3.4 Tekanan Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

Bulan	Tekanan Udara (mb)
Januari	1009,40
Februari	1009,90
Maret	1009,70
April	1010,60
Mei	1010,40
Juni	1011,70
Juli	1011,30
Agustus	1011,90
September	1012,00
Oktober	1010,80
November	1010,20
Desember	1007,90

Sumber : Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tekanan udara Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 antara 1007,90 – 1012,00 mb. Tekanan udara di Kabupaten Banyuwangi terendah terjadi pada Bulan Desember yakni sebesar 1007,90 mb. Sedangkan, tekanan udara terbesar adalah pada Bulan September yakni sebesar 1012,00 mb.

Sedangkan penyinaran udara Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 antara 53-99%. Penyinaran udara di Kabupaten Banyuwangi paling sedikit terjadi pada Bulan Januari yakni



sebesar 53%. Sedangkan, penyinaran udara paling banyak sepanjang bulan terjadi Bulan Oktober yakni sebesar 99%.

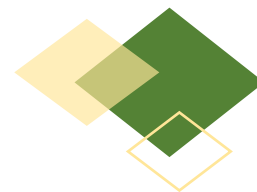
**Tabel 3.5 Penyinaran Udara Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

Bulan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	65
Februari	61
Maret	65
April	72
Mei	70
Juni	82
Juli	80
Agustus	81
September	89
Oktober	73
November	74
Desember	42

Sumber : Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2021

### 3.2.2 Topografi

Sebagian besar kondisi topografi Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh pegunungan di bagian utara dan barat, sedangkan wilayah selatan didominasi oleh dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara adalah sebesar 40° dan dataran rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat terdapat 35 DAS, selain dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0 - > 3000 m dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi tanah usaha (WTU) ketinggian tersebut dibagikan atas :

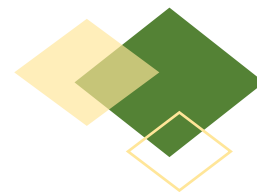


**Tabel 3.6 Ketinggian Wilayah Kabupaten Banyuwangi Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)
Pesanggaran	0 - 1000
Siliragung	0 - 1000
Bangorejo	0 - 500
Purwoharjo	0 - 500
Tegaldlimo	0 - 500
Muncar	0 - 100
Cluring	0 - 500
Gambiran	0 - 500
Tegalsari	0 - 500
Glenmore	0 - > 3000
Kalibaru	100 - 3000
Genteng	0 - 500
Srono	0 - 500
Rogojampi	0 - 500
Kabat	0 - 500
Singojuruh	0 - 500
Sempu	100 - 1000
Songgon	100 - > 3000
Glagah	0 - 1000
Licin	100 - 3000
Banyuwangi	0 - 100
Giri	0 - 500
Kalipuro	0 - > 3000
Wongsorejo	0 - 3000

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

1. Ketinggian 0 - 100 m diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah dataran rendah yang meliputi sebagian dari Kecamatan Muncar dan Banyuwangi.
2. Ketinggian 0 – 500 m diatas permukaan laut (mdpl) meliputi wilayah Kecamatan Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, Singojuruh dan Giri.
3. Ketinggian 0 - 1000 m diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah yang berbukit meliputi sebagian dari Kecamatan Pesanggaran, Siliragung dan Glagah.



4. Ketinggian 0 - 3000 m diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah yang pegunungan meliputi Kecamatan Wongsorejo.
5. Ketinggian 0 - > 3000 m diatas permukaan laut (mdpl) merupakan pegunungan meliputi Kecamatan Glenmore dan Kalipuro.
6. Ketinggian 100 - 1000 m diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah yang berbukit meliputi Kecamatan Sempu.
7. Ketinggian 100 - 3000 m diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah pegunungan meliputi Kecamatan Kalibaru dan Licin.
8. Ketinggian 100 - > 3000 m diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah pegunungan meliputi Kecamatan Songgon.

### 3.2.3 Jenis Tanah

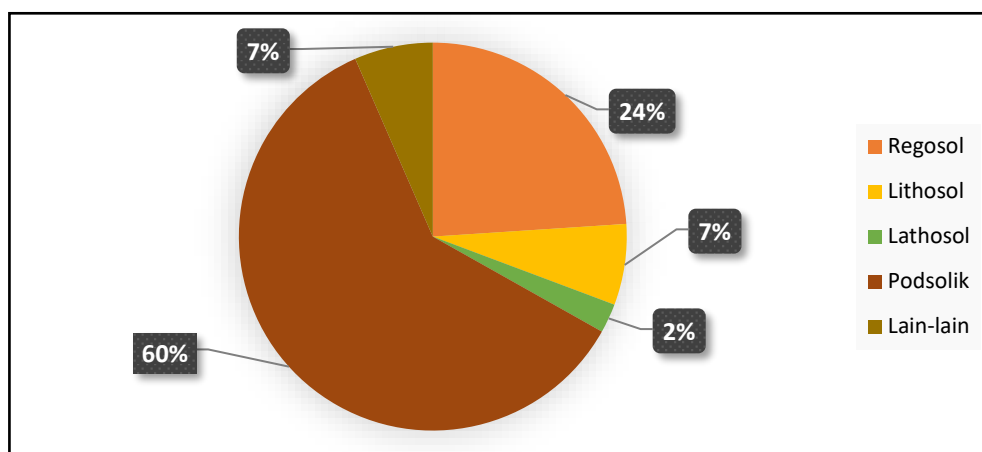
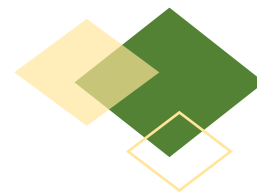
Kondisi geologi di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi**

Struktur Geologi	Luas	
	Ha	%
Aluvium	134.525,00	23,27
Hasil Gunung Api Kwarter Muda	170.310,50	29,43
Hasil Gunung Api Kwarter Tua	59.283,00	10,26
Andesit	47.417,75	8,20
Miosen Fales Semen	89.177,25	15,43
Miosen Falssem Batu Gamping	77.536,50	13,41

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Dari data di atas dapat di ketahui bahwa struktur geologi di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar merupakan hasil Gunung Api Kwarter Muda sebesar 30% dan Aluvium sebesar 23% yang berupa tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan sehingga cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Struktur geologi lainnya adalah miosen falses semen sebesar 16%, miosen falses batu gamping sebesar 13%, hasil gunung api kwarter tua dengan luas sebesar 10% dan struktur geologi andesit merupakan struktur geologi terendah di Kabupaten Banyuwangi dengan luas hanya sebesar 8%. Sedangkan, keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada gambar berikut :



**Gambar 3.1 Komposisi Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari tanah regosol, litosol, latosol, podsolik dan gambut. Sebagian besar komposisi jenis tanah Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh Tanah Podsolik sebesar 60%, Tanah Regosol 24%, Lithosol 7%, Gambut 7% dan jenis tanah Lathosol hanya 2% dari luas area di Kabupaten Banyuwangi.

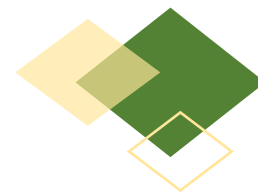
Adapun penyebaran jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana berikut :

1. Tanah regosol yang terdapat pada wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran, Bangorejo, Cluring, Muncar, Purwoharjo dan Tegaldlimo.
2. Tanah lithosol yang terdapat pada wilayah Kecamatan Kalibaru, Glenmore dan Pesanggaran.
3. Tanah lathosol yang terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo.
4. Tanah podsolik yang hampir terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar hanya sebagian kecil terdapat tanah podsolik.

### 3.2.4 Penggunaan Lahan

Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar  $\pm 5.782,50 \text{ km}^2$ . Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan dibandingkan kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62 %, daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 %, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 %, sedangkan yang dimanfaatkan sebagai pemukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 %. Sisanya telah dipergunakan penduduk Kabupaten Banyuwangi





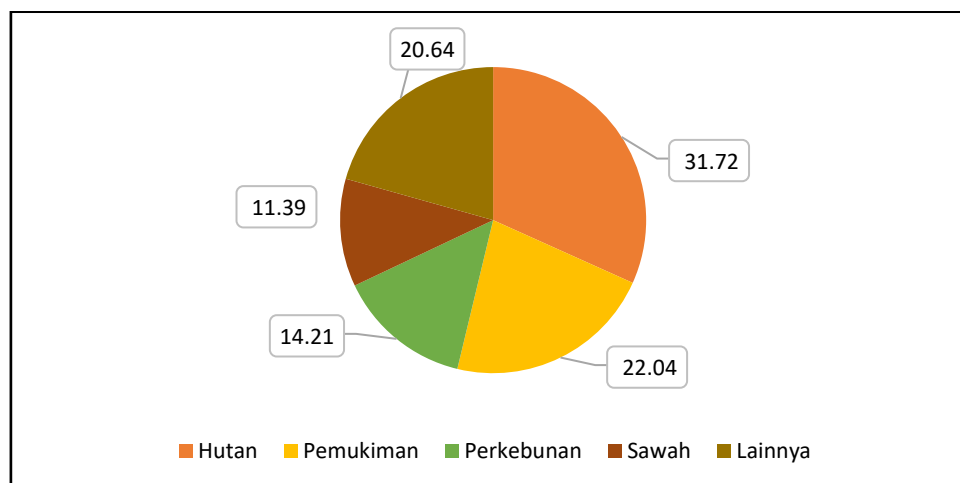
untuk jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain, penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sekitar 175,8 km serta jumlah pulau sebanyak 10 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.

**Tabel 3.8 Penggunaan Lahan Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaan**

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Hutan	183.396,34
Pemukiman	127.454,22
Perkebunan	82.143,63
Sawah	66.152
Lainnya	119.103,81

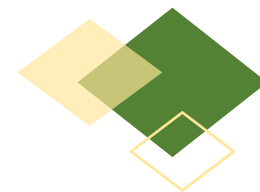
*Sumber : Banyuwangi dalam Angka 2020*

Berdasarkan data statistik, Kabupaten Banyuwangi berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember dalam hal potensi lahan pertanian. Tidak mengherankan apabila Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Di samping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif kedepan pengembangan sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.



**Gambar 3.2 Penggunaan Lahan Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaan**

*Sumber: Banyuwangi dalam Angka 2020*



### 3.3 Kependudukan

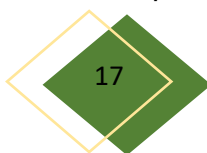
#### 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

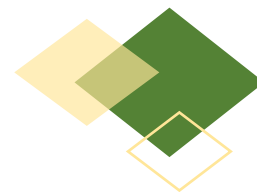
Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.599.811 jiwa dengan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Licin dengan jumlah penduduk sebesar 28.764 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muncar dengan jumlah penduduk sebesar 133,187 jiwa. Kemudian di tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.604.887 jiwa dengan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Licin dengan jumlah penduduk sebesar 29.602 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muncar dengan jumlah penduduk sebesar 130,649 jiwa.

**Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pesanggaran	49,422	49,108	49,248	53,620	53,373
2	Siliragung	45,125	45,440	45,583	49,560	48,678
3	Bangorejo	60,405	60,247	60,444	66,900	65,709
4	Purwoharjo	65,800	66,562	66,777	71,000	69,471
5	Tegaldlimo	62,223	63,235	63,439	69,150	66,737
6	Muncar	133,187	130,649	130,919	138,430	136,425
7	Cluring	71,397	72,121	72,394	81,100	77,417
8	Gambiran	59,898	59,404	59,555	68,560	66,187
9	Tegalsari	47,304	47,872	48,029	52,110	52,361
10	Glenmore	70,894	72,015	72,252	77,170	75,365
11	Kalibaru	63,280	62,575	62,724	65,290	65,142
12	Genteng	85,149	84,423	84,596	94,930	92,448
13	Srono	89,069	89,992	90,262	99,600	96,914
14	Rogojampi	94,537	54,554	54,766	57,970	57,217
15	Blimbingsari	-	52,492	52,677	56,750	54,341
16	Kabat	69,393	60,103	60,284	65,440	63,413
17	Singojuruh	45,607	47,788	47,987	54,280	50,463
18	Sempu	72,323	72,508	72,732	85,870	83,100
19	Songgon	50,509	52,927	53,138	59,670	57,077
20	Glagah	35,063	37,445	37,681	37,390	36,532
21	Licin	28,764	29,602	29,722	29,820	29,460
22	Banyuwangi	108,617	110,042	110,310	121,260	117,558
23	Giri	29,617	29,692	29,786	31,610	31,621
24	Kalipuro	84,320	77,426	77,520	8,384	83,685
25	Wongsorejo	77,908	76,665	76,852	76,350	77,420
	Jumlah	1,599,811	1,604,887	1,609,677	1,672,214	1,708,114

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

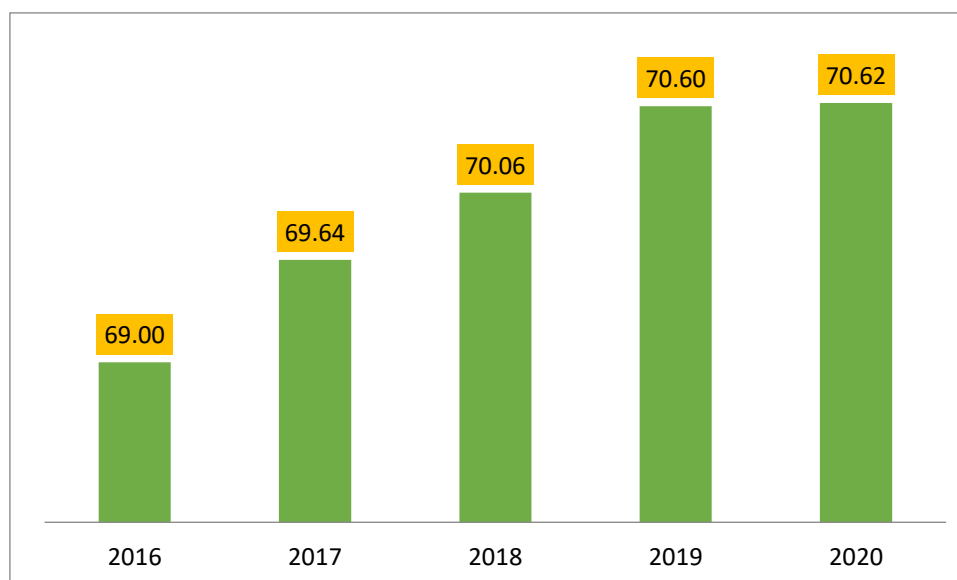




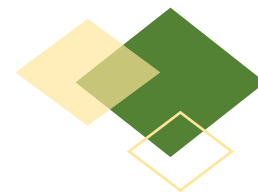
Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.609.677 jiwa dengan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Licin dengan jumlah penduduk sebesar 29.772 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muncar dengan jumlah penduduk sebesar 130.919 jiwa. Tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.672.214 jiwa dengan jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Licin dengan jumlah penduduk sebesar 29.820 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muncar dengan jumlah penduduk sebesar 138.430 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.708.114 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Licin dengan jumlah penduduk sebesar 29.460 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Muncar yakni sebesar 136.425 jiwa.

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk suatu wilayah atau bahkan negara. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*



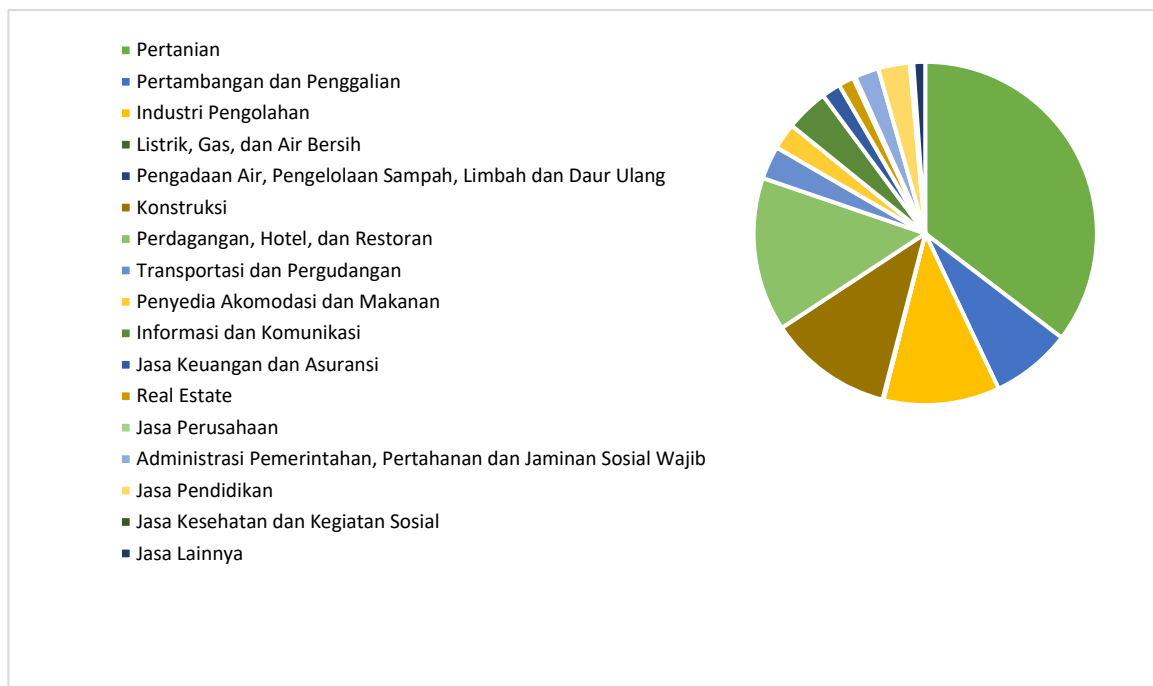
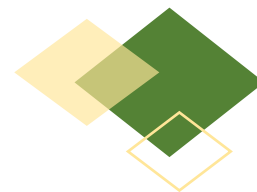
### 3.4 Perekonomian Wilayah

Berdasarkan data dibawah dapat diketahui bahwa produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyuwangi mengalami perkembangan yang fluktuatif di masing-masing sektor. Sektor terbesar penyumbang PDRB ADHB di Kabupaten Banyuwangi yaitu sektor pertanian seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2018 PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 77.842,24 miliar, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp 83.595,73 miliar, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 81.102,88 miliar. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada semua sektor perekonomian.

**Tabel 3.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2016-2020**

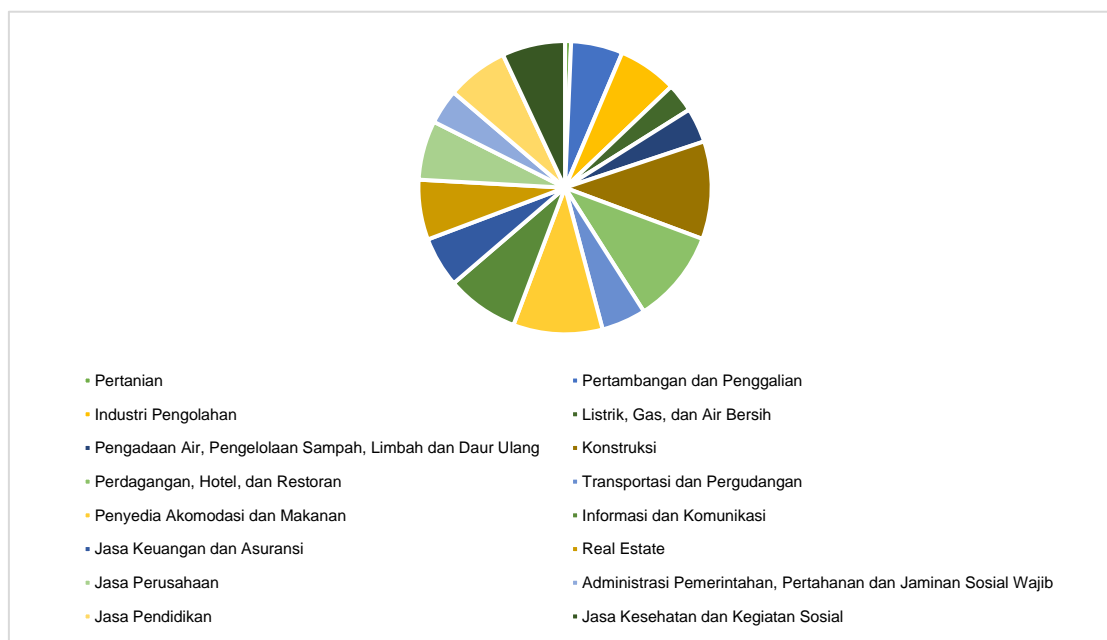
Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian	24 329.42	24 541.48	24 081.01
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	5 963.32	6 211.03	5 913.07
<b>C</b>	Industri Pengolahan	8 521.54	9 351.68	9 422.28
<b>D</b>	Listrik, Gas, dan Air Bersih	33.70	35.31	34.91
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44.29	47.21	49.71
<b>F</b>	Konstruksi	10 517.95	12 005.04	11 362.04
<b>G</b>	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	12 469.77	14 017.66	13 120.38
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	2 501.20	2 706.10	2 369.89
<b>I</b>	Penyedia Akomodasi dan Makanan	2 137.88	2 425.55	2 105.92
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	3 225.75	3 566.03	3 887.66
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 377.53	1 449.97	1 449.27
<b>L</b>	Real Estate	1 170.66	1 268.36	1 301.74
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	178.92	194.92	186.23
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 745.03	1 822.84	1 845.59
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	2 363.86	2 573.71	2 681.29
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278.49	302.06	351.71
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	982.93	1 076.76	940.19
<b>PDRB</b>		<b>77 842.24</b>	<b>83 595.73</b>	<b>81 102.88</b>
<b>PDRB Tanpa Migas</b>		<b>77 842.24</b>	<b>83 595.73</b>	<b>81 102.88</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi



**Gambar 3.4 Distribusi Presentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2018**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*



**Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Laju pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2020 di Kabupaten Bnayuwangi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2018 sebesar 5,84%, mengalami

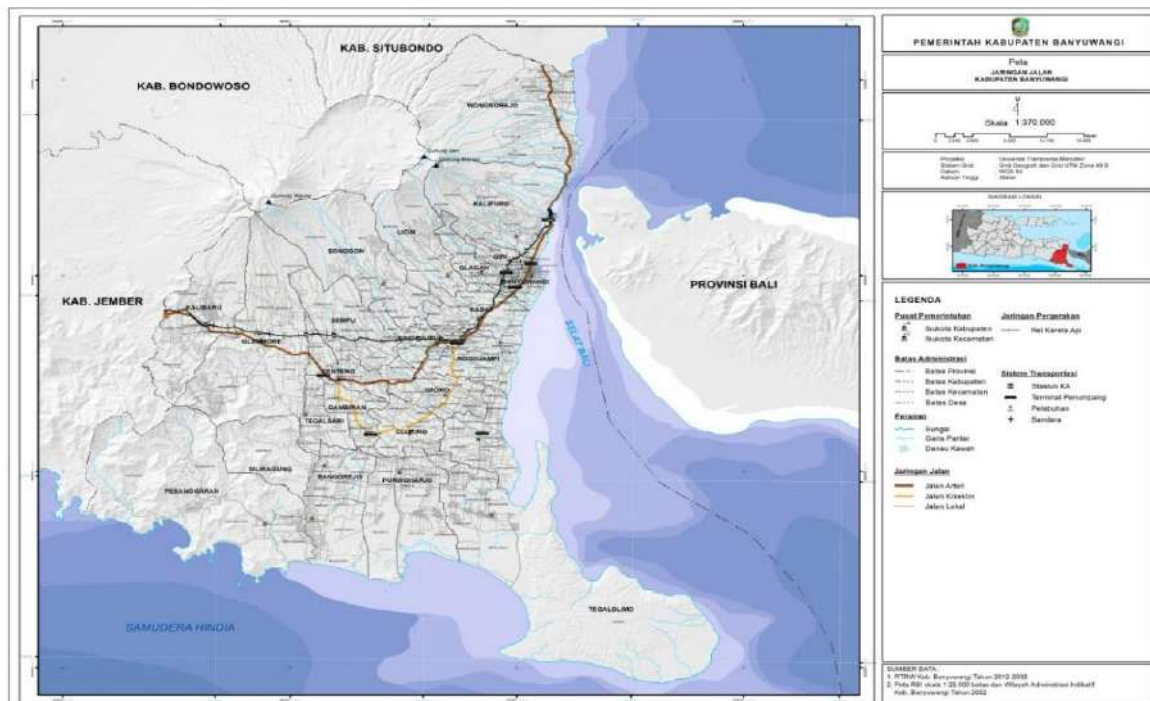


penurunan pada tahun 2019 menjadi 5,55% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -3,58%. Penurunan yang signifikan tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang berdampak pada semua sektor termasuk perekonomian.

### 3.5 Kondisi Infrastruktur

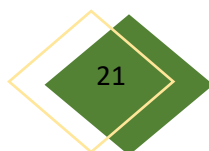
#### 3.5.1 Jalan dan Jembatan

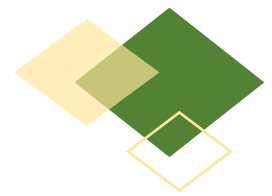
Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Kabupaten Banyuwangi di tahun 2019 panjang jalan di Kabupaten Banyuwangi adalah 2.994,86 km. Dengan pembagian jalan negara sepanjang 134,2 km, jalan provinsi sepanjang 89,41 km dan jalan kabupaten sepanjang 2.7771,25 km



Gambar 3.6 Jaringan Jalan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Diolah





Jaringan jalan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan fungsinya, sebagai berikut:

**1. Jalan Arteri Primer**, diantaranya adalah :

- Bajulmati (Batas Kab. Situbondo)-Ketapang
- Jalan Basuki Rahmat
- Jalan Yos Sudarso
- Jalan Gatot Subroto

**2. Jalan Kolektor Primer (K1)**, diantaranya adalah :

- Batas Kab. Jember-Genteng Kulon
- Genteng Kulon-Jajag-Benculuk
- Benculuk-Rogojampi
- Rogojampi-Batas Kota Banyuwangi
- Srono-Muncar
- Jalan. S. Parman
- Jalan. Adi Sucipto
- Jalan. A.Yani
- Jalan. PB. Sudirman

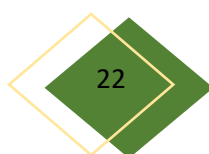
**3. Jalan Lokal Primer**, adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan jalan kolektor

**4. Jalan Arteri Sekunder**, diantaranya adalah ruas jalan Rogojampi – Benculuk – Jajag – Genteng

### 3.5.2 Sarana Transportasi

Jaringan transportasi yang dapat mendukung pengembangan industri tidak hanya berupa transportasi darat (jaringan jalan) tetapi juga transportasi laut. Berdasarkan kondisi yang ada, pelabuhan Tanjungwangi mempunyai fasilitas pelabuhan sebagai berikut : kolam pelabuhan seluas 11,97 ha dengan kedalaman -12 mLws, mampu dilalui kapal niaga generasi III dengan bobot 40.000 DWT serta memiliki dermaga umum sepanjang 518 m, mampu disandari 2 (dua) kapal samudera dan 2 (dua) kapal nusantara sekaligus.

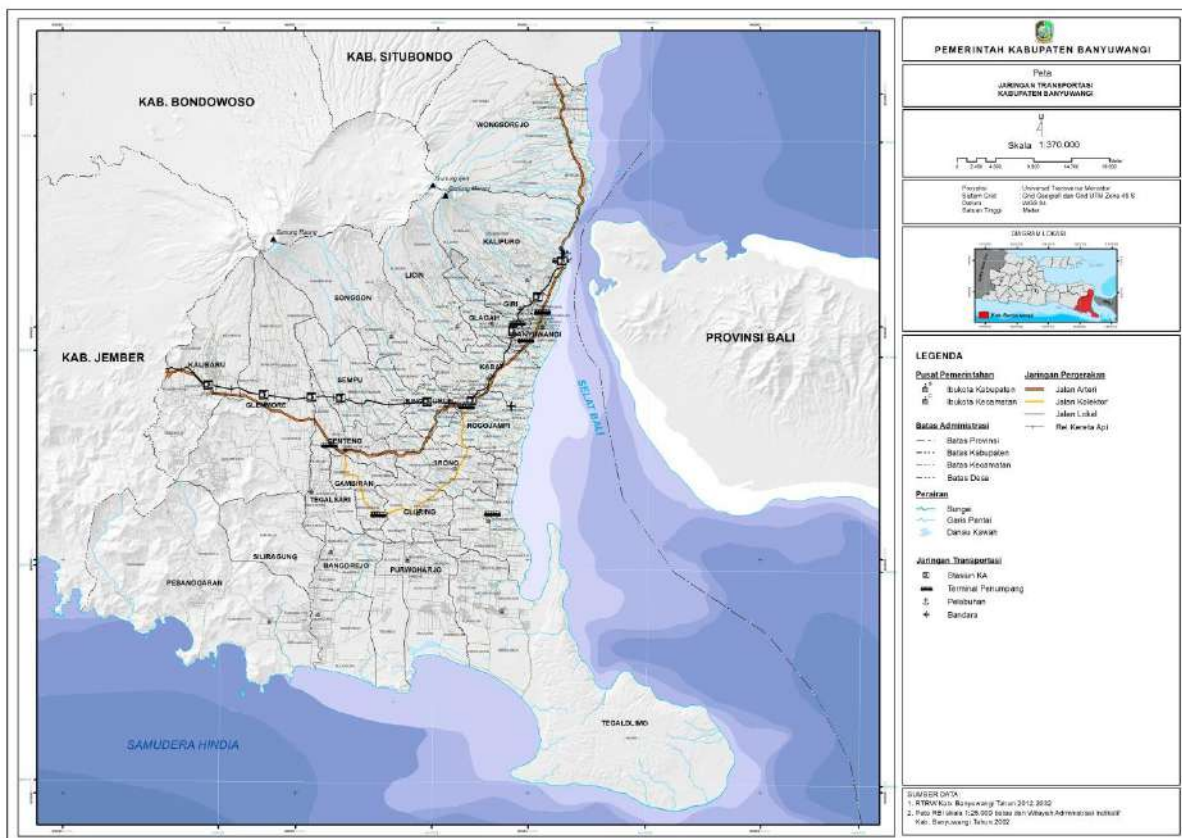
Berdasarkan kondisi yang ada sebenarnya Pelabuhan Tanjungwangi berdasarkan fungsinya dalam perdagangan Internasional dan Nasional dikategorikan sebagai pelabuhan laut atau yang sering juga disebut sebagai Pelabuhan Samudera. Pelabuhan laut bebas





dimasuki oleh kapal-kapal asing. Untuk kondisi saat ini, pelabuhan Tanjungwangi sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai namun permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih minimnya kapal yang bersandar untuk membongkar muatannya di Pelabuhan Tanjungwangi. Hal ini dikarenakan masih minimnya arus keluar masuk barang dan jasa melalui Kabupaten Banyuwangi.

Melihat pada minimnya jumlah kapal barang yang membongkar muatannya di Pelabuhan Tanjungwangi akan berdampak pada minimnya pemasukan yang diterima pemerintah melalui biaya pungutan bongkar muat barang. Selain itu dengan semakin jarangya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjungwangi akan berpengaruh terhadap eksistensi dan kinerja pelabuhan.



**Gambar 3.7 Jaringan Transportasi Kabupaten Banyuwangi**  
*Sumber: Data Diolah*

### 3.5.3 Air Bersih

Kondisi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan air baku untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi belum terpenuhi. Masyarakat memenuhi kebutuhan akan air bersih melalui sumur gali dan mata air. Namun kegiatan ini tentu dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti berkurangnya ketersediaan air tanah maupun kualitas air sumur maupun mata air yang berkurang akibat pencemaran.



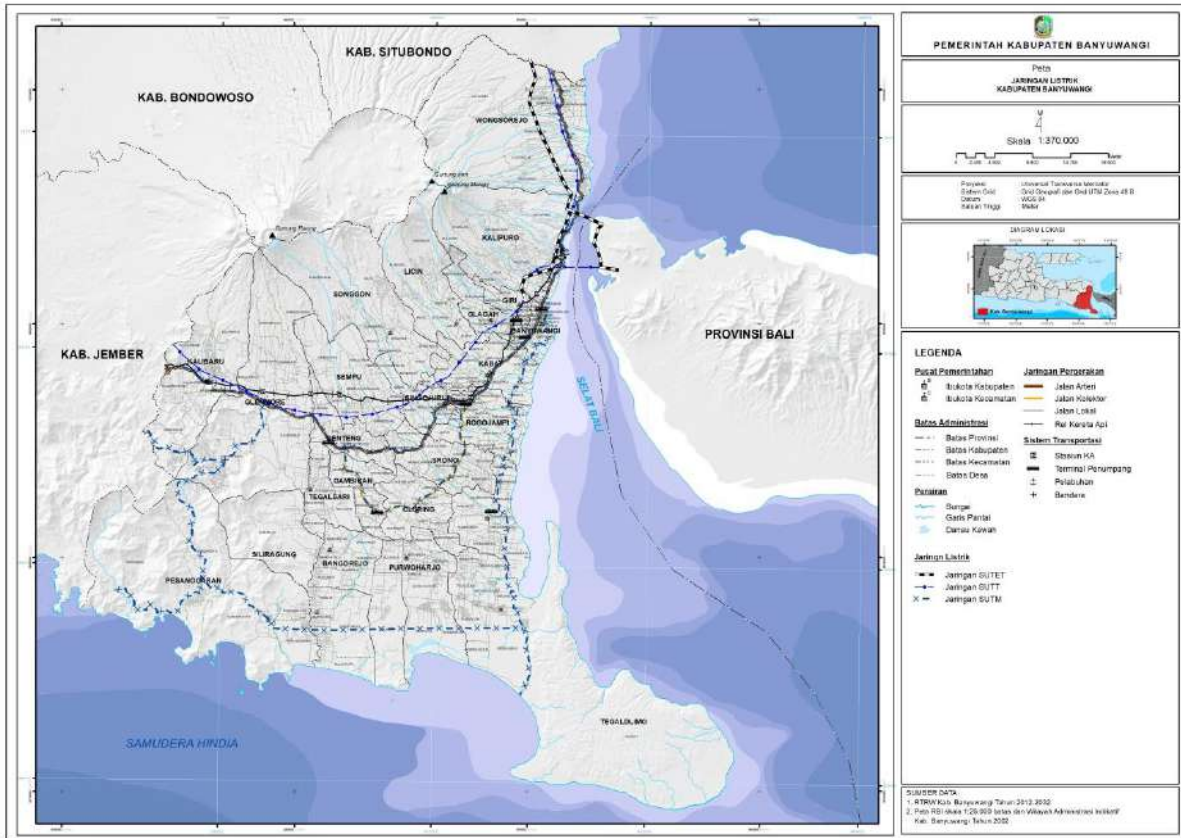
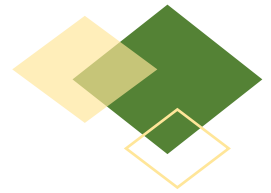


#### 3.5.4 Sanitasi

Limbah rumah tangga adalah seluruh limbah, baik berbentuk cair, gas akibat pembakaran maupun padat, akibat aktivitas sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 173/Menkes/Per/VIII/77 Bab I pasal 1 butir j, menyebutkan bahwa buangan rumah tangga adalah buangan yang berasal bukan dari industri, melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar dan pertokoan serta rumah sakit. Sedangkan limbah domestik mencakup seluruh limbah rumah tangga yang dibuang ke dalam saluran/daerah pembuangan, termasuk limbah sejumlah besar industri kecil yang sulit diidentifikasi dan dihitung secara terpisah. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga yang ada di Kabupaten Banyuwangi, belum mempunyai saluran pembuangan air limbah. Kondisi tersebut mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan di wilayah permukiman yang bersangkutan.

#### 3.5.5 Jaringan Energi Listrik

Untuk saat ini di Kabupaten Banyuwangi jaringan listrik sudah menjangkau di seluruh desa, namun meski seluruh desa telah dilalui jaringan listrik masih ada masyarakat yang belum dapat menikmatinya secara langsung. Untuk itu perlu adanya optimalisasi dan pengembangan jaringan untuk memastikan seluruh kebutuhan akan energi listrik penduduk dapat terpenuhi. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, direncanakan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah - daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan.

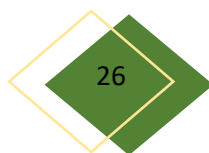


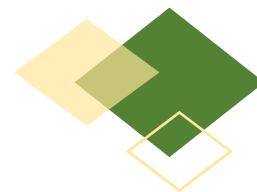
**Gambar 3.9 Jaringan Listrik Kabupaten Banyuwangi**  
*Sumber: Data Diolah*

### 3.6 Potensi Wilayah

#### 1. Potensi Industri

Industri di Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh industri kecil meliputi batu bata, tahu, kerajinan bamboo, gula kelapa, olahan kerajinan kelapa, perikanan, bordir, makanan ringan, batik, kerajinan monte, genteng, industri kayu, dan lainnya. Jumlah IKM yang tercatat sampai akhir tahun 2019 berjumlah 18.130 unit. Sedangkan jumlah sentra IKM yang tercatat berjumlah 58 sentra.



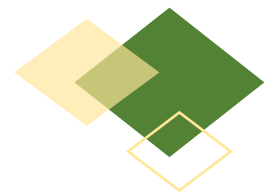


**Tabel 3.11 Sentra IKM per Kecamatan di kabupaten Banyuwangi**

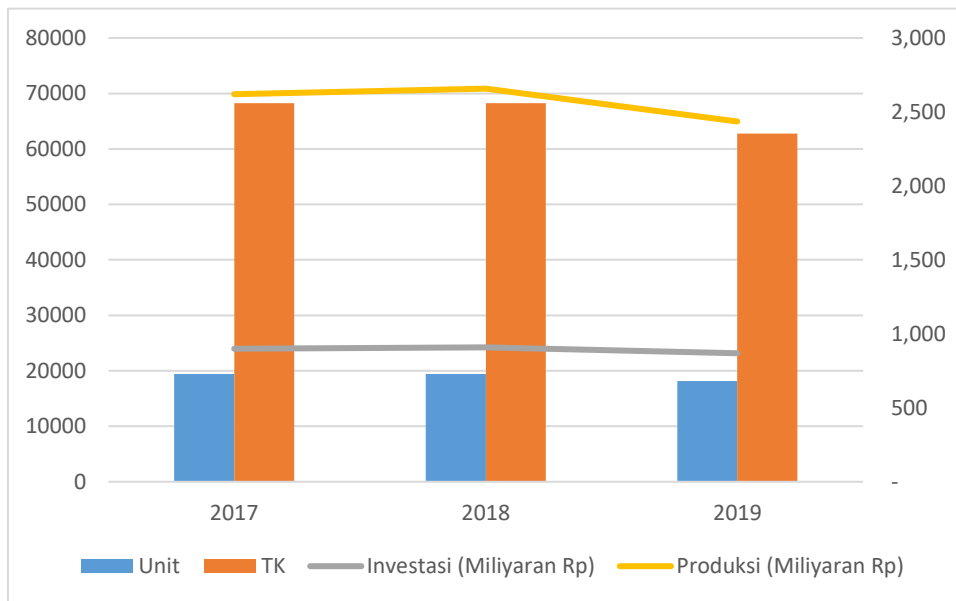
NO	KECAMATAN	SENTRA IKM
1.	Banyuwangi	Tempe, kue kering, kerupuk
2.	Tegaldlimo	Genteng, batu bata, tahu, tempe, gerabah, anyaman bambu, gula merah
3.	Muncar	Gula merah, anyaman godong, krupuk ikan, terasi, petis
4.	Singojuruh	Bordir, kerajinan kulit, terasi, monte, kayu
5.	Bangorejo	Gula merah
6.	Purwoharjo	Batu bata, gedek, mebel, tahu
7.	Srono	Tungku, tahu, keranjang ikan
8.	Kabat	Gula merah, cobek, batik
9.	Siliragung	Genteng, anyaman bambu, makanan ringan
10.	Pesanggaran	Gula merah, makanan ringan
11.	Tegalsari	Anyaman bambu, keripik siput
12.	Sempu	Opak gulung, gula kelapa, kopyah haji
13.	Giri	Batik, kerupuk
14.	Kalibaru	Gula kelapa, sayangan, kopi
15.	Cluring	Batik, anyaman bambu, roti, tahu
16.	Gambiran	Tahu, tempe, sabit, batu bata, cobek
17.	Glagah	Kerajinan kayu,
18.	Genteng	Bata merah, konveksi, anyaman tas plastik, tahu
19.	Songgon	Kopi, keripik, pande
20.	Blimbingsari	Anyaman bambu, konveksi, tas kulit, gula merah, kerupuk, rengginang, kue kering
21.	Rogojampi	Marning, tahu, tempe
22.	Licin	Gula merah, anyaman bambu
23.	Kalipuro	Gula merah, anyaman lidi, anyaman bambu, manisan, kopi
24.	Glenmore	Gula merah, tahu, tempe
25.	Wongsorejo	Tahu, tempe

*Sumber : Dinas Perindustrian, Ketengakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi*

Dalam lingkup kecamatan, terdapat tiga kecamatan dengan jumlah IKM terbanyak di Banyuwangi, yaitu; (i) Srono, (ii) Muncar, dan (iii) Blimbingsari. Dimana, jumlah proporsi IKM pada Ketiga kecamatan tersebut adalah sepertiga dari total IKM. Namun demikian, IKM Banyuwangi tersebar pada setiap kecamatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa IKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian Banyuwangi kedepan karena eksistensinya yang

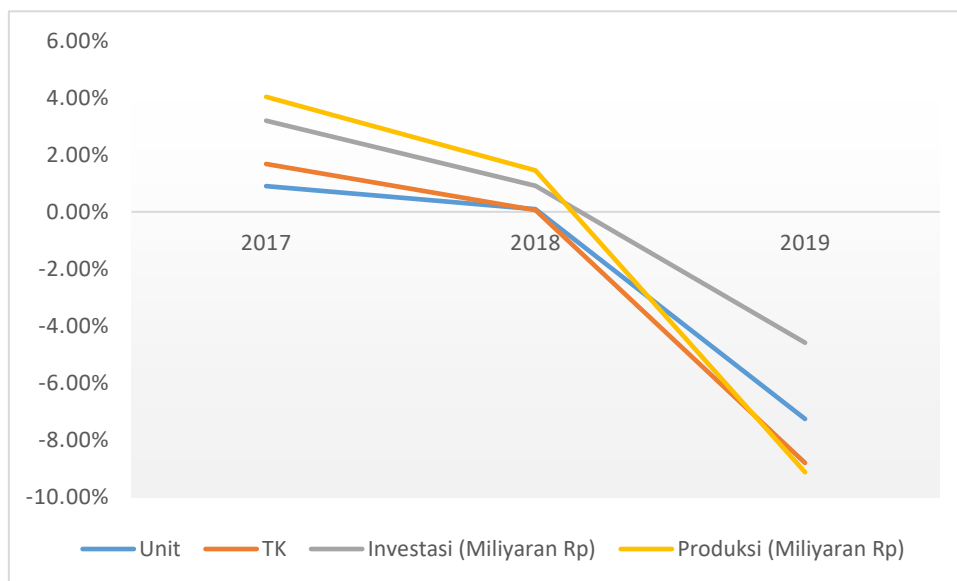


terus meningkat. Gambar dibawah ini, menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan IKM dalam tiga tahun terakhir di Banyuwangi.



**Gambar 3.10 Perkembangan IKM Kabupaten Banyuwangi**

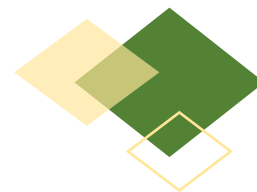
Sumber : Dinas Perindustrian, Ketengakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi



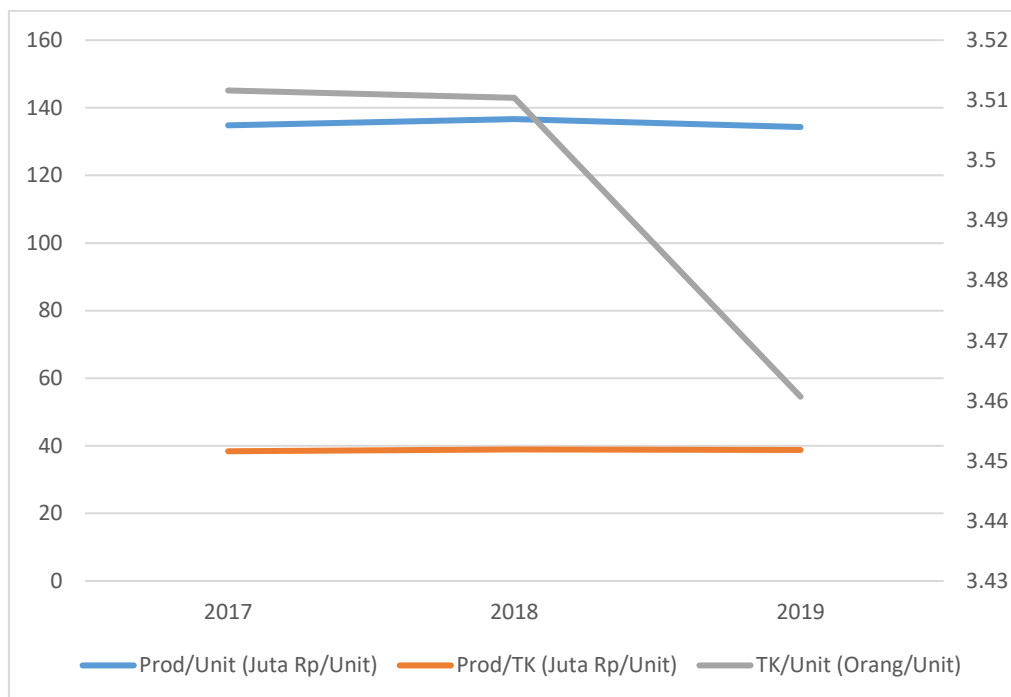
**Gambar 3.11 Pertumbuhan IKM Kabupaten Banyuwangi**

Sumber : Dinas Perindustrian, Ketengakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Gambar 3.11, dapat diketahui bahwa setiap komponen yaitu unit IKM, tenaga kerja IKM, investasi, dan nilai produksi menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Lebih lanjut, berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui mengenai kinerja IKM yang dihitung melalui input dan output dan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan investasi pada IKM di Kabupaten Banyuwangi.



Terdapat lima informasi tambahan yang dapat diolah pada Gambar 3.12, yaitu: (i) produktivitas unit IKM yakni rasio nilai produksi dibagi total unit IKM; (ii) produktivitas tenaga kerja yakni rasio nilai produksi dibagi jumlah tenaga kerja; (iii) kebutuhan tenaga kerja IKM yakni rasio jumlah tenaga kerja dibagi total unit IKM; (iv) kebutuhan investasi IKM yakni rasio jumlah investasi dibagi total unit IKM; dan (v) produktivitas investasi yakni rasio nilai produksi dibagi jumlah investasi. Secara spesifik, informasi yang dimaksud diilustrasikan dalam Gambar berikut.



**Gambar 3.12 Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi**

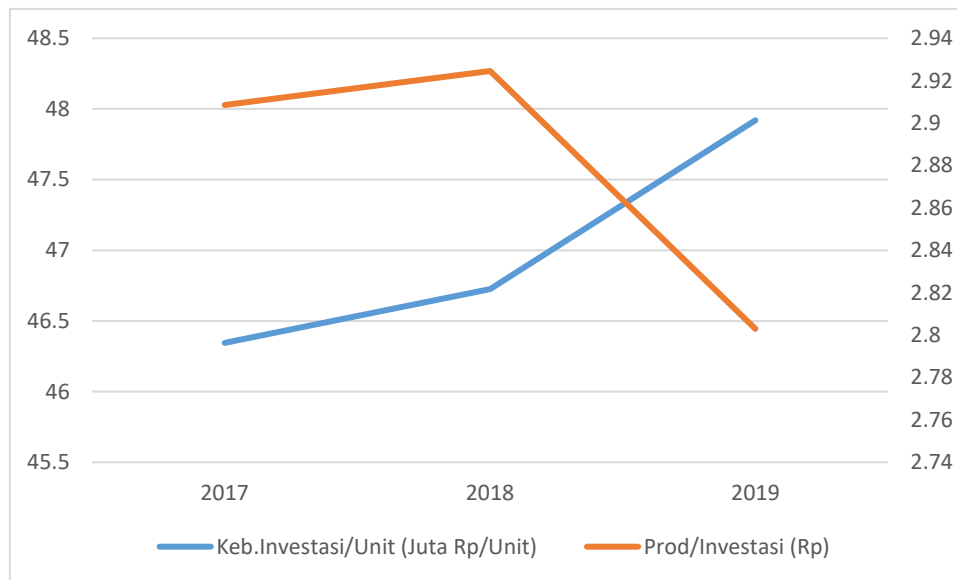
Sumber : Dinas Perindustrian, Ketengakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Gambar 3.13, diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja menunjukkan hasil yang cukup tinggi dengan tingkat produktivitas sebesar 38 juta /orang pada tahun 2019. Sedangkan tingkat produktivitas investasi, sebagaimana ditunjukkan pada grafik kinerja investasi pada IKM yang mengalami penurunan tahun 2019. Tercatat bahwa setiap satu investasi mampu menghasilkan 2,8. Artinya, jika terdapat investasi sebesar 1 juta maka nilai produksi yang mampu dihasilkan adalah sebesar 2,8 juta. Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja dan investasi pada IKM Banyuwangi menunjukkan penurunan disertai dengan penurunan nilai produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa IKM Banyuwangi menunjukkan produksi yang kurang efisien.

Namun demikian, sampai apda titik ini, isu pemberdayaan IKM Banyuwangi kedepan adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing IKM. pasalnya, selama tiga tahun terakhir, produktivitas unit IKM dan produktivitas tenaga kerja menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018, produktivitas unit IKM adalah sebesar 136 juta/unit menjadi 134 juta/unit



pada tahun 2019. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja cenderung stagnan sejak 2017. Diduga, terdapat tiga penyebab turunnya produktivitas unit IKM, yaitu: (i) rendahnya kualitas baik sumber daya maupun sarana dan prsarana IKM; (ii) lemahnya infrastruktur pengembangan industry IKM; dan (iii) rendahnya penguasaan teknologi informasi



**Gambar 3.13 Kinerja Investasi IKM kabupaten Banyuwangi**

Sumber : Dinas Perindustrian, Ketengakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi



**Tabel 3.12 Industri Unggulan Kabupaten Banyuwangi**

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2041	
1	Industri Pengolahan Kopi dan Kakao	Jenis Industri				Kalibaru, Songgon, Kalipuro
		Kopi				
		Rencana Aksi				
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan teknologi proses produksi</li> <li>2. Peningkatan efisiensi produksi</li> <li>3. Peningkatan daya saing melalui pendampingan <i>packaging</i> yang dapat memasuki pasar luar negeri</li> <li>4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan</li> <li>5. Peningkatan integrasi dengan kawasan pariwisata</li> <li>6. Peningkatan ketrampilan SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan networking</li> <li>2. Peningkatan diversifikasi produk</li> <li>3. Penguatan <i>branding</i> dan mutu produk</li> <li>4. Peningkatan kerjasama dengan kamar dagang</li> <li>5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pembiayaan</li> </ol>	<p>Perluasaan pangsa pasar produk aneka olahan kopi dan kakao</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan industri ramah lingkungan</li> <li>2. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence industri</li> </ol>	





No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2041	
2	Industri pengolahan hasil laut	Jenis Industri				Muncar
		Kerupuk ikan, terasi, petis,				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan efisiensi produksi 3. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 4. Peningkatan ketrampilan SDM	1. Peningkatan teknologi produksi 2. Peningkatan networking 3. Peningkatan kerjasama dengan kamar dagang 4. Peningkatan investasi	Perluasan pangsa pasar produk aneka olahan hasil laut	Penguatan industri ramah lingkungan	
3	Industri pengolahan kayu	Jenis Industri				Glagah, Singojuruh
		Kerajinan Kayu, mebel				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan ketrampilan SDM 3. Peningkatan efisiensi produksi 4. Menjamin ketersediaan bahan baku	1. Peningkatan teknologi produksi 2. Peningkatan networking 3. Peningkatan kerjasama dengan kamar dagang 4. Peningkatan investasi	Perluasan pangsa pasar	Penguatan industri ramah lingkungan	





No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2041	
4	Industri Logam Dasar	Jenis Industri				Gambiran
		Sabit				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan ketrampilan SDM 3. Peningkatan efisiensi produksi 4. Menjamin ketersediaan bahan baku	1. Peningkatan teknologi produksi 2. Peningkatan networking 3. Peningkatan kerjasama dengan kamar dagang 4. Peningkatan investasi	Perluasan pangsa pasar	Penguatan industri ramah lingkungan	
5	Industri Barang Galian Bukan Logam	Jenis Industri				Tegaldlimo, Kabat, Purwoharjo
		Genteng, batu bata, Gerabah, Cobek,				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan efisiensi produksi 3. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 4. Peningkatan ketrampilan SDM 5. Menjamin ketersediaan bahan baku	1. Peningkatan teknologi produksi 2. Peningkatan networking 3. Peningkatan kerjasama dengan kamar dagang 4. Peningkatan investasi	Perluasan pangsa pasar	Penguatan industri ramah lingkungan	





No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2041	
6	Industri Tekstil dan Alas Kaki	Jenis Industri				Singojuruh, Giri
		Bordir, batik				
		Rencana Aksi				
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan teknologi proses produksi</li> <li>2. Peningkatan efisiensi produksi</li> <li>3. Peningkatan daya saing melalui pendampingan <i>packaging</i> yang dapat memasuki pasar luar negeri</li> <li>4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan</li> <li>5. Peningkatan integrasi dengan kawasan pariwisata</li> <li>Peningkatan ketrampilan SDM</li> <li>6. Peningkatan networking</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pembiayaan kompetitif</li> <li>2. Peningkatan inovasi aneka produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki</li> <li>3. Peningkatan diversifikasi produk</li> <li>4. Peningkatan teknologi proses produksi</li> </ol>	Perluasan pangsa pasar aneka produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki di pasar luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan industri ramah lingkungan</li> <li>2. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence industri</li> </ol>	

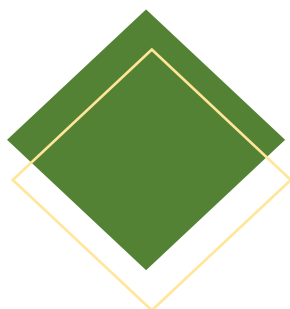
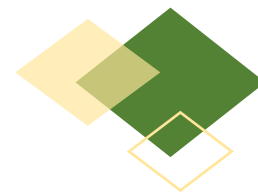


Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2041	
7	Industri Makanan dan Minuman	Jenis Industri				Banyuwangi, Tegaldlimo, Muncar, Bangorejo, Purwoharjo, Srono, Kabat, Siliragung, Pesanggaran, Tegalsari, Sempu, Giri, Kalibaru, Cluring Gambiran, Genteng, Songgon, Blimbingsari, Rogojampi, Licin, Kalipuro, Glenmore, Wongsorejo
		Tahu, tempe, krupuk ikan, makanan ringan, keripik siput, opak gulung, gula kelapa, gula merah, kerupuk, keripik, marning, manisan, kue kering, roti				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan teknologi proses produksi 2. Peningkatan efisiensi produksi 3. Peningkatan daya saing melalui pendampingan <i>packaging</i> yang dapat memasuki pasar luar negeri 4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 5. Peningkatan integrasi dengan kawasan pariwisata 6. Peningkatan ketrampilan SDM	1. Peningkatan networking 2. Peningkatan diversifikasi produk 3. Penguatan <i>branding</i> dan mutu produk 4. Peningkatan kerjasama dengan kamar dagang 5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pembiayaan	Perluasaan pangsa pasar produk aneka makanan dan minuman	1. Penguatan industri ramah lingkungan 2. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence industri	





## BAB IV

# GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN

### 4.1 Penetapan dan Delineasi Kawasan Perdesaan

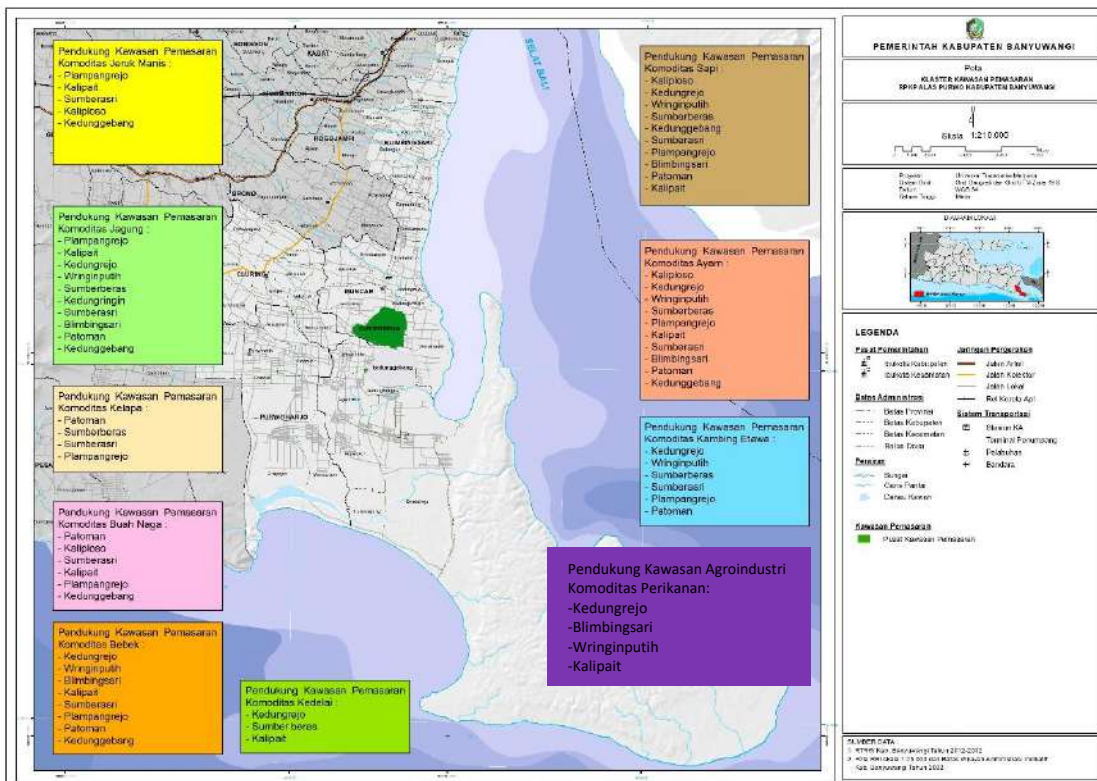
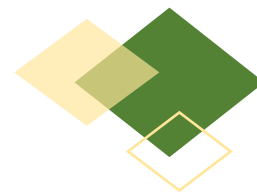
Kawasan Perdesaan selingkar Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi berada pada lima kecamatan yakni Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Muncar, Kecamatan Cluring, Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Tegaldlimo yang terdiri dari 12 desa yang meliputi Desa Blimbingsari, Desa Patoman, Desa Kedungringin, Desa Kedungrejo, Desa Sumberberas, Desa Wringinputih, Desa Kaliploso, Desa Plampangrejo, Desa Grajagan, Desa Sumpersari, Desa Kedunggebang, dan Desa Kalipait. Adanya delineasi kawasan perdesaan adalah untuk melakukan verifikasi deliniasi kawasan dan sekaligus menetapkan lokasi dan akses pusat kawasan dan *hinterland*(pendukung/penyokong) kawasan serta dari pusat kawasan ke kota terdekatnya). Delineasi dilakukan dengan validasi bersama aparat desa untuk mencari kebenaran data fisik (peta) dan kebenaran yuridis (Peraturan Daerah), kemudian membuat justifikasi dengan cara membuat penetapan dan pengesahannya dalam suatu berita acara penetapan dan penegasan batas desa yang dilampiri dengan daftar koordinat batas (Riadi dan Makmuriyanto, 2014).

Pengembangan pusat kawasan perdesaan diarahkan untuk menunjang fasilitas layanan skala kawasan seperti kawasan industri, kawasan wisata, industri pengolahan, bank, dan lain sebagainya. Desa-desa pendukung diarahkan untuk produksi komoditas primer atau bahan baku, dan sebagainya. Peta delineasi dan susunan fungsi kawasan perdesaan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW), Rencana Tata Ruang Desa, serta aspirasi masyarakat.

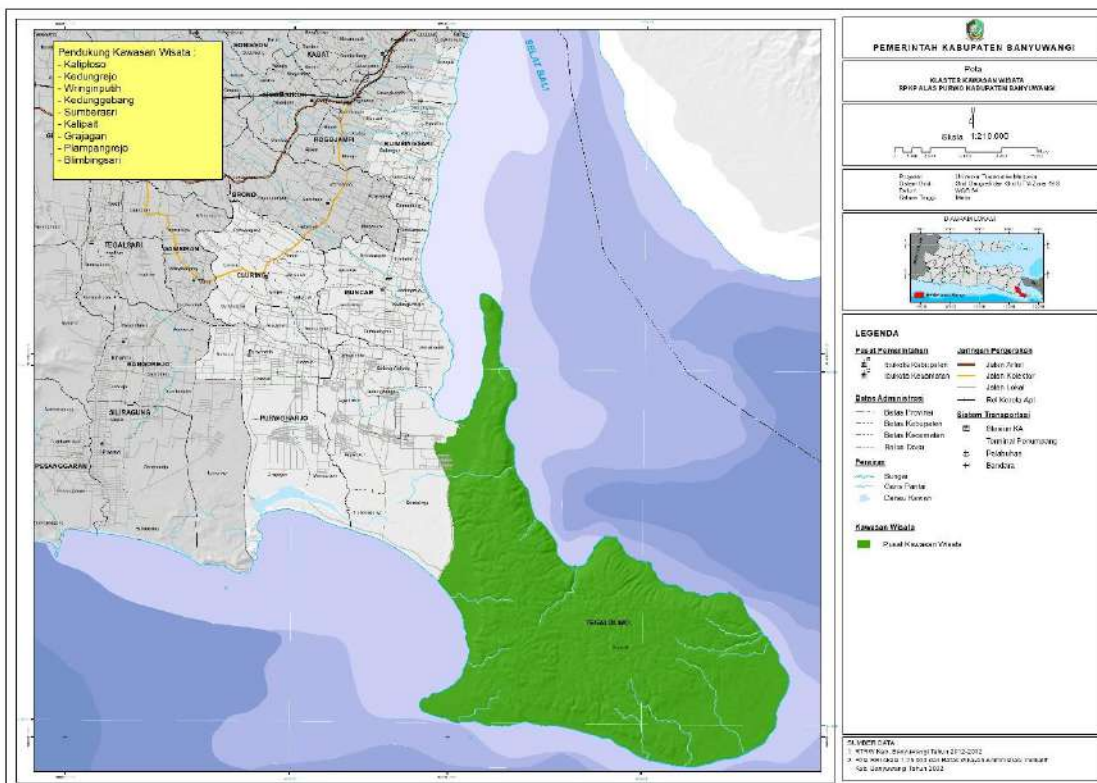
Berdasarkan karakteristik geografi, morfologi dan karakteristik potensi desa yang hampir sama terdapat pada 12 desa di Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Muncar, Kecamatan Cluring, Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Tegaldlimo yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan agrowisata, agroindustri dan wisata Kabupaten Banyuwangi sebagaimana peta delineasi berikut ini:



# Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Alas Purwo



Gambar 4.3 Peta Delineasi Pemasaran Kawasan Alas Purwo



Gambar 4.4 Peta Delineasi Wisata Kawasan Alas Purwo



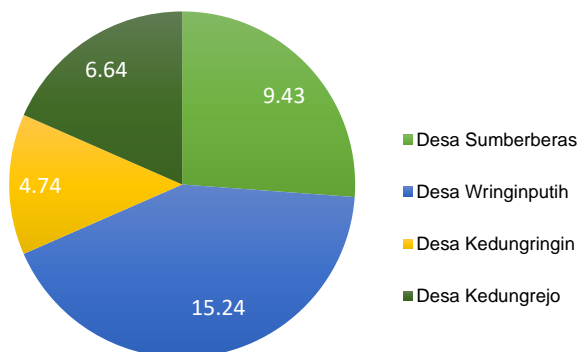
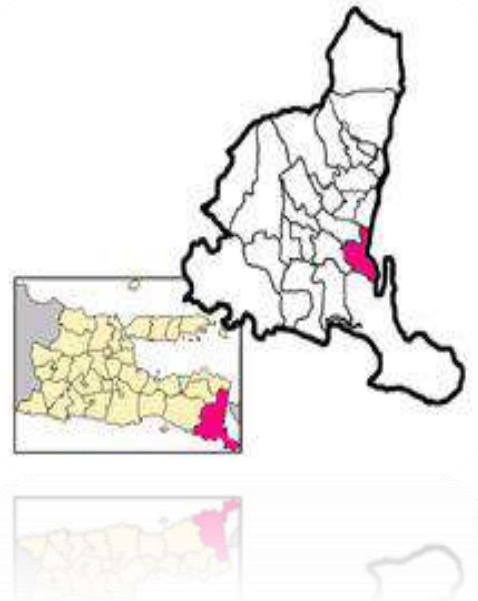
## 4.2 Fisik Lingkungan

Adanya analisa kondisi fisik dasar sangatlah diperlukan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui daya dukung lingkungan terhadap perencanaan ruang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan. Berikut ini kondisi fisik dasar kawasan perdesaan agrowisata Kabupaten Banyuwangi menurut masing – masing kecamatan :

### 4.2.1 Luas Wilayah dan Topografi

Kecamatan Muncar merupakan salah satu kecamatan di Banyuwangi yang memiliki luas wilayah 76,92 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 10 desa yang meliputi Desa Sumberberas, Desa Wringinputih, Desa Kedungringin, Desa Tambakrejo, Desa Tapanrejo, Desa Blambangan, Desa Kedungrejo, Desa Tembokrejo, Desa Sumbersewu, dan Desa Kumendung. Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Muncar berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana berikut:

- Sebelah Selatan: Kecamatan Tegaldlimo
- Sebelah Utara : Kecamatan Rogojampi
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Barat : Kecamatan Srono dan Cluring

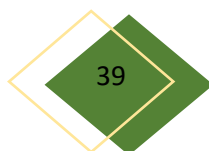


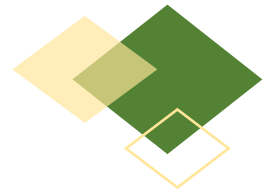
**Gambar 4.5 Luas Wilayah Kecamatan Muncar Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Di sisi lain, adanya penetapan kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi hanya 4 desa yang berada di Kecamatan Muncar yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang meliputi Desa Kedungringin, Kedungrejo, Sumberberas dan Wringinputih. Berikut ini gambaran luas wilayah empat desa tersebut:

Berdasarkan data luas wilayah Kecamatan Muncar menurut luas desa diketahui bahwa total luas wilayah Kecamatan Muncar sebesar 70,69 km<sup>2</sup>. Adapun desa di Kecamatan Muncar yang

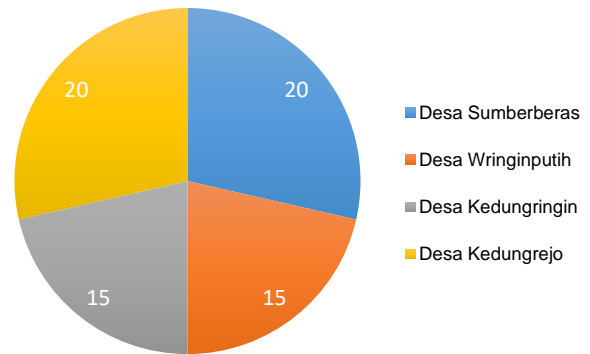




masuk dalam penetapan kawasan perdesaan meliputi Desa Sumberberas, Wringinputih, Kedungringin dan Kedungrejo. Luas desa terbesar adalah desa Wringinputih yakni seluas 15,24 km<sup>2</sup> dan luas wilayah terkecil yakni desa Kedungringin seluas 4,74 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan data ketinggian wilayah Kecamatan Muncar menurut desa diketahui bahwa ketinggian Kecamatan Muncar berada pada 0-100 mdpl, dimana rata-rata ketinggian masing – masing desa antara 15-50 mdpl. Desa dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Desa Sumberberas dan Desa Kedungrejo yakni 20 mdpl. Sedangkan, desa dengan ketinggian paling rendah adalah Desa Wringinputih dan Desa Kedungringin, yakni sebesar 15 mdpl.

#### Ketinggian Wilayah Kecamatan Muncar



**Gambar 4.6 Ketinggian Wilayah Kecamatan Muncar Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi



Kecamatan Blimbingsari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Blimbingsari terdiri dari wilayah pertanian, perkampungan dan pesisir pantai. Di kecamatan ini terdapat Bandar Udara Internasional Banyuwangi. Wilayah pesisirnya terbentang dari Sukojadi, Badean, Blimbingsari, Patoman, Watukebo hingga Bomo. Luas wilayah Kecamatan Blimbingsari sebesar 67,13 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 10 desa yakni desa Badean, desa Blimbingsari, desa Bomo, desa Gintangan, desa

Kaligung, desa Kaotan, desa Karangrejo, desa Patoman, desa Sukojadi, dan desa Watukebo. Berdasarkan kondisi geografis, batas wilayah Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut:

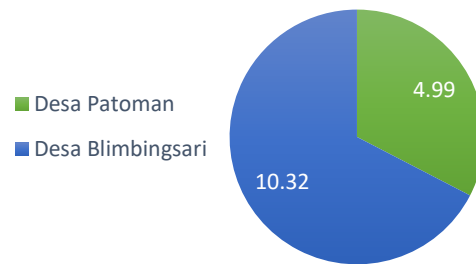
- Sebelah Selatan: Kecamatan Muncar
- Sebelah Utara : Kecamatan Kabat
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Barat : Kecamatan Rogojampi



Di sisi lain, adanya penetapan kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi hanya 2 desa yang berada di Kecamatan Muncar yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang meliputi Desa Blimbingsari dan Patoman. Berikut ini gambaran luas wilayah dua desa tersebut:

Berdasarkan data disamping dapat diketahui bahwa total luas wilayah Kecamatan Blimbingsari sebesar 67,13 km<sup>2</sup>. Adapun desa di Kecamatan Blimbingsari yang masuk dalam penetapan kawasan perdesaan meliputi Desa Patoman dan Desa Blimbingsari. Luas wilayah desa terbesar adalah Desa Blimbingsari yakni seluas 10,32 km<sup>2</sup> dan luas wilayah terkecil yakni Desa Patoman seluas 4,99 km<sup>2</sup>.

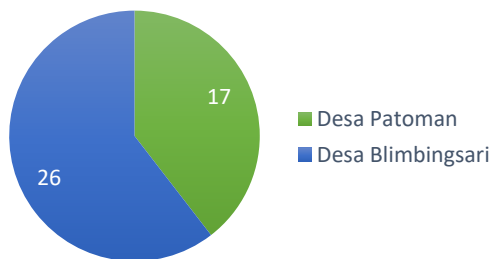
**Luas Wilayah Kecamatan Blimbingsari (Km2)**



**Gambar 4.7 Luas Wilayah Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten

**Ketinggian Wilayah Kecamatan Blimbingsari**

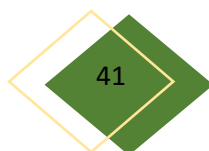
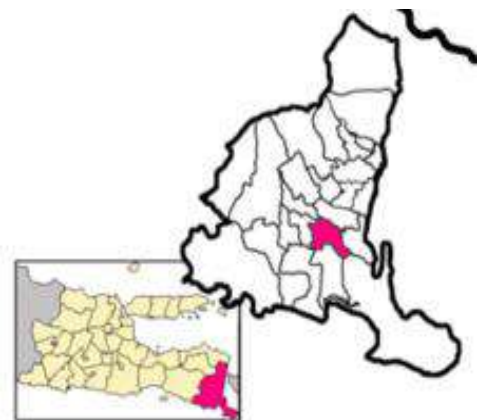


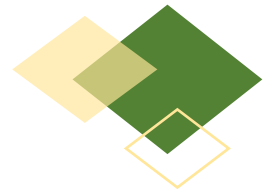
**Gambar 4.8 Ketinggian Wilayah Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten

Dari data disamping menjelaskan bahwa ketinggian wilayah Kecamatan Blimbingsari berada antara 0-500 mdpl, dimana rata-rata ketinggian masing-masing desa antara 10-100 mdpl. Desa dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah desa Blimbingsari yakni sebesar 26 mdpl. Sedangkan, desa dengan ketinggian wilayah paling rendah adalah Desa Patoman yakni sebesar 17 mdpl.

Kecamatan Cluring merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Cluring memiliki luas wilayah 97,44 Km<sup>2</sup>. Wilayah kecamatan ini berada di rentang ketinggian 71-115 mdpl dengan titik terendah di Desa Plampangrejo sedangkan titik tertinggi di Desa Tamanagung. Kecamatan Cluring di lewati beberapa sungai seperti Sungai Simbar, Sungai Sumbermangkong dan Sungai Tapan. Wilayah kecamatan ini terbagi kedalam 9 desa yakni Desa Cluring, Desa Benculuk, Desa Plampangrejo, Desa Kaliploso, Desa Sembulung,



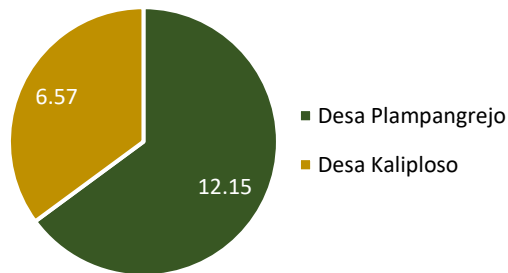


Desa Sraten, Desa Sarimulyo, Desa Tamanagung dan Desa Tampo. Berdasarkan kondisi geografis, batas wilayah Kecamatan Cluring sebagai berikut:

- Sebelah Selatan: Kecamatan Purwoharjo
- Sebelah Utara : Kecamatan Srono
- Sebelah Timur : Kecamatan Muncar
- Sebelah Barat : Kecamatan Gambiran

Di sisi lain, adanya penetapan kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi hanya 2 desa yang berada di Kecamatan Cluring yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang meliputi Desa Kaliploso dan Plampangrejo. Berikut ini gambaran luas wilayah dua desa tersebut:

**Luas Wilayah Kecamatan Cluring  
(Km<sup>2</sup>)**



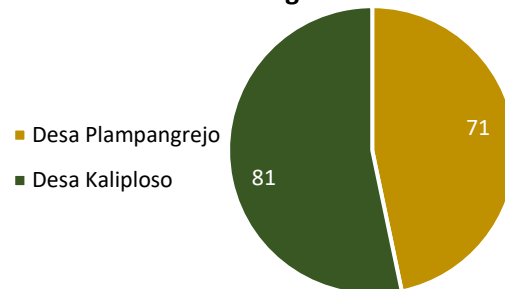
**Gambar 4.9 Luas Wilayah Kecamatan Cluring Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten

Dari data disamping menjelaskan bahwa ketinggian wilayah Kecamatan Cluring berada antara 0-500 mdpl, dimana rata-rata ketinggian masing-masing desa antara 0-150 mdpl. Desa dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah desa Kaliploso yakni sebesar 81 mdpl. Sedangkan, desa dengan ketinggian wilayah paling rendah adalah Desa Plampangrejo yakni sebesar 71 mdpl.

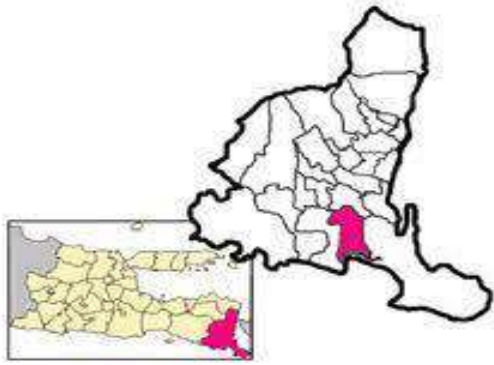
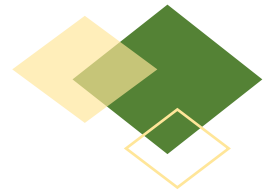
Berdasarkan data disamping dapat diketahui bahwa total luas wilayah Kecamatan Cluring sebesar 97,44 km<sup>2</sup>. Adapun desa di Kecamatan Cluring yang masuk dalam penetapan kawasan perdesaan meliputi Desa Plampangrejo dan Desa Kaliploso. Luas wilayah desa terbesar adalah Desa Plampangrejo yakni seluas 12,15 km<sup>2</sup> dan luas wilayah terkecil yakni Desa Kaliploso seluas 6,57 km<sup>2</sup>.

**Ketinggian Wilayah Kecamatan Cluring**



**Gambar 4.10 Ketinggian Wilayah Kecamatan Cluring Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten

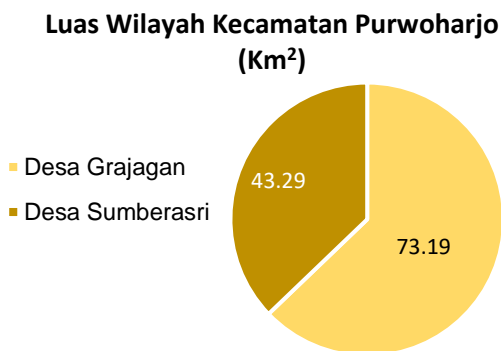


Kecamatan Purwoharjo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Purwoharjo memiliki luas wilayah 200,30 Km<sup>2</sup> yang dibagi ke 8 desa yakni Desa Bulurejo, Desa Glagah Agung, Desa Grajagan, Desa Karetan, Desa Kradenan, Desa Purwoharjo, Desa Sidorejo dan Desa Sumberasri. Wilayah kecamatan ini dilewati oleh beberapa Sungai Setail sepanjang 6,3 Km.

Berdasarkan kondisi geografis, batas wilayah Kecamatan Purwoharjo sebagai berikut:

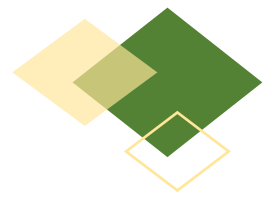
- Sebelah Selatan: Samudra Hindia
- Sebelah Utara : Kecamatan Cluring
- Sebelah Timur : Kecamatan Tegaldlimo
- Sebelah Barat : Kecamatan Bangorejo

Di sisi lain, adanya penetapan kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi hanya 2 desa yang berada di Kecamatan Purwoharjo yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang meliputi Desa Grajagan dan Desa Sumberasri. Berikut ini gambaran luas wilayah dua desa tersebut:



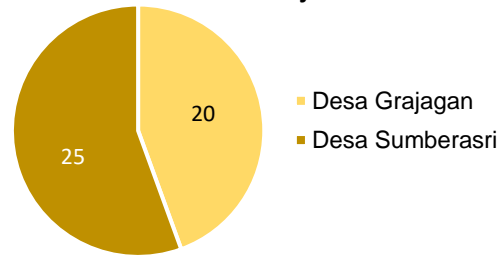
**Gambar 4.11 Luas Wilayah Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data disamping dapat diketahui bahwa total luas wilayah Kecamatan Purwoharjo sebesar 200,30 km<sup>2</sup>. Adapun desa di Kecamatan Purwoharjo yang masuk dalam penetapan kawasan perdesaan meliputi Desa Grajagan dan Desa Sumberasri. Luas wilayah desa terbesar adalah Desa Grajagan yakni seluas 73,19 km<sup>2</sup> dan luas wilayah terkecil yakni Desa Sumberasri seluas 43,29 km<sup>2</sup>.



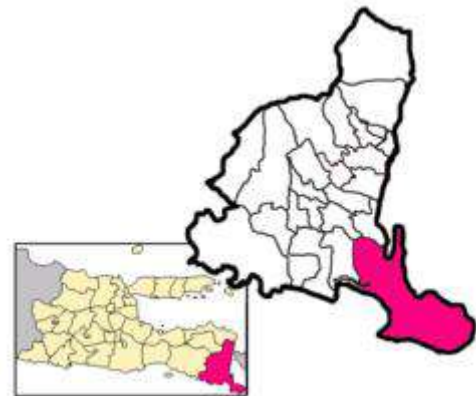
Dari data disamping menjelaskan bahwa ketinggian wilayah Kecamatan Purwoharjo berada di ketinggian antara 0-500 mdpl, dimana rata-rata ketinggian masing-masing desa antara 10-100 mdpl. Desa dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah desa Sumberasri yakni sebesar 25 mdpl. Sedangkan, desa dengan ketinggian wilayah paling rendah adalah Desa Grajagan yakni sebesar 20 mdpl.

**Ketinggian Wilayah Kecamatan Purwoharjo**



**Gambar 4.12 Ketinggian Wilayah Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa**  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

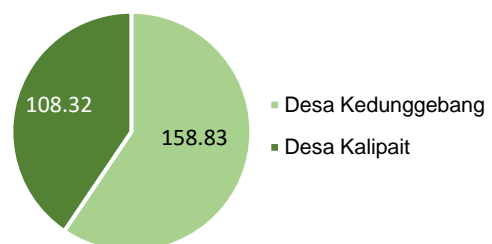
Kecamatan Tegaldlimo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah sebesar 1.341,12 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 9 desa yakni Desa Kalipait, Desa Kedungsari, Desa Kedunggebang, Desa Kedungwungu, Desa Kendalrejo, Desa Purwoagung, Desa Purwoasri, Desa Tegaldlimo dan Desa Wringinpitu. Wilayah kecamatan ini dilewati beberapa sungai seperti Kali Pahit (Kalipait) dan Sungai Bangeran. Berdasarkan kondisi geografis, batas wilayah Kecamatan Tegaldlimo sebagai berikut:



- Sebelah Selatan: Samudra Hindia
- Sebelah Utara : Kecamatan Muncar
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Barat : Kecamatan Purwoharjo

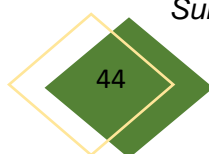
Di sisi lain, adanya penetapan kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi hanya 2 desa yang berada di Kecamatan Tegaldlimo yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang meliputi Desa Kedunggebang dan Desa Kalipait. Berikut ini gambaran luas wilayah dua desa tersebut:

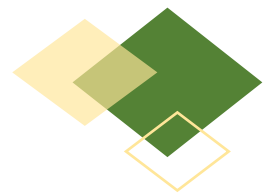
**Luas Wilayah Kecamatan Tegaldlimo (Km<sup>2</sup>)**



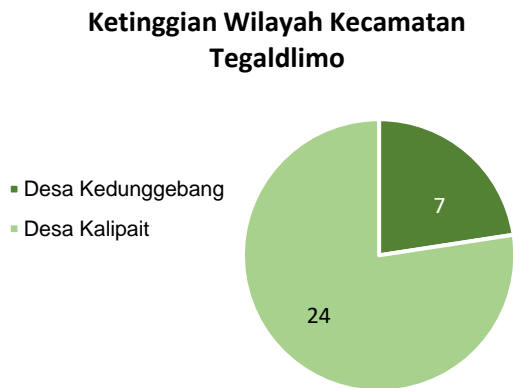
**Gambar 4.13 Luas Wilayah Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa**  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data disamping dapat diketahui bahwa total luas wilayah Kecamatan Tegaldlimo sebesar 1.341,12 km<sup>2</sup>. Adapun desa di Kecamatan Tegaldlimo yang masuk dalam penetapan kawasan perdesaan meliputi Desa Kedunggebang





dan Desa Kalipait. Luas wilayah desa terbesar adalah Desa Kedunggebang yakni seluas 158,83 km<sup>2</sup> dan luas wilayah terkecil yakni Desa Kalipait seluas 108,32 km<sup>2</sup>



**Gambar 4.14 Ketinggian Wilayah Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa**  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Dari data disamping menjelaskan bahwa ketinggian wilayah Kecamatan Tegaldlimo berada di ketinggian antara 0-500 mdpl, dimana rata-rata ketinggian masing-masing desa antara 0-50 mdpl. Desa dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah desa Kalipait yakni sebesar 24 mdpl. Sedangkan, desa dengan ketinggian wilayah paling rendah adalah Desa Kedunggebang yakni sebesar 7 mdpl.

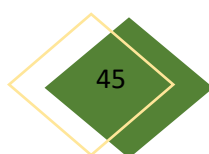
#### 4.2.2 Jenis Tanah

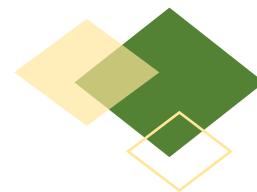
Kabupaten Banyuwangi sebagian besar merupakan hasil Gunung Api Kwarter Muda sebesar 30% dan Aluvium sebesar 23% yang berupa tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan sehingga cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Struktur geologi lainnya adalah miosen falses semen sebesar 16%, miosen falses batu gamping sebesar 13%, hasil gunung api kwarter tua dengan luas sebesar 10% dan struktur geologi andesit merupakan struktur geologi terendah di Kabupaten Banyuwangi dengan luas hanya sebesar 8%.

**Tabel 4.1 Jenis Tanah Di Kabupaten Banyuwangi**

No	Desa	Jenis Tanah
1	Blimbingsari	Lempung
2	Patoman	Lempung Berpasir
3	Kedungringin	Aluvial
4	Kedungrejo	Aluvial
5	Sumberberas	Aluvial
6	Wringinputih	Aluvial
7	Kaliploso	Aluvial
8	Plampangrejo	Tanah Liat
9	Grajagan	Debuan
10	Sumberasri	Hitam
11	Kedunggebang	Lempungan
12	Kalipait	Lempungan Hitam

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi





Adapun penyebaran jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan desa diatas sebagaimana berikut :

- a. Tanah Lempung terdapat pada wilayah Desa Blimbingsari dan Desa Kedunggebang
- b. Tanah Lempung Berpasir pada wilayah Desa Patoman
- c. Tanah Lempungan Hitam pada wilayah Desa Kalipait
- d. Tanah Aluvial terdapat pada wilayah Desa Kedungringin, Desa Kedungrejo, Desa Sumberberas, Desa Wringinputih, dan Desa Kaliploso
- e. Tanah Liat terdapat pada wilayah Desa Plampangrejo
- f. Tanah Debuian terdapat pada wilayah Desa Grajagan

#### 4.2.3 Kebencanaan

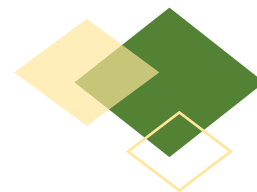
Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Kawasan rawan bencana wilayah Kabupaten Banyuwangi dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, angin puting beliung, gempa, dan tsunami. Untukantisipasi dampak bencana perlu upaya-upaya antara lain deteksi dini bencana, melestarikan kawasan lindung dan penanggulangan bencana.

**Tabel 4.2 Potensi Bencana Di Kabupaten Banyuwangi**

No	Desa	Potensi Bencana
1	Blimbingsari	-
2	Patoman	Gelombang Pasang Laut
3	Kedungringin	Banjir
4	Kedungrejo	Banjir dan Tsunami
5	Sumberberas	Angin
6	Wringinputih	Banjir
7	Kaliploso	Angin Puting Beliung
8	Plampangrejo	Gempa Bumi & Puting Bliung
9	Grajagan	Tsunami
10	Sumberasri	Tsunami
11	Kedunggebang	Banjir
12	Kalipait	Gempa, Tsunami

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Desa Patoman merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Untuk kawasan yang memiliki potensi bencana banjir terdapat pada Desa Kedungringin dan Desa Wringinputih. Kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Potensi rawan bencana tsunami terdapat pada Desa Kedungrejo, Desa



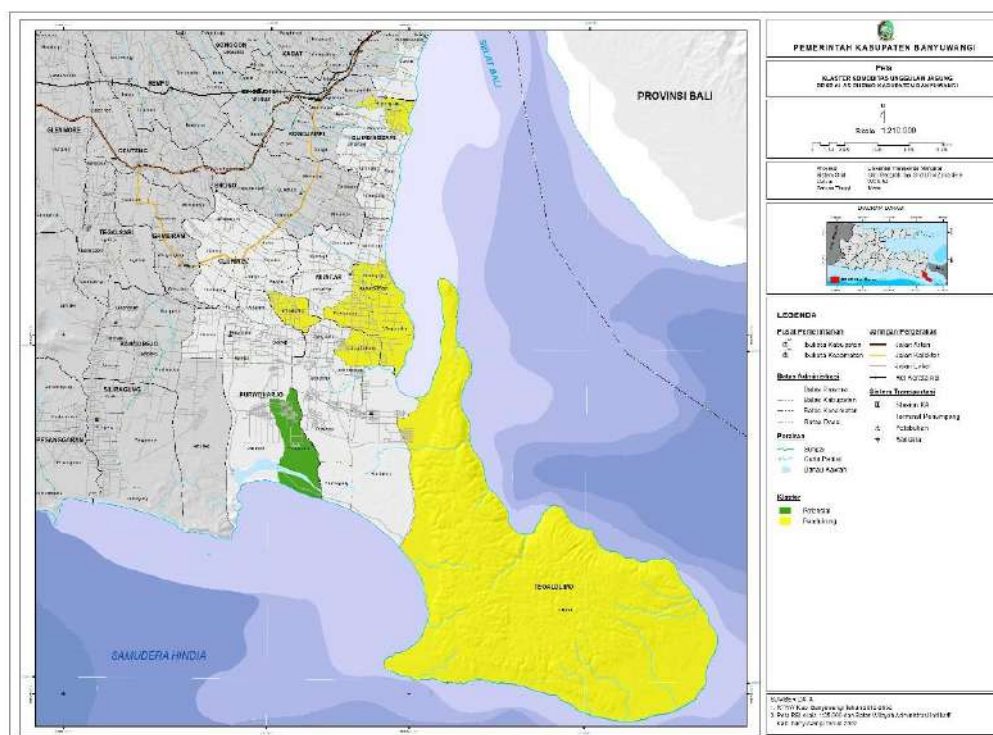
Grajan, Desa Summersari, dan Desa Kalipati. Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik.

Potensi rawan bencana angin puting beliung berada di Desa Kaliploso dan Desa Plampangrejo sedangkan gempa bumi terdapat pada Desa Plampangrejo dan Desa Kalipait. Kawasan gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau reruntuhan batuan.

### 4.3 Produk Unggulan Kawasan Perdesaan

#### 4.3.1 Kluster Tanaman Pangan Jagung

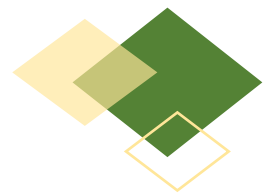
Kluster tanaman pangan berupa jagung terpusat di kawasan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo yang mampu memproduksi sebesar 21.924 ton.



**Gambar 4.15 Kluster Tanaman Pangan Jagung**  
*Sumber: Data Diolah Penulis*

Sementara wilayah desa sebagai pendukungnya antara lain ada di:

- Desa Plampangrejo Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi jagung sebesar 162 ton.
- Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi jagung sebesar 40 ton.
- Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi jagung sebesar 6 ton.



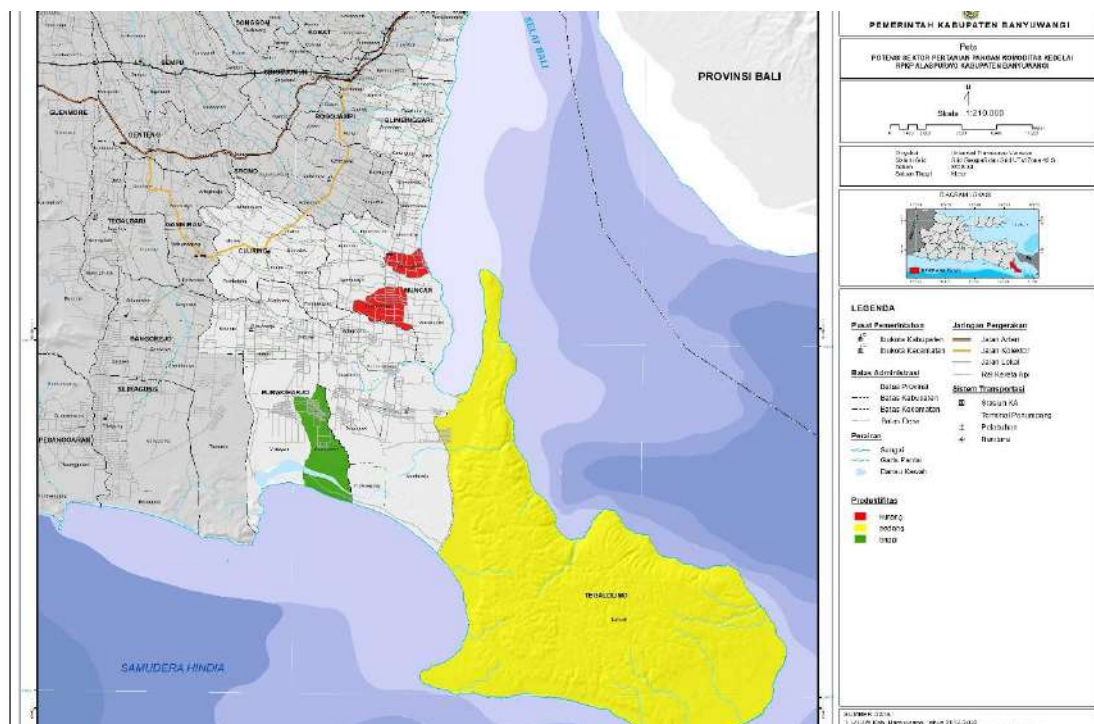
- d) Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari dengan produksi jagung sebesar 25 ton.
- e) Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari dengan produksi jagung sebesar 20 ton.
- f) Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan produksi jagung sebesar 6 ton.
- g) Desa Wringinputih Kecamatan Muncar dengan produksi jagung sebesar 5 ton.
- h) Desa Sumberberas Kecamatan Muncar dengan produksi jagung sebesar 6,5 ton.
- i) Desa Kedungringin Kecamatan Muncar dengan produksi jagung sebesar 6,5 ton.

#### 4.3.2 Kluster Tanaman Pangan Kedelai

Kluster tanaman pangan berupa kedelai terpusat di kawasan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo yang mampu memproduksi sebesar 6.006 ton.

Sementara wilayah desa sebagai pendukungnya antara lain ada di:

- a) Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi kedelai sebesar 43,4 ton.
- b) Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan produksi kedelai sebesar 6 ton.
- c) Desa Sumberberas Kecamatan Muncar dengan produksi kedelai sebesar 1,6 ton.

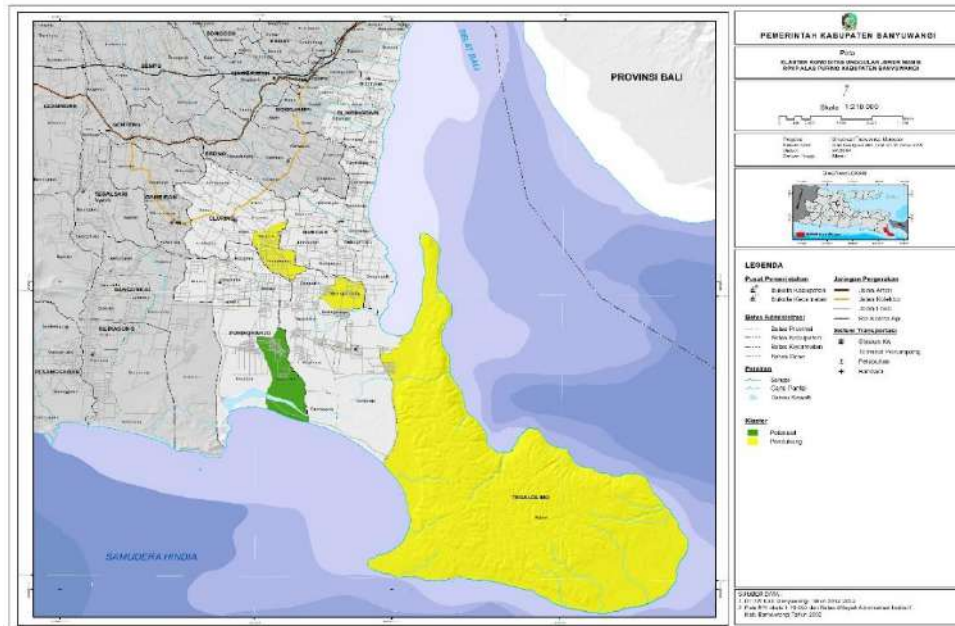


**Gambar 4.16 Kluster Tanaman Pangan Kedelai**  
Sumber: Data Diolah Penulis



### 4.3.3 Kluster Holtikultura Jeruk Manis

Kluster jeruk manis juga berpusat di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo dengan produksi sebesar 7.764 ton.



**Gambar 4.17 Kluster Holtikultura Jeruk Manis**  
*Sumber: Data Diolah Penulis*

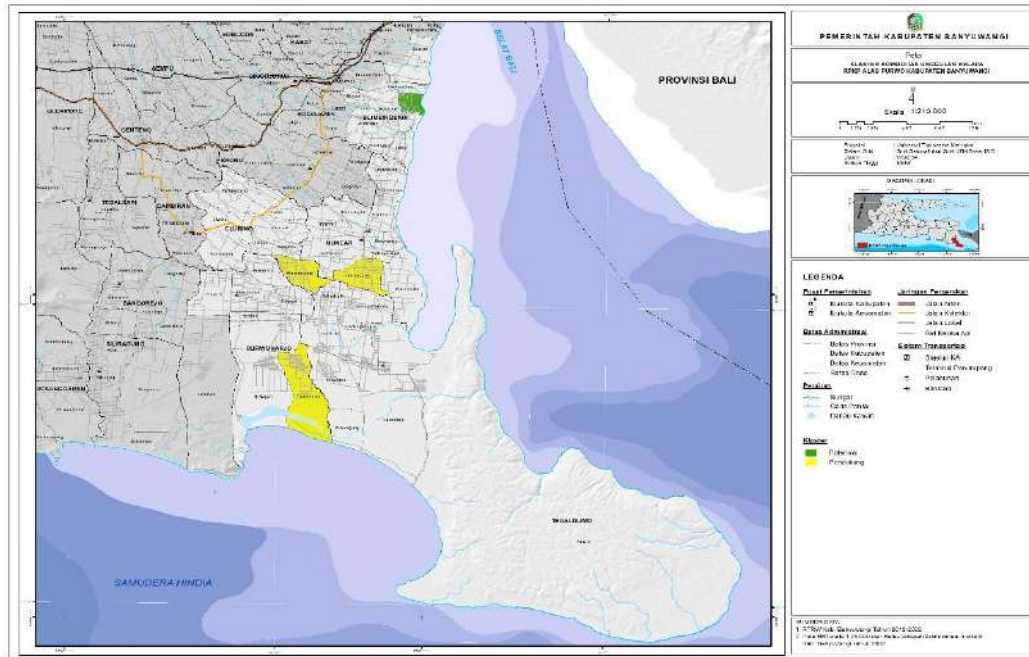
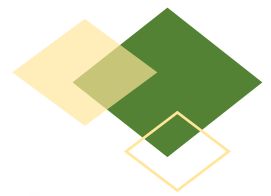
Hal tersebut menunjukkan bahwa sentral pembangunan kluster jeruk manis akan berada di Kecamatan Purwoharjo yaitu di Desa Sumberasri, dengan kawasan pendukung antara lain di:

- Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring dengan produksi jeruk manis sebesar 1960 ton.
- Desa Kaliploso Kecamatan Cluring dengan produksi jeruk manis sebesar 15 ton.
- Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi jeruk manis sebesar 40 ton.
- Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi jeruk manis sebesar 115,5 ton.

### 4.3.4 Kluster Holtikultura Buah Naga

Selain kluster holtikultura jeruk manis, dalam kawasan perdesaan Alas Purwo juga terdapat kluster unggulan berupa buah naga yang berpusat di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo dengan produksi sebesar 3.437,5 ton.





**Gambar 4.19 Kluster Perkebunan Kelapa**  
*Sumber: Data Diolah Penulis*

Hal tersebut menunjukkan bahwa sentral pembangunan kluster kelapa akan berada di Kecamatan Blimbingsari yaitu di Desa Patoman, dengan kawasan pendukung antara lain di:

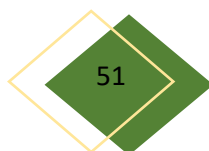
- Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo dengan produksi kelapa sebesar 24 ton
- Desa Sumberberas Kecamatan Muncar dengan produksi kelapa sebesar 3 ton.
- Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring dengan produksi kelapa sebesar 3 ton.

#### 4.3.6 Klaster Peternakan Sapi

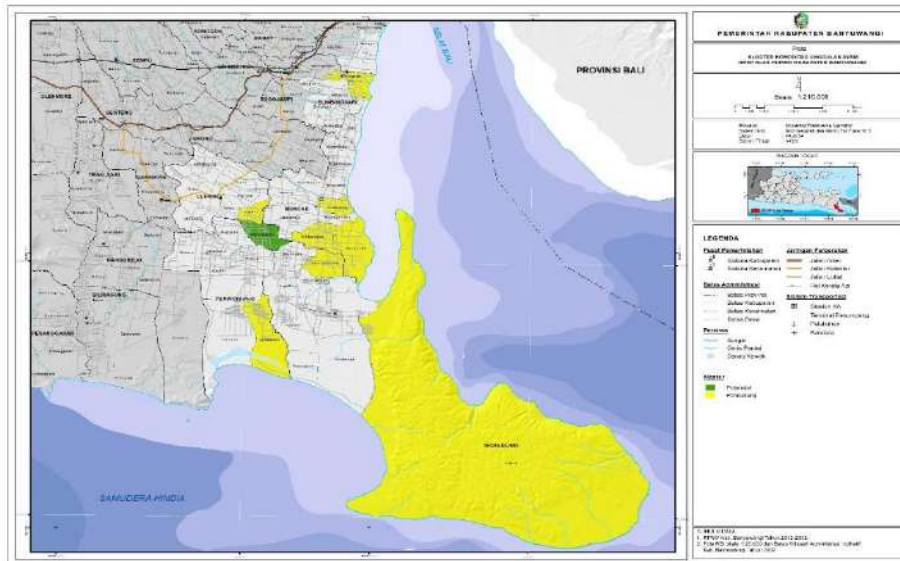
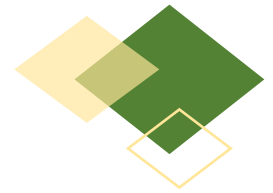
Kluster peternakan berupa sapi berpusat di Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi sebesar 1.500 ekor.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sentral pembangunan kluster sapi akan berada di Kecamatan Tegaldlimo yaitu di Desa Kalipait, dengan kawasan pendukung antara lain di:

- Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari dengan produksi sapi sebesar 300 ekor
- Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari dengan produksi sapi sebesar 27 ekor.
- Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo dengan produksi sapi sebesar 267 ekor
- Desa Kaliploso Kecamatan Cluring dengan produksi sapi sebesar 230 ekor.
- Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring dengan produksi sapi sebesar 45 ekor.
- Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi sapi sebesar 103 ekor.
- Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan produksi sapi sebesar 68 ekor.
- Desa Wringinputih Kecamatan Muncar dengan produksi sapi sebesar 21 ekor.
- Desa Sumberberas Kecamatan Muncar dengan produksi sapi sebesar 65 ekor.



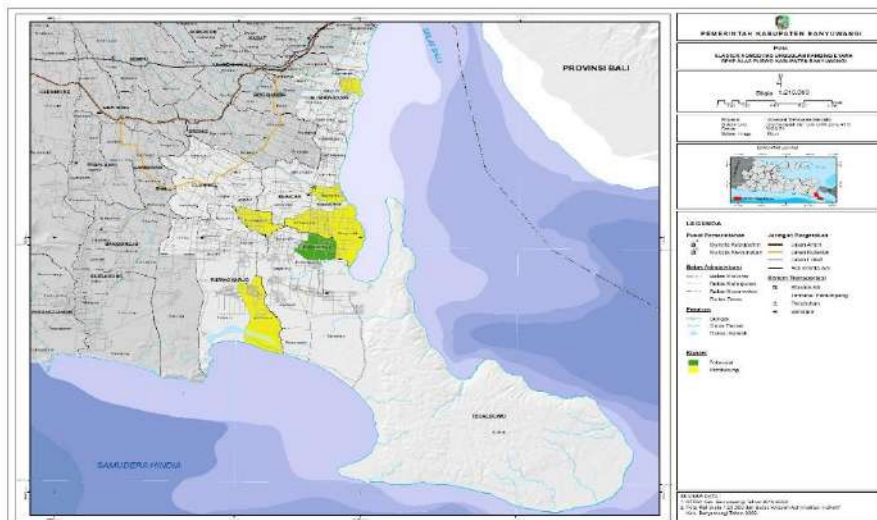




**Gambar 4.21 Kluster Peternakan Ayam**  
Sumber: Data Diolah Penulis

#### 4.3.8 Kluster Peternakan Kambing Etawa

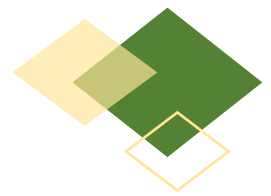
Disamping kluster peternakan sapi dan ayam di kawasan perdesaan Alas Purwo, terdapat juga peternakan kambing etawa berpusat di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldimo dengan produksi sebesar 401 ekor.



**Gambar 4.22 Kluster Peternakan Kambing Etawa**  
Sumber: Data Diolah Penulis

Hal tersebut menunjukkan bahwa sentral pembangunan kluster peternakan kambing etawa berada di Kecamatan Tegaldimo yaitu di Desa Kedunggebang, dengan kawasan pendukung antara lain di:

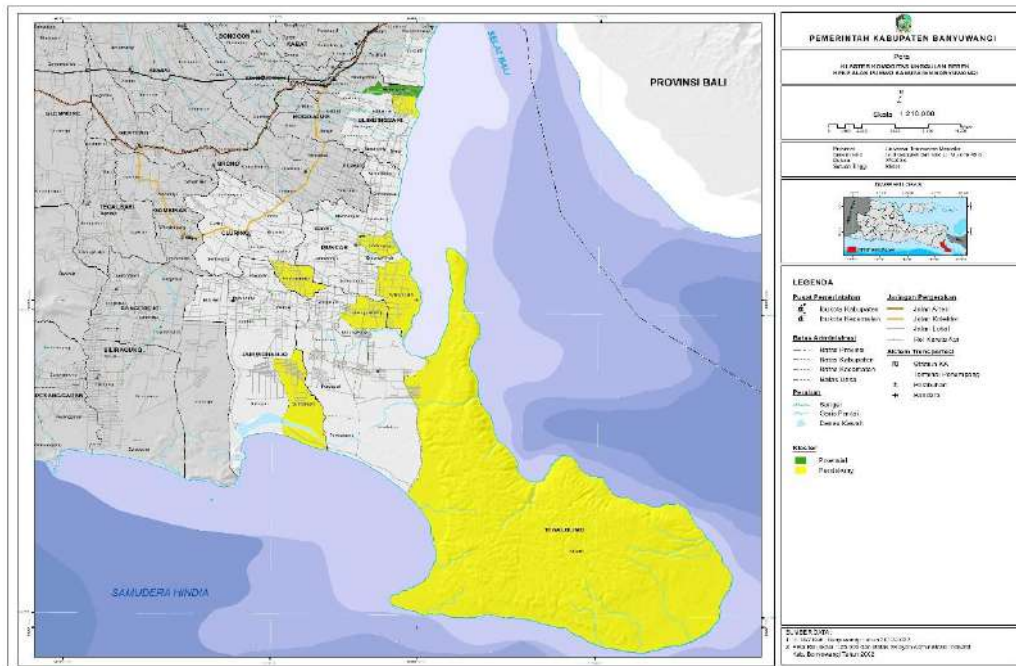
- a) Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan produksi kambing etawa sebesar 352 ekor
- b) Desa Wringinputih Kecamatan Muncar dengan produksi kambing etawa sebesar 75



- c) Desa Sumberberas Kecamatan Muncar dengan produksi kambing etawa sebesar 267 ekor
- d) Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo dengan produksi kambing etawa sebesar 267 ekor
- e) Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring dengan produksi kambing etawa sebesar 25 ekor
- f) Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari dengan produksi kambing etawa sebesar 100 ekor

#### 4.3.9 Kluster Peternakan Bebek

Untuk kluster bebek di kawasan perdesaan Alas Purwo berpusat di Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari dengan produksi sebesar 876 ekor.

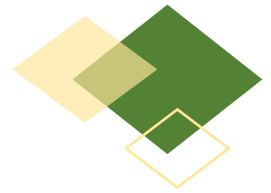


**Gambar 4.23 Kluster Peternakan Bebek**  
*Sumber: Data Diolah Penulis*

Hal tersebut menunjukkan bahwa sentral pembangunan kluster bebek berada di Kecamatan Blimbingsari yaitu di Desa Blimbingsari, dengan kawasan pendukung antara lain di:

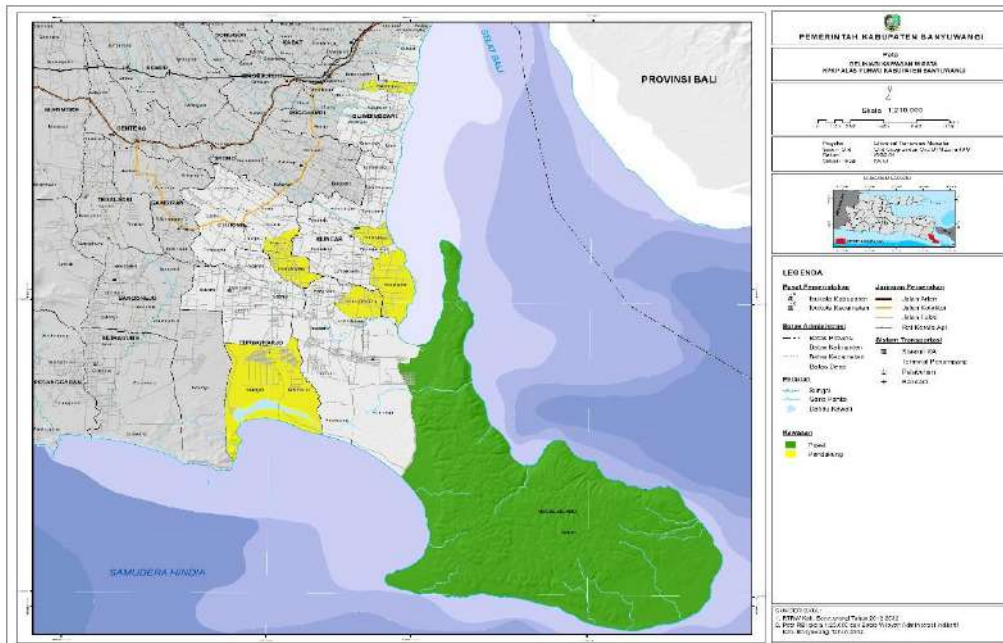
- a) Desa Wringinputih Kecamatan Muncar dengan produksi bebek sebesar 752 ekor
- b) Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan produksi bebek sebesar 300 ekor
- c) Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring dengan produksi bebek sebesar 350 ekor
- d) Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi bebek sebesar 301 ekor
- e) Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo dengan produksi bebek sebesar 234 ekor
- f) Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari dengan produksi bebek sebesar 300 ekor
- g) Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo dengan produksi bebek sebesar 213 ekor





#### 4.3.11 Kluster Pariwisata

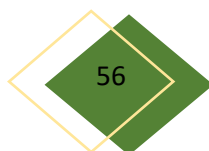
Untuk persebaran potensi unggulan dalam pengembangan kawasan perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi di bidang pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut:

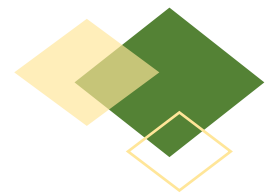


**Gambar 4.25 Kluster Wisata**  
Sumber: Data Diolah Penulis

Potensi pariwisata tersebar di Desa Kaliploso dengan potensi agrowisata kebun al-qur'an; Desa Kedungrejo dengan potensi pelabuhan ikan muncar; Desa Wringinputih dengan potensi ekowisata mangrove, pantai cemara, dan wisata killi-killi; Desa Kedunggebang dan Sumberasri dengan potensi ekowisata mangrove; Desa Kalipait dengan potensi cagar budaya situs kawitan, pura giri salaka, goa istana dan goa putri; Desa Grajagan dengan potensi pantai; Desa Plampangrejo dengan potensi bendungan DAM; serta Desa Blimbingsari dengan potensi pantai dan wisata kuliner.

Pariwisata menjadi salah satu industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah yang ada di Banyuwangi merupakan salah satu dampak positif bagi perekonomian Banyuwangi. Pariwisata Banyuwangi terus bergeliat diharapkan mampu memperkuat daerah sebagai sentra ekonomi baru di kawasan timur Pulau Jawa. Terus mengalirnya kunjungan ke Banyuwangi, baik untuk berwisata secara umum maupun *wisata MICE* (*meeting, incentive, conference, exhibition*), membawa dampak positif ke ekonomi daerah di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Guna menyiapkan hunian singgah (*hotel dan homestay*), rumah makan atau restaurant dan cafe bagi para turis yang





datang ke desa wisata maka disiapkan pula kawasan kluster homestay, hotel, cafe dan restaurant yang tersebar ke beberapa desa.

Untuk kawasan homestay terdapat di:

1. Desa Sumberasri
2. Desa Blimbingsari
3. Desa Grajagan
4. Desa Kalipait

Kawasan hotel terdapat di:

1. Desa Kalipait
2. Desa Grajagan
3. Desa Patoman

Kawasan cafe terdapat di:

1. Kedunggebang
2. Desa Plampangrejo
3. Desa Blimbingsari
4. Desa Kalipait

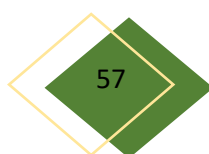
Sedangkan kawasan restaurant terdapat di:

1. Desa Kedungrejo
2. Desa Sumberberas
3. Desa Kalipait

#### 4.4 Kependudukan dan Sosial Budaya

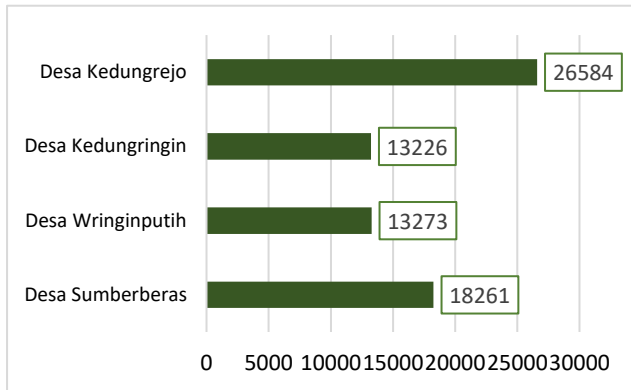
##### 4.4.1 Jumlah Penduduk

Penduduk sebagai salah satu komponen dalam suatu sistem wilayah yang memiliki peranan penting sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan perubahan pemanfaatan ruang melalui berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai pelaku perubahan pemanfaatan ruang, penduduk juga merupakan pihak yang akan memperoleh manfaat dari upaya-upaya penataan ruang. Dinamika kependudukan memiliki peranan penting sebagai objek sekaligus subjek dalam dinamika perkembangan wilayah.





### 1. Kecamatan Muncar

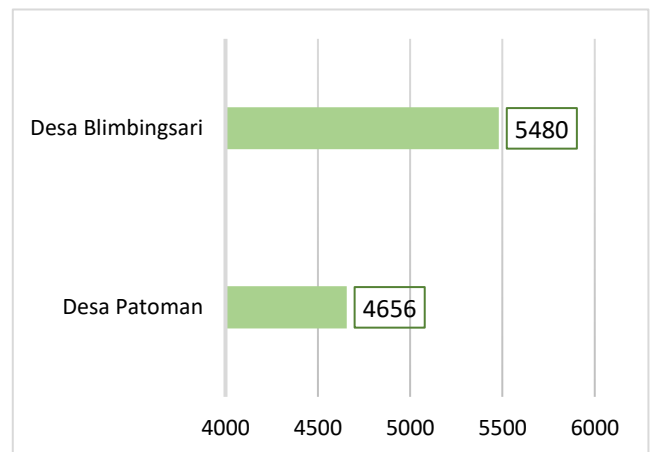


**Gambar 4.26 Jumlah Penduduk Kecamatan Muncar Menurut Desa**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan empat desa di Kecamatan Muncar yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, pada tahun 2020 Desa Kedungrejo memiliki jumlah penduduk paling tinggi yakni 26584 jiwa, desa tertinggi kedua yaitu Desa Sumberberas yakni sebesar 18261 jiwa dan desa dengan jumlah penduduk yang paling kecil adalah Desa Kedungringin yakni sebesar 13226 jiwa.

### 2. Kecamatan Blimbingsari

Berdasarkan dua desa di Kecamatan Blimbingsari yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, pada tahun 2020 Desa Blimbingsari memiliki jumlah penduduk paling tinggi yakni 5480 jiwa, dan desa dengan jumlah penduduk yang paling kecil adalah Desa Patoman yakni sebesar 4656 jiwa.

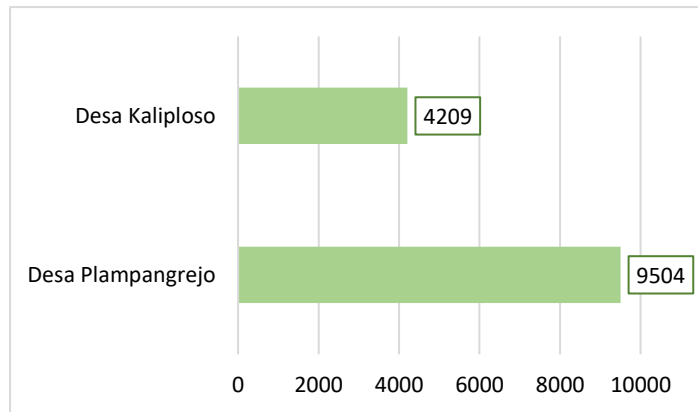


**Gambar 4.27 Jumlah Penduduk Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*



### 3. Kecamatan Cluring

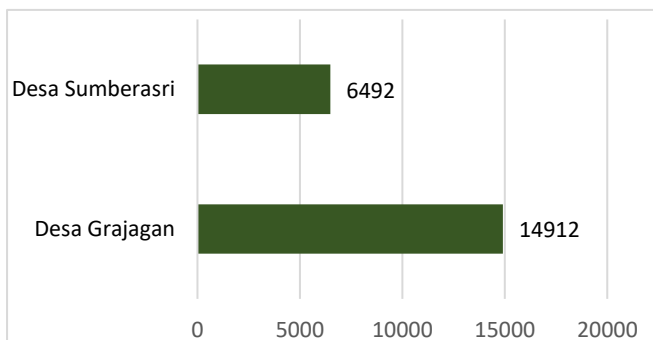
Berdasarkan dua desa di Kecamatan Cluring yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, pada tahun 2020 Desa Plampangrejo memiliki jumlah penduduk paling tinggi yakni 9504 jiwa dan desa dengan jumlah penduduk yang paling kecil adalah Desa Kaliploso yakni sebesar 4209 jiwa.



**Gambar 4.28 Jumlah Penduduk Kecamatan Cluring Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

### 4. Kecamatan Purwoharjo

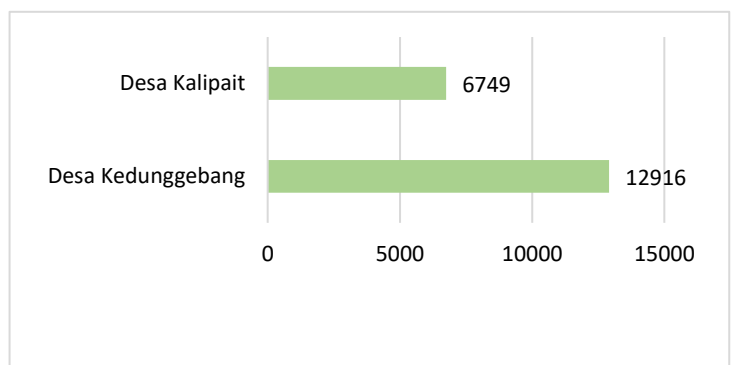


**Gambar 4.29 Jumlah Penduduk Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa**  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan dua desa di Kecamatan Purwoharjo yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, pada tahun 2020 Desa Grajagan memiliki jumlah penduduk paling tinggi yakni 14912 jiwa dan desa dengan jumlah penduduk yang paling kecil adalah Desa Sumberasri yakni sebesar 6492 jiwa.

### 5. Kecamatan Tegaldlimo

Berdasarkan dua desa di Kecamatan Tegaldlimo yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, pada tahun 2020 Desa Kedunggebang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yakni 12916 jiwa dan desa dengan jumlah penduduk yang paling kecil adalah Desa Kalipait yakni sebesar 6749 jiwa.



**Gambar 4.30 Jumlah Penduduk Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa**

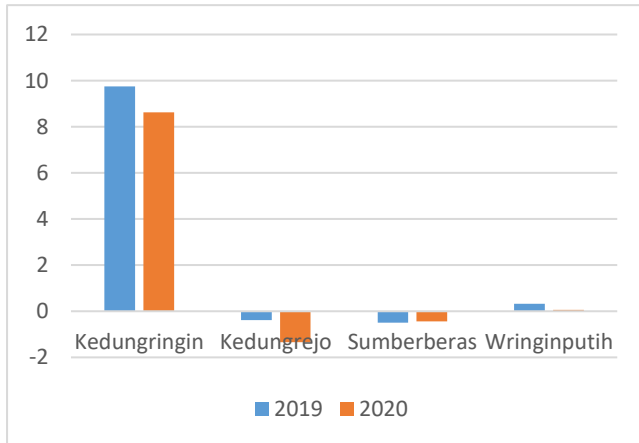
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi



#### 4.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah dimasa yang akan datang.

##### 1. Kecamatan Muncar



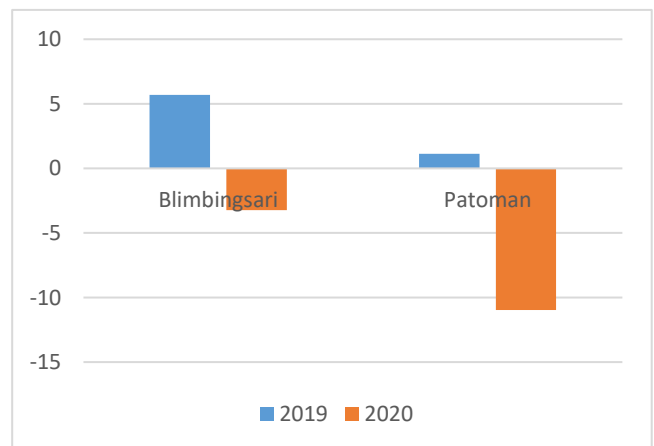
**Gambar 4.31 Laju Penduduk Kecamatan Muncar Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan empat desa di Kecamatan Muncar yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, laju penduduk tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pada Desa Kedungringin sebesar 9,75% dan 8,62%. Sedangkan yang terendah ada pada Desa Kedungrejo, yang mana laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar -0.39% dan -1.34% pada tahun 2020.

##### 2. Kecamatan Blimbingsari

Berdasarkan laju penduduk tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pada Desa Blimbingsari sebesar 5,69% dan -3,23%. Sedangkan yang terendah ada pada Desa Patoman, yang mana laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar 1,12% dan -10.96% pada tahun 2020.

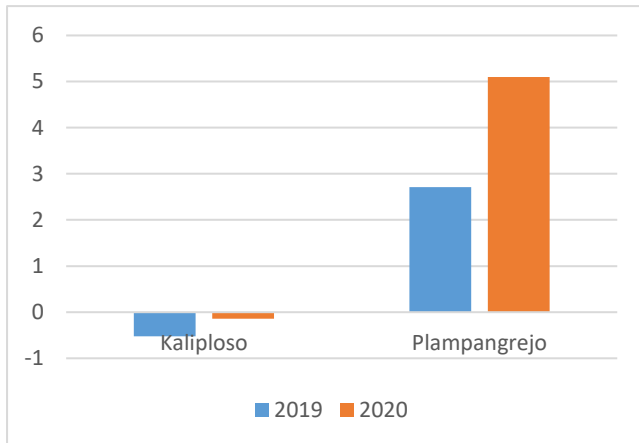


**Gambar 4.32 Laju Penduduk Kecamatan Blimbingsari Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi



### 3. Kecamatan Cluring



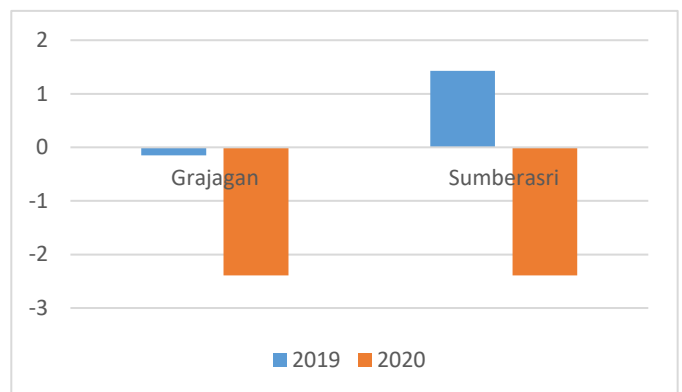
Berdasarkan laju penduduk tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pada Desa Plampangrejo sebesar 2.71% dan 5.10%. Sedangkan yang terendah ada pada Desa Kaliploso, yang mana laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar -0.52% dan -0.19% pada tahun 2020.

**Gambar 4.33 Laju Penduduk Kecamatan Cluring Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

### 4. Kecamatan Purwoharjo

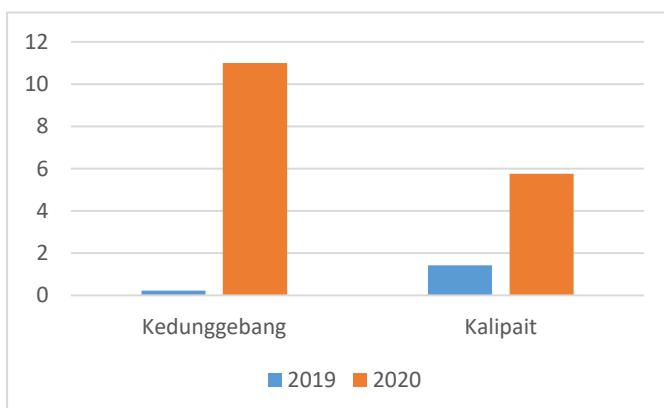
Berdasarkan laju penduduk tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pada Desa Sumberasri sebesar 1.43% dan -2.39%. Sedangkan yang terendah ada pada Desa Grajagan, yang mana laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar -0.15% dan -0.19% pada tahun 2020.



**Gambar 4.34 Laju Penduduk Kecamatan Purwoharjo Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

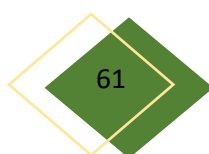
### 5. Kecamatan Tegaldlimo

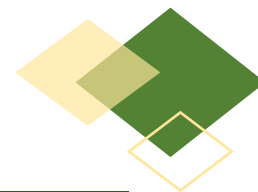


Berdasarkan laju penduduk tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pada Desa Kedunggebang sebesar 0.22% dan 11%. Sedangkan yang terendah ada pada Desa Kalipait, yang mana laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar 2.03% dan 5.75% pada tahun 2020.

**Gambar 4.35 Laju Penduduk Kecamatan Tegaldlimo Menurut Desa**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi





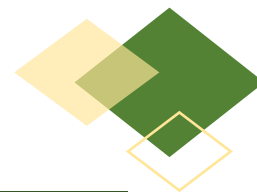
#### 4.4.3 Komposisi Penduduk

**Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Blimbingsari	2722	2758	5480
2	Patoman	2228	2428	4656
3	Kedungringin	6743	6483	13226
4	Kedungrejo	13489	13095	26584
5	Sumberberas	9205	9056	18261
6	Wringinputih	6678	6595	13273
7	Kaliploso	2183	2109	4209
8	Plampangrejo	4778	4726	9504
9	Grajagan	7421	7421	14912
10	Sumbersari	3263	3229	6492
11	Kedunggebang	5954	6962	12916
12	Kalipait	338	3369	6749
	<b>Jumlah</b>	<b>65002</b>	<b>68231</b>	<b>136262</b>

*Sumber: Hasil Survei*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kawasan Perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 adalah 136262 jiwa yang terbagi ke dalam 12 desa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 65002 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 68231 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Banyuwangi menurut desa kawasan perdesaan terdapat pada Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan jumlah penduduk sebesar 26584 jiwa, yang terbagi atas 13489 jiwa penduduk laki-laki dan 13095 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan, desa dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 4209 jiwa terdapat pada Desa Kaliploso Kecamatan Cluring yang terdiri dari 2183 jiwa penduduk laki-laki dan 2109 jiwa penduduk perempuan.



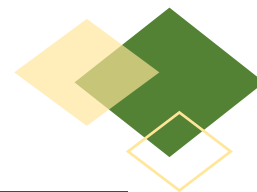
#### 4.4.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.4 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Desa	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	PT	Jumlah
1	Blimbingsari	-	-	-	-	-
2	Patoman	850	522	246	41	1,659
3	Kedungringin	4127	2318	1696	197	8,338
4	Kedungrejo	6584	1031	4896	1131	13,642
5	Sumberberas	751	3853	570	121	5,295
6	Wringinputih	2244	3009	3198	379	8,830
7	Kaliploso	315	632	1364	224	2,535
8	Plampangrejo	950	2851	4277	1426	9,504
9	Grajagan	2309	3570	3405	396	9,680
10	Sumbersari	867	781	2706	1191	5,545
11	Kedunggebang	-	-	-	-	-
12	Kalipait	968	1155	1636	201	3,960
	<b>Jumlah</b>	<b>19,965</b>	<b>19722</b>	<b>23994</b>	<b>5307</b>	<b>68,988</b>

*Sumber: Hasil Survei*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan riwayat pendidikan di Kawasan Perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 adalah 68988 jiwa yang terbagi ke dalam 12 desa dengan komposisi jumlah penduduk berdasarkan riwayat pendidikan SD/MI sebesar 19965 jiwa, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan SMP/MTs sebesar 19722 jiwa, SMA/MA sebesar 23994 jiwa, dan Perguruan Tinggi sebesar 5307 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Banyuwangi menurut desa kawasan perdesaan Alas Purwo berdasarkan riwayat pendidikan terdapat pada Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan jumlah penduduk sebesar 13642 jiwa, yang terbagi atas riwayat pendidikan SD/MI sebesar 6584 jiwa, SMP/MTs sebesar 1031 jiwa, SMA/MA sebesar 4896 jiwa dan perguruan tinggi sebesar 1131 jiwa. Sedangkan, desa dengan jumlah penduduk terendah berdasarkan riwayat pendidikan yaitu Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari sebesar 1659 jiwa, yang terbagi atas riwayat pendidikan SD/MI sebesar 850 jiwa, SMP/MTs sebesar 522 jiwa, SMA/MA sebesar 246 jiwa dan perguruan tinggi sebesar 41 jiwa.



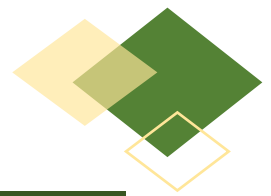
#### 4.4.5 Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

**Tabel 4.5 Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja**

No	Desa	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64
1	Blimbingsari	385	461	492	485	575	345	482	386	289	301
2	Patoman	603	543	531	451	313	246	193	194	911	83
3	Kedungringin	2848	434	687	823	398	467	262	983	657	738
4	Kedungrejo	2450	3148	2164	2066	1834	1758	1370	1378	1392	1154
5	Sumberberas	1727	2085	2885	1485	1056	1258	1854	1051	2863	149
6	Wringinputih	556	752	840	906	692	980	866	796	614	698
7	Kaliploso	283	289	229	307	351	240	366	316	319	242
8	Plampangrejo	686	770	701	612	610	610	610	549	610	578
9	Grajagan	1131	11	1128	1124	895	1563	1402	962	756	756
10	Sumbersari	431	420	472	488	481	491	495	502	373	333
11	Kedunggebang	987	981	1093	1171	1240	1109	930	716	527	481
12	Kalipait	469	505	501	499	521	590	613	492	432	332
	<b>Jumlah</b>	<b>12,556</b>	<b>10,399</b>	<b>11,723</b>	<b>10,417</b>	<b>8,966</b>	<b>9,657</b>	<b>9,443</b>	<b>8,325</b>	<b>9,743</b>	<b>5,845</b>

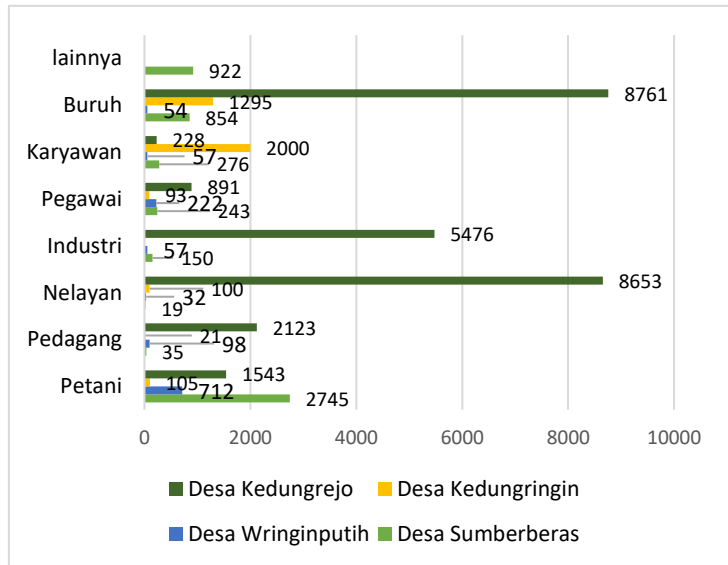
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja di Kawasan Perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 paling tinggi terdapat pada usia 15-19 tahun yakni sebesar 12556 jiwa yang terbagi ke dalam 12 desa. Jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja usia 20-24 sebesar 10399 jiwa, usia angkatan kerja 25-29 sebesar 11723 jiwa, usia angkatan kerja 30-34 sebesar 10417 jiwa, usia angkatan kerja 35-39 sebesar 8966 jiwa, usia angkatan kerja 40-44 sebesar 9657 jiwa, usia angkatan kerja 45-49 sebesar 9443 jiwa, usia angkatan kerja 50-54 sebesar 8325 jiwa, usia angkatan kerja 55-59 sebesar 9743 jiwa dan usia angkatan kerja 60-64 sebesar 5845. Jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja 15-19 tahun tertinggi di Kabupaten Banyuwangi menurut desa kawasan perdesaan Alas Purwo yaitu desa Kedungringin Kecamatan Muncar yakni sebesar 2848 jiwa. Sedangkan, desa dengan jumlah penduduk terendah berdasarkan usia angkatan kerja 15-19 tahun yaitu Desa Kaliploso Kecamatan Cluring sebesar 283 jiwa.



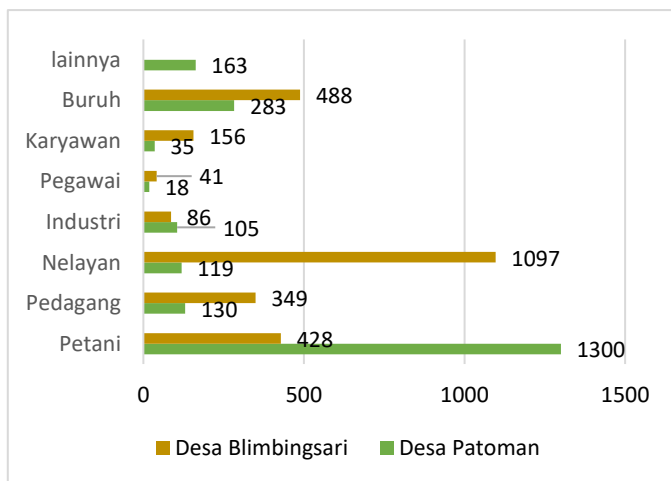
#### 4.4.6 Mata Pencaharian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa empat desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Muncar pada tahun 2020, mata pencaharian terbesar di sektor pertanian adalah Desa Sumberberas yakni sebesar 2745 jiwa, sektor perdagangan adalah Desa Kedungrejo yakni sebanyak 2123 jiwa, sektor industri adalah Desa Kedungrejo yakni sebanyak 5476 jiwa, dan sektor perikanan atau nelayan adalah Desa Kedungrejo yakni sebanyak 8653 jiwa.



**Gambar 4.36 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedungrejo, WringinPutih, Kedungringin dan Sumberberas**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi



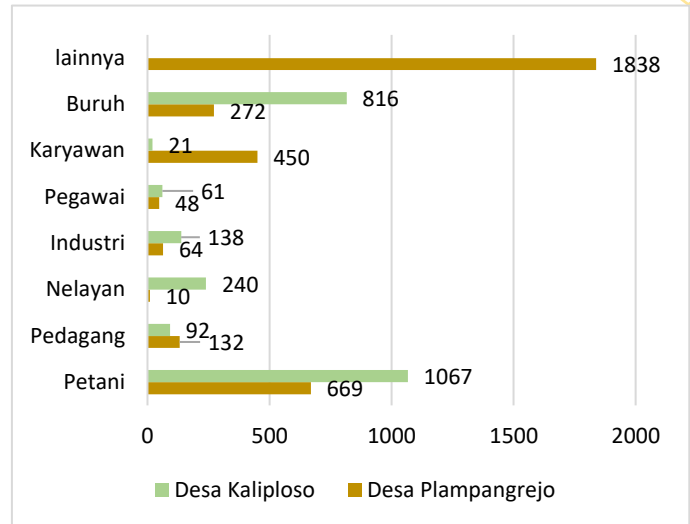
**Gambar 4.37 Mata Pencaharian Penduduk Desa Blimbingsari dan Desa Patoman**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Blimbingsari pada tahun 2020 mata pencaharian terbesar di sektor pertanian adalah Desa Patoman yakni sebesar 1300 jiwa, sektor perikanan atau nelayan adalah Desa Blimbingsari yakni sebesar 1097 jiwa, dan sektor perdagangan adalah Desa Blimbingsari yakni sebesar 349 jiwa.

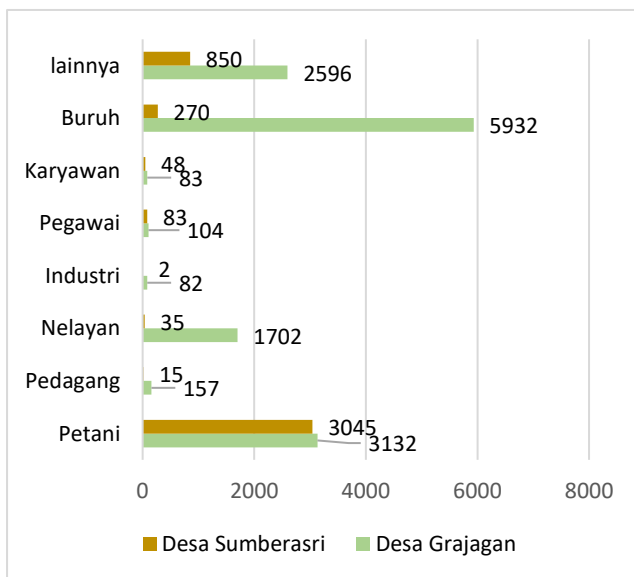


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Cluring pada tahun 2020 mata pencaharian terbesar di sektor pertanian adalah Desa Kaliploso yakni sebesar 1067 jiwa, sektor perdagangan adalah Desa Plampangrejo yakni sebesar 132 jiwa, dan sektor Perikanan atau nelayan adalah Desa Kaliploso yakni sebesar 240 jiwa.



**Gambar 4.38 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kaliploso dan Desa Plampangrejo**

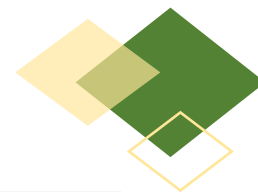
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi



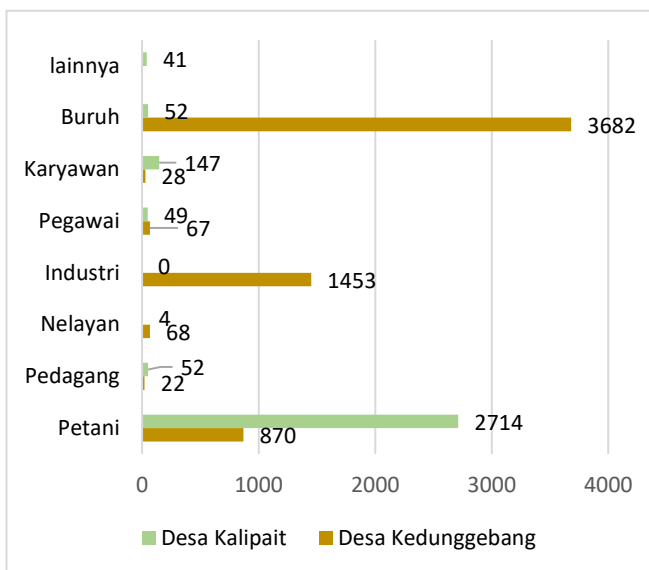
**Gambar 4.39 Mata Pencaharian Penduduk Desa Grajagan dan Desa Sumberasri**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Purwoharjo pada tahun 2020 mata pencaharian terbesar di sektor pertanian adalah Desa Grajagan yakni sebesar 3132 jiwa, sektor Perikanan atau nelayan adalah Desa Grajagan yakni sebesar 1702 jiwa, dan sektor Perdagangan adalah Desa Grajagan yakni sebesar 157 jiwa.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Tegaldlimo pada tahun 2020 mata pencaharian terbesar di sektor pertanian adalah Desa Kalipait yakni sebesar 2714 jiwa, sektor industri adalah Desa Kedunggebang yakni sebesar 1453 jiwa dan sektor jasa/buruh adalah Desa Kedunggebang yakni sebesar 3683 jiwa.



**Gambar 4.40 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalipait dan Desa Kedunggebang**  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

## 4.5 Sarana dan Prasarana

### 4.5.1 Sarana Pendidikan

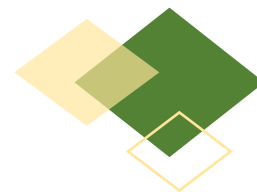
Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ketersediaan sarana pendidikan formal atau sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaan sarana pendidikan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sumberberas, Wringinputih, Kedungringin dan Kedungrejo Tahun 2020**

Desa	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Desa Sumberberas	9	4	2
Desa Wringinputih	9	5	5
Desa Kedungringin	6	1	0
Desa Kedungrejo	7	4	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pendidikan pada empat desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Muncar untuk



tingkat SD/MI paling banyak terdapat di Desa Sumberberas dan Desa Wringinputih yakni sebanyak 9 buah. Sedangkan untuk tingkat SD/MI paling sedikit terdapat di Desa Kedungringin yakni sebanyak 6 buah. Sarana pendidikan untuk tingkat SMP/MTs paling banyak terdapat di Desa Wringinputih yakni sebanyak 5 buah, dan paling sedikit terdapat di Desa Kedungringin yakni sebanyak 1 buah. Sarana pendidikan SMA/MA/SMK paling banyak terdapat di Desa Wringinputih sebanyak 5 buah, untuk Desa Kedungringin belum ada sarana pendidikan tingkat SMA/MA/SMK.

**Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Patoman dan Desa Blimbingsari Tahun 2020**

Desa	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Desa Patoman	3	1	0
Desa Blimbingsari	3	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

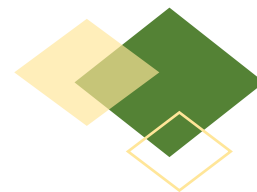
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pendidikan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Blimbingsari untuk tingkat SD/MI Desa Patoman dan Desa Blimbingsari memiliki jumlah sarana pendidikan yang sama yakni sebanyak 3 buah. Sarana pendidikan untuk tingkat SMP/MTs hanya terdapat di Desa Patoman yakni sebanyak 1 buah. Untuk sarana pendidikan tingkat SMA/MA/SMK belum tersedia untuk kedua Desa baik Desa Patoman maupun Desa Blimbingsari.

**Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Plampangrejo dan Desa Kaliploso Tahun 2020**

Desa	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Desa Plampangrejo	5	1	1
Desa Kaliploso	3	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pendidikan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Cluring untuk tingkat SD/MI paling banyak terdapat di Desa Plampangrejo yakni sebanyak 5 buah dan Desa Kaliploso sebanyak 3 buah. Sarana pendidikan untuk tingkat SMP/MTs hanya terdapat di Desa Plampangrejo sebanyak 1 buah. Begitupun dengan sarana pendidikan untuk tingkat SMA/MA/SMK hanya terdapat di Desa Plampangrejo yakni sebanyak 1 buah.



**Tabel 4.9 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Grajagan dan Desa Sumberasri Tahun 2020**

Desa	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Desa Grajagan	9	2	0
Desa Sumberasri	6	3	1

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pendidikan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Purwoharjo untuk tingkat SD/MI paling banyak terdapat di Desa Grajagan yakni sebanyak 9 buah dan Desa Sumberasri sebanyak 6 buah. Sarana pendidikan untuk tingkat SMP/MTs paling banyak terdapat di Desa Sumberasri sebanyak 3 buah dan Desa Grajagan yakni sebanyak 2 buah. Untuk sarana pendidikan tingkat SMA/MA/SMK hanya terdapat di Desa sumberasri yakni sebanyak 1 buah.

**Tabel 4.10 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kedunggebang dan Desa Kalipait Tahun 2020**

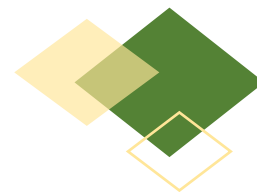
Desa	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Desa Kedunggebang	9	2	1
Desa Kalipait	6	1	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pendidikan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Tegaldlimo untuk tingkat SD/MI paling banyak terdapat di Desa Kedunggebang yakni sebanyak 9 buah dan Desa Kalipait sebanyak 6 buah. Sarana pendidikan untuk tingkat SMP/MTs paling banyak terdapat di Desa Kedunggebang sebanyak 2 buah dan Desa Kalipait yakni sebanyak 1 buah. Untuk sarana pendidikan tingkat SMA/MA/SMK hanya terdapat di Desa Kedunggebang yakni sebanyak 1 buah.

#### **4.5.2 Sarana Kesehatan**

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Kesehatan juga memiliki pengaruh penting terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat kesehatan yang tinggi akan mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Tingkat kesehatan yang tinggi juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Jika fasilitas kesehatan kurang memadai, maka daya layan yang akan diberikan juga akan kurang sehingga pengobatan yang dilakukan kepada masyarakat kurang optimal.



**Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Sumberberas, Desa Wringinputih, Desa Kedungringin dan Desa Kedungrejo Tahun 2020**

Desa	Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik Kesehatan
Desa Sumberberas	1	0	1
Desa Wringinputih	1	0	0
Desa Kedungringin	0	0	0
Desa Kedungrejo	1	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana kesehatan pada empat desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Muncar menunjukkan bahwa untuk sarana rumah sakit belum tersedia di masing-masing desa yang berada di Kecamatan Muncar. Sedangkan, sarana klinik kesehatan hanya terdapat di Desa Sumberberas yakni sebanyak 1 buah. Untuk sarana puskesmas, terdapat di Desa Sumberberas, Desa Wringinputih dan Desa Kedungrejo yakni masing-masing sebanyak 1 buah.

**Tabel 4.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Patoman dan Desa Blimbingsari Tahun 2020**

Desa	Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik Kesehatan
Desa Patoman	1	0	0
Desa Blimbingsari	0	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

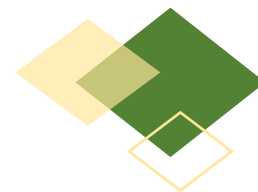
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana kesehatan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Blimbingsari menunjukkan bahwa hanya Desa Patoman yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan puskesmas yakni sebanyak 1 buah. Sementara itu, Desa Blimbingsari masih belum memiliki ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

**Tabel 4.13 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Plampangrejo dan Desa Kaliploso Tahun 2020**

Desa	Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik Kesehatan
Desa Plampangrejo	1	0	12
Desa Kaliploso	1	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana kesehatan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Cluring menunjukkan bahwa untuk sarana puskesmas masing-masing Desa memiliki 1 buah. Sementara itu, untuk sarana rumah sakit di Desa Plampangrejo dan Desa Kaliploso masih



belum tersedia. Untuk sarana klinik kesehatan hanya terdapat di Desa Plampangrejo yakni sebanyak 12 buah.

**Tabel 4.14 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Grajagan dan Desa Sumberasri Tahun 2020**

Desa	Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik Kesehatan
Desa Grajagan	1	1	1
Desa Sumberasri	0	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana kesehatan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Purwoharjo menunjukkan bahwa sarana puskesmas, rumah sakit dan klinik kesehatan hanya terdapat di Desa Grajagan. Sementara itu, untuk sarana puskesmas, rumah sakit dan klinik kesehatan di Desa Sumberasri belum tersedia.

**Tabel 4.15 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Kedunggebang dan Desa Kalipait Tahun 2020**

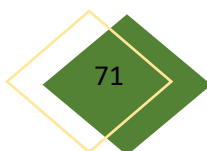
Desa	Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik Kesehatan
Desa Kedunggebang	1	0	0
Desa Kalipait	0	0	0

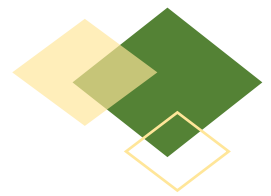
*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana kesehatan pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Tegaldlimo menunjukkan bahwa hanya Desa Kedunggebang yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yakni hanya terbatas pada sarana puskesmas sebanyak 1 buah. Sementara itu, Desa Kalipait masih belum memiliki ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

#### 4.5.3 Sarana Ekonomi

Data yang bersumber dari BPS menyatakan bahwa sarana ekonomi dalam kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Muncar yang memiliki pasar umum adalah Desa Sumberberas sebanyak dua pasar umum, Desa Kedungringin dan Desa Kedungrejo sebanyak masing-masing satu pasar umum. Sedangkan untuk Desa Wringinputih tidak memiliki pasar umum. Di kecamatan Blimbingsari kedua desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan yaitu Desa Blimbingsari dan Desa Patoman masing-masing memiliki satu pasar umum. Begitupun dengan kecamatan Purwoharjo, kedua desa yang berada di kawasan perdesaan yaitu Desa Grajagan dan Desa Sumberasri memiliki masing-masing satu pasar umum. Sedangkan di Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo dari dua desa yang berada di kawasan perdesaan hanya ada satu desa yang memiliki pasar umum yaitu Desa

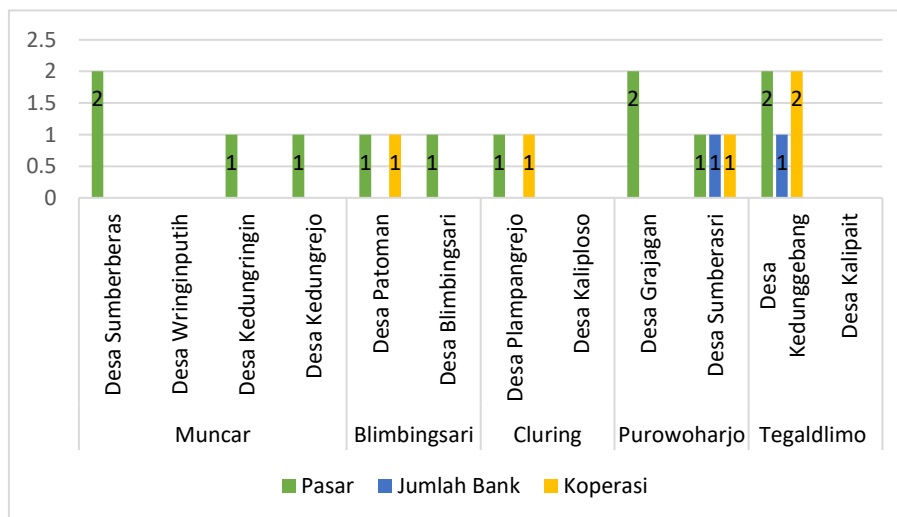




Plampangrejo (Kecamatan Cluring) dan Desa Kedunggebang (Kecamatan Tegaldlimo) masing-masing memiliki dua pasar umum.

Untuk sarana ekonomi jenis bank hanya terdapat dua unit bank yang berada di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo dan Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo. Di Kecamatan Muncar, Kecamatan Blimbingsari dan Kecamatan Cluring tidak terdapat sarana ekonomi untuk unit bank.

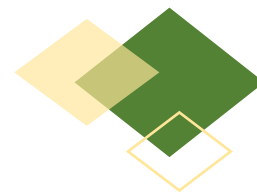
Sarana ekonomi jenis koperasi di Kecamatan Muncar dari empat desa yang berada di kawasan perdesaan masing-masing desa tidak terdapat koperasi. Di Kecamatan Blimbingsari dari dua desa yang berada di kawasan perdesaan hanya terdapat satu unit koperasi yaitu di Desa Patoman. Begitupun dengan Kecamatan Cluring dan Kecamatan Purwoharjo, dari dua desa yang berada di kawasan perdesaan, hanya terdapat satu unit koperasi yakni di Desa Plampangrejo (Kecamatan Cluring) dan Desa Sumberwsri (Kecamatan Purwoharjo). Di Kecamatan Tegaldlimo jenis koperasi paling banyak berada di Desa Kedunggebang yakni sebanyak 2 unit, sedangkan di Desa Kalipait tidak terdapat koperasi.



**Gambar 4.41 Sarana Ekonomi Kawasan Perdesaan Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Salah satu sarana yang menunjang aktivitas perekonomian masyarakat perdesaan adalah koperasi. Koperasi memiliki peran penting dalam proses mengembangkan sektor umkm perdesaan terutama dalam hal pembiayaan. Selain itu, dalam mendukung roda perekonomian daerah, keberadaan Perbankan sebagai salah satu motor penggerak dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat juga menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan perekonomian di suatu Daerah.



**Tabel 4.16 Jumlah Koperasi di Kecamatan Muncar, Blimbingsari, Cluring, Purwoharjo dan Tegaldlimo Menurut Desa Tahun 2020**

Kecamatan	Desa	Jumlah Bank	Jumlah Koperasi
Muncar	Desa Sumberberas	0	0
	Desa Wringinputih	0	0
	Desa Kedungringin	0	0
	Desa Kedungrejo	0	0
Blimbingsari	Desa Patoman	0	1
	Desa Blimbingsari	0	0
Cluring	Desa Plampangrejo	0	1
	Desa Kaliploso	0	0
Purwoharjo	Desa Grajagan	0	0
	Desa Sumberasri	1	1
Tegaldlimo	Desa Kedunggebang	1	2
	Desa Kalipait	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sarana ekonomi koperasi paling banyak terdapat di Kecamatan Tegaldlimo Desa Kedunggebang yakni sebanyak 2 buah, Kecamatan Blimbingsari Desa Patoman sebanyak 1 buah, Kecamatan Cluring Desa Plampangrejo sebanyak 1 buah dan Kecamatan Purwoharjo Desa Sumberasri sebanyak 1 buah. Untuk sarana ekonomi perbankan hanya terdapat di Kecamatan Purwoharjo Desa Sumberasri dan Kecamatan Tegaldlimo Desa Keudnggebang yakni masing-masing sebanyak 1 buah.

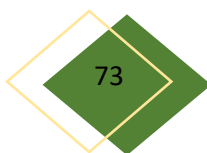
#### 4.5.4 Sarana Pendukung

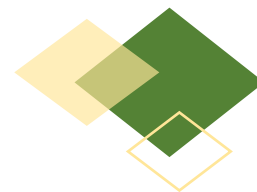
Sektor potensial lainnya yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan adalah sektor pariwisata. Tentu dalam pengembangannya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk kelengkapan rumah makan, hotel, homestay dan café sehingga mampu mendorong minat wisatawan untuk berkunjung pada objek wisata perdesaan.

**Tabel 4.17 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Sumberberas, Desa Wringinputih, Desa Kedungringin dan Desa Kedungrejo Tahun 2020**

Desa	Hotel	Homestay	Café	Restaurant
Desa Sumberberas	0	0	0	1
Desa Wringinputih	0	0	0	0
Desa Kedungringin	0	0	0	0
Desa Kedungrejo	0	0	0	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi





Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pariwisata pada empat desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Muncar menunjukkan bahwa untuk sarana hotel, homestay dan café belum tersedia di masing-masing desa. Untuk sarana restaurant paling banyak terdapat di Desa Kedungrejo yakni sebanyak 2 buah dan Desa Sumberberas sebanyak 1 buah, sedangkan untuk Desa Wringinputih dan Desa Kedungringin belum tersedia.

**Tabel 4.18 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Patoman dan Desa Blimbingsari Tahun 2020**

Desa	Hotel	Homestay	Café	Restaurant
Desa Patoman	1	0	0	0
Desa Blimbingsari	0	1	2	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pariwisata pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Blimbingsari menunjukkan bahwa untuk sarana hotel hanya terdapat di Desa Patoman yakni sebanyak 1 buah. Sarana homestay hanya terdapat di Desa Blimbingsari yakni sebanyak 1 buah. Sarana café hanya terdapat di Desa Blimbingsari yakni sebanyak 2 buah. Sementara untuk sarana restaurant belum tersedia di masing-masing desa.

**Tabel 4.19 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Plampangrejo dan Desa Kaliploso Tahun 2020**

Desa	Hotel	Homestay	Café	Restaurant
Desa Plampangrejo	0	0	1	0
Desa Kaliploso	0	0	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pariwisata pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Cluring menunjukkan bahwa untuk sarana hotel, homestay dan restaurant belum tersedia di masing-masing desa. Untuk sarana café hanya tersedia di Desa Plampangrejo yakni sebanyak 1 buah.

**Tabel 4.20 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Grajagan dan Desa Sumberasri Tahun 2020**

Desa	Hotel	Homestay	Café	Restaurant
Desa Grajagan	1	0	2	0
Desa Sumberasri	0	10	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pariwisata pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Purwoharjo menunjukkan bahwa untuk sarana hotel hanya tersedia di Desa Grajagan yakni sebanyak 1 buah. Sarana homestay hanya tersedia di Desa Sumberasri yakni sebanyak 10 buah. Sarana



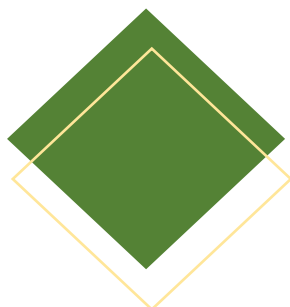
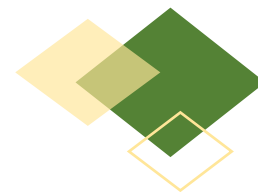
café hanya tersedia di Desa Grajagan yakni sebanyak 2 buah. Sementara untuk sarana restaurant belum tersedia di masing-masing desa.

**Tabel 4.21 Jumlah Sarana Pariwisata di Desa Kedunggebang dan Desa Kalipait Tahun 2020**

Desa	Hotel	Homestay	Café	Restaurant
Desa Kedunggebang	0	0	3	0
Desa Kalipait	4	4	0	0

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sarana pariwisata pada dua desa yang ditetapkan dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Tegaldlimo menunjukkan bahwa untuk sarana hotel hanya tersedia di Desa Kalipait yakni sebanyak 4 buah. Sarana homestay hanya tersedia di Desa Kalipait yakni sebanyak 4 buah. Sarana café hanya tersedia di Desa Kedunggebang yakni sebanyak 3 buah. Sementara untuk sarana restaurant belum tersedia di masing-masing desa.



## **BAB V**

# **PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN**

### **5.1 Tinjauan Kebijakan**

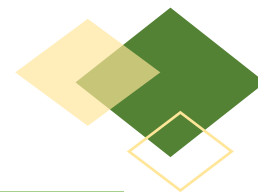
#### **5.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024**

Sesuai amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014, pengembangan desa dan kawasan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

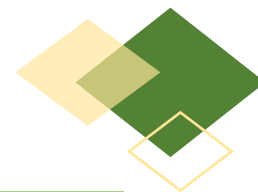
Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam RPJMN tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disajikan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024**

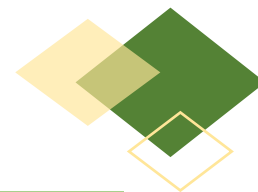
<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan	Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan  Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar  Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan



Arah Kebijakan	Strategi
<p>Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul</p>	<p>Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien</p> <p>Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0</p> <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat</p> <p>Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan</p> <p>Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0</p>
<p>Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan</p>	<p>Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan</p> <p>Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor</p> <p>Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan</p> <p>Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, kepariwisataan serta ekonomi kreatif</p> <p>Fasilitasi pengembangan desa wisata (dewi)</p> <p>Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan</p>



Arah Kebijakan	Strategi
<p>Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digita</p>	<p>Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan</p> <p>Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial</p> <p>Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi</p> <p>Pengembangan e-commerce, e-logistic dan fintech di perdesaan melalui Desa Digital</p>
<p>Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan</p>	<p>Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi</p> <p>Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalui prinsip 3R (reuse, reduce, recycle)</p> <p>Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan</p> <p>Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan</p> <p>Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan</p>



Arah Kebijakan	Strategi
<p>Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.</p>	<p>Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan</p> <p>Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat</p> <p>Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan</p> <p>Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa</p>
<p>Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.</p>	<p>Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan Grand Design Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh Stakeholders</p> <p>Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah</p> <p>Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi</p> <p>Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/ lembaga penelitian masyarakat dunia usaha</p> <p>Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)</p>
<p>Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi</p>	<p>Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur</p> <p>Meningkatkan dukungan manajemen, sarana dan prasarana</p> <p>Meningkatkan pengembangan SDM aparatur</p> <p>Meningkatkan dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan</p>



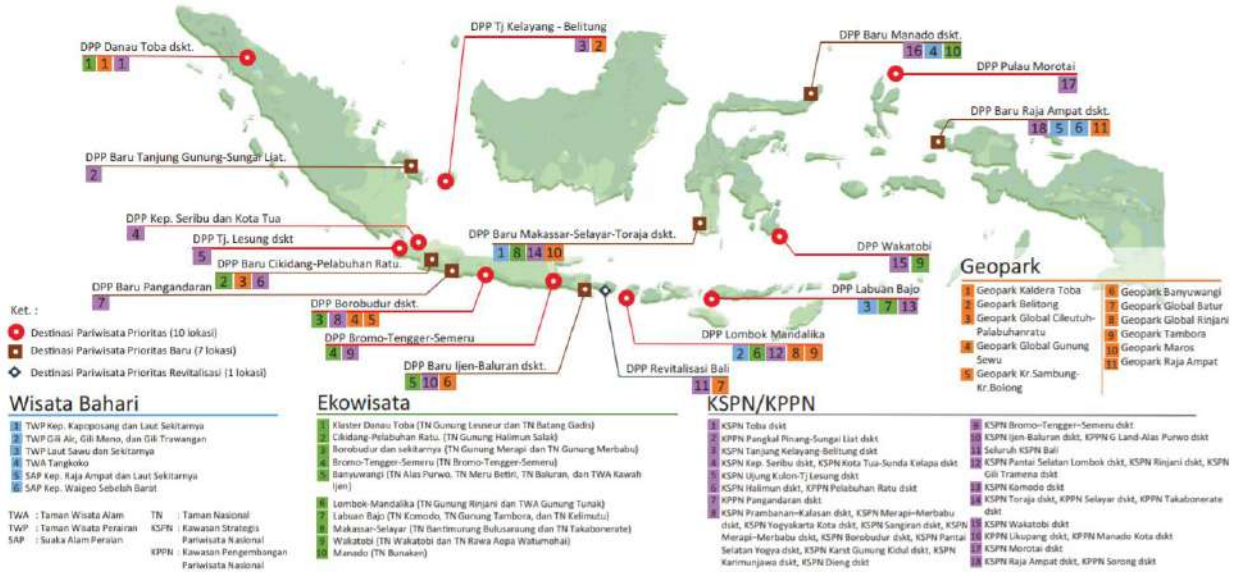
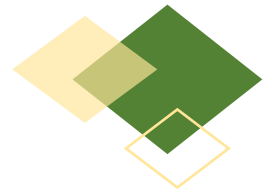
Dari arah dan strategi pembangunan diatas, untuk mempermudah dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi, pemerintah Indonesia menetapkan kawasan wilayah pengembangan yang terbagi atas 7 wilayah diantaranya wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera dan Jawa-Bali.

Untuk pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa modern, sebagai gerbang pariwisata internasional, serta mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Dengan kepadatan penduduk dan infrastruktur yang relatif baik, transformasi ekonomi Wilayah Jawa diarahkan menjadi perekonomian berbasis aneka industri dan jasa yang modern dan efisien yang didukung pariwisata massal yang berkembang dengan karakter budaya lokal yang kuat, serta berpartisipasi dan menyatu dalam mata rantai global di bidang investasi, produksi, keuangan, perdagangan dan pariwisata.

Strategi pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan tujuh langkah. Diantaranya adalah:

- 1) Mendorong pengembangan kawasan industri manufaktur yang terintegrasi dengan jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan di sisi Pantai Utara Pulau Jawa.
- 2) Meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata massal kelas dunia khususnya di poros Pulau Bali-Banyuwangi-Bromo-Borobudur-Kepulauan Seribu-Tanjung Lesung, dengan beberapa kawasan yang terus dikembangkan yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau Taman Nasional (TN) diantaranya: KI Madura, DPP/ KEK Tanjung Lesung, DPP Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Potensial Bandung-Pangandaran, Destinasi Potensial Banyuwangi, TWA Kamojang, TWA Papandayan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN/KSPN Gunung Merapi, TN/ KSPN Gunung Merbabu, TN/KPPN Alas Purwo, TN/ KPPN Meru Betiri, TN/KSPN Baluran, TWA Kawah Ijen, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan
- 3) Mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya bangsa.
- 4) Mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras.
- 5) Meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan dan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata, khususnya di WM





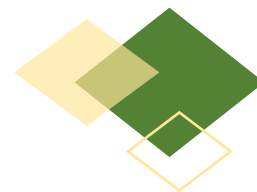
Gambar 5.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata

### 5.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Visi, misi dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan didasarkan melalui pendekatan *top down* mengacu pada RPJMN dan kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “**Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah**”.

1. Makna “**Semakin**” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan disebaga bidang pembangunan.
2. Makna “**Semakin Maju**” dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek kemajuan pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan fisik infrastruktur. Kedua aspek inilah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pembangunan di Banyuwangi. Selain itu makna maju juga dapat diartikan sebagai bentuk posisi Banyuwangi yang mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu **1) Pertanian** dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, **2) Pariwisata**, dalam hal ini wisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, **3) UMKM**, sebagai wadah dari industri pengolahan dan menjadi sarana penambahan nilai dari hasil pertanian dan diharapkan mampu menjadi daya tarik pariwisata tersendiri.



3. Makna **“Semakin Sejahtera”** ini merupakan manifestasi kondisi Banyuwangi yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan karakter masyarakat Banyuwangi.
4. Makna **“semakin berkah”** ini dapat diartikan pula sebagai karunia tuhan yang mendatangkan kebaikan/manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, pembangunan yang diberkahi pastilah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Keberkahan pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan sosial, maka pembangunan yang diberkahi pasti berdampak pada meningkatnya nilai kesalehan sosial masyarakat.

Sedangkan untuk misi, misi dalam hal ini adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut adalah:

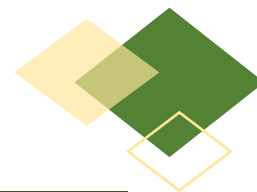
1. Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM unggul berkarakter dan harmonisasi sosial yang kondusif;
3. Membangun layanan publik dan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis;

Berdasarkan visi dan misi penjelasan diatas, untuk pengembangan kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi tercantum pada makna visi **“semakin maju”** dan tercantum pada misi pertama yang mana **“membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan”**.

Dari visi dan misi terkait pengembangan kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka diperoleh tujuan, sasaran dan strategi pembangunan dalam pencapaian kawasan perdesaan sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan	Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	Membangun infrastruktur tematik pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, Akses pasar dan mentoring yang mampu menyerap tenaga kerja lokal

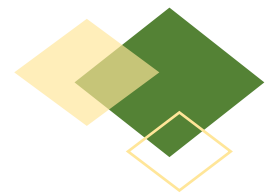


### 5.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Peluang pengembangan kawasan perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi menjadi semakin tinggi dengan ditetapkannya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Dalam rencana tersebut telah ditetapkan beberapa kawasan peruntukan dalam Kawasan Perdesaan Alas Purwo sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukkan pertanian:
  - Padi meliputi:
    1. Kecamatan Blimbingsari
    2. Kecamatan Muncar
    3. Kecamatan Cluring
    4. Kecamatan Tegaldlimo
    5. Kecamatan Purwoharjo
  - Jagung meliputi:
    1. Kecamatan Muncar
    2. Kecamatan Tegaldlimo
  - Kedelai meliputi:
    1. Kecamatan Cluring
    2. Kecamatan Muncar
    3. Kecamatan Tegaldlimo
    4. Kecamatan Purwoharjo
2. Kawasan peruntukkan hortikultura:
  - Cabe Besar meliputi:
    1. Kecamatan Cluring
    2. Kecamatan Muncar
  - Jeruk Siam meliputi:
    1. Kecamatan Tegaldlimo
    2. Kecamatan Purwoharjo
  - Buah Naga meliputi:
    1. Kecamatan Purwoharjo
  - Semangka meliputi:
    1. Kecamatan Muncar
    2. Kecamatan Cluring
  - Melon meliputi:
    1. Kecamatan Muncar
  - Blimbing meliputi:
    1. Kecamatan Cluring
    2. Kecamatan Purwoharjo
3. Kawasan peruntukkan perkebunan:
  - Kelapa Buah meliputi:
    1. Kecamatan Blimbingsari
    2. Kecamatan Muncar
    3. Kecamatan Cluring
    4. Kecamatan Tegaldlimo
    5. Kecamatan Purwoharjo
  - Kelapa Deres meliputi:
    1. Kecamatan Muncar
    2. Kecamatan Tegaldlimo
  - Kapuk Randu meliputi:
4. Kawasan peruntukkan peternakan:
  - Sapi Perah meliputi:
    1. Kecamatan Purwoharjo
  - Sapi Potong meliputi:
    1. Kecamatan Muncar
    2. Kecamatan Purwoharjo
  - Ternak Ayam Buras meliputi:
    1. Kecamatan Blimbingsari
    2. Kecamatan Muncar
    3. Kecamatan Cluring
    4. Kecamatan Tegaldlimo





1. Kecamatan Cluring
  2. Kecamatan Muncar
  3. Kecamatan Tegaldlimo
  4. Kecamatan Purwoharjo
- Tembakau meliputi:
1. Kecamatan Muncar
  2. Kecamatan Tegaldlimo
  3. Kecamatan Purwoharjo
5. Kecamatan Purwoharjo
- Ternak Itik & Entok meliputi:
1. Kecamatan Blimbingsari
  2. Kecamatan Muncar
  3. Kecamatan Cluring
  4. Kecamatan Tegaldlimo
  5. Kecamatan Purwoharjo

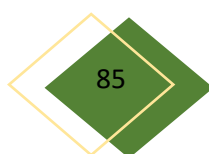
Selain kawasan peruntukkan pertanian, hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk pengembangan Kawasan Alas Purwo, dalam dokumen RTRW Kabupaten Banyuwangi juga menetapkan Kawasan Alas Purwo sebagai kawasan peruntukkan pariwisata yang berada dalam WPP II. WPP sebagaimana yang dimaksud tersebut terbagi atas:

1. Daya tarik wisata budaya, yang meliputi upacara adat Petik Laut Muncar; dan upacara adat Pager Wesi
2. Lokasi bersejarah, yang meliputi Situs Kawitan; Pura Giri Salaka; Goa Istana; dan Goa Maria Jatiningrum
3. Destinasi wisata alam, yang meliputi Pantai Grajagan; Pantai Segoro Anak; Wisata Hutan Bakau (Mangrove); dan Pantai Muncar.

#### **5.1.4 Dokumen Rencana Lain Terkait Tema Kawasan Perdesaan**

Kesesuaian pengembangan kawasan perdesaan Alas Purwo ini tak hanya disesuaikan dalam dokumen RPJMN, RPJMD dan RTRW Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi juga telah disesuaikan dan tertuang dalam laporan Rencana Induk pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang dalam laporan rencana tersebut, tercantum bahwasannya pengembangan kawasan perdesaan Alas Purwo sebagai kawasan pariwisata. Program utama dalam pengelolaan kawasan Alas Purwo diantaranya mengembangkan sarana prasarana wisata di sekitar Pantai Plengkung, namun tidak berdampak terhadap tereliminasi kawasan konservasi serta mengembangkan bangunan yang ramah lingkungan; dan tetap memelihara dan terus membudidayakan tanaman bakau terutama di Kawasan Segoro Anak.

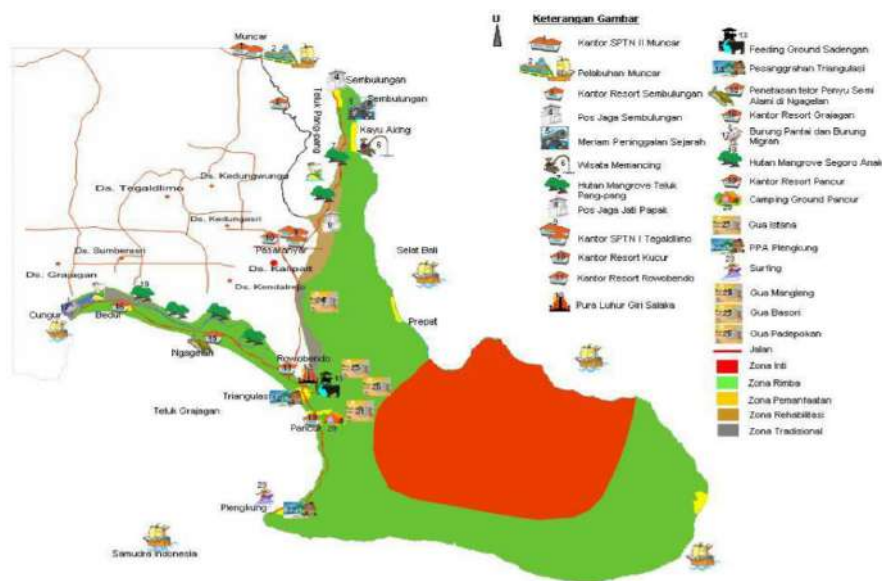
Dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, kawasan rencana pengembangan pariwisata Alas Purwo termasuk dalam jalur pengembangan koridor D yang meliputi : Pantai Plengkung, Grajagan, Pantai Sukamade, Taman Suruh, Kawah Ijen (Kabupaten Banyuwangi), Pantai Pasir Putih, Arak-Arak, Bukit Bededung (Kabupaten Situbondo), Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, Pemandian Petemon, Pantai Watu Ulo ( Kabupaten Jember), Pantai Bentar, Candi Jabung Tirta, Bromo-Ngadisari (Kabupaten Probolinggo), dan Kakek





Bodo, Pemandian Banyubiru, Kebun Raya Purwodadi (Kabupaten Pasuruan) dengan pusat pelayanan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo.

Kawasan Taman Nasional Alas Purwo merupakan wilayah yang berkembang sangat pesat sebagai daerah wisata alam, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara. Hal tersebut disebabkan karena lokasinya mampu memberikan daya tarik keindahan alam dan keanekaragaman hayati, udara yang sejuk dan bersih serta keindahan pantai yang eksotik bagi wisatawan. Ditinjau dari segi pariwisata, Kawasan Taman Nasional Alas Purwo dan sekitarnya memiliki keindahan dan fenomena alam yang berneka ragam.



**Gambar 5.3 Sebaran Obyek Daya Tarik Wisata Alam Alas Purwo Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi**

### 5.1.5 Posisi Kawasan Perdesaan Dalam Konstelasi Regional dan Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

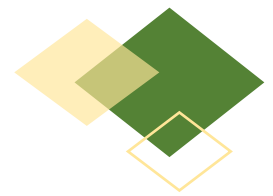
Kawasan perdesaan dengan lingkup baik regional dan nasional pada dasarnya merupakan lanskap wilayah yang saling berhubungan melalui keterkaitan kekuatan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yang sangat kompleks. Kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaanya dalam konstelasi regional-nasional. Demikian pula, regional-nasional melalui perkembangan transportasi dan perkembangan komunikasi yang cepat,



mengalami perubahan morfologi. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya dan lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. Adanya interaksi kawasan perdesaan dengan regional-nasional dapat terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang ada dalam desa, dalam regional, dalam nasional dan diantara desa dengan regional-nasional.

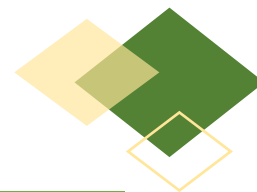
Pengembangan kawasan perdesaan dengan lingkup regional-nasional mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Jika peran desa baik dengan lingkup regional maupun nasional tersebut dapat berjalan dengan baik, hubungan keterkaitan (ekonomi) antara desa dan lingkup regional maupun nasional dapat tercapai. Pentingnya keterkaitan kawasan perdesaan dengan lingkup regional maupun nasional ini dalam jaringan wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dikemukakan oleh Mike Douglass (1998) melalui konsep Agropolitan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan dalam lingkup regional dalam wilayah tersebut atau bahkan jika bisa dikaitkan dengan tingkat nasional. Fungsi kawasan regional-nasional lebih dititik beratkan sebagai pusat kegiatan non pertanian dan pusat administrasi, bukan sebagai pusat pertumbuhan. Sementara itu kawasan perdesaan justru yang memiliki peran sebagai unit pengembangan.

Hubungan antara kawasan perdesaan dengan lingkup regional maupun nasional juga bervariasi sesuai dengan hubungan ke jaringan spasial yang lebih besar dari kota, keberadaan transportasi dan arus komunikasi. Hubungan kawasan perdesaan dengan lingkup regional maupun nasional merupakan proses yang dinamis, sejalan dengan profil fungsional suatu kawasan. Dinamika tersebut antara lain terlihat dari beberapa kegiatan yang sebelumnya layak di suatu lokasi namun menjadi tidak berarti atau perlu ada karena tuntutan perkembangan sistem tata ruang yang lebih besar. Perubahan pola pikir tersebut menuntun ke arah perlunya membentuk konsep jejaring antar wilayah. Konsep ini dilandasi oleh suatu tuntutan kebutuhan tentang perlunya perluasan wilayah sebagaimana infrastruktur dan akses di tingkat regional maupun nasional serta peningkatan kualitas jalan lokal dan infrastruktur transportasi yang menghubungkan sumber-sumber fungsi perdesaan dengan lingkup tingkat regional dan nasional. Jejaring antar wilayah (kawasan perdesaan-regional; kawasan perdesaan-nasional; regional-nasional) sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat beberapa jenis keterkaitan sebagai basis analisis kuantitatif dan kualitatif. Keterkaitan fisik seperti jaringan jalan, irigasi, atau jaringan transportasi dan komunikasi lainnya berkaitan dengan hubungan ekonomi baik konsumsi bahkan pelayanan.



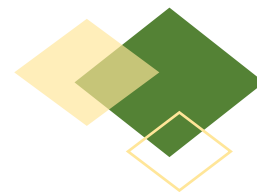
**Tabel 5.3 Tipe Keterkaitan Kawasan Perdesaan dalam Pendukung Regional maupun Nasional**

Tipe Keterkaitan	Elemen	Fasilitas Umum Tingkat Regional maupun Nasional	Fasilitas Khusus untuk Pariwisata, dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
<b>Keterkaitan Fisik</b>	Jalan, Angkutan, Kereta api, Penerbangan, Irigasi, Ekologis, Interdependensi	Keterkaitan intra dan intersistem : Stasiun kereta, terminal, bis, pelabuhan dan bandara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses desa terhadap jalan menuju dan dari kota</li> <li>2. Akses menuju keterkaitan transportasi utama (darat,laut,udara)</li> </ol>
<b>Keterkaitan Ekonomi</b>	Pola pasar, aliran bahan mentah dan barang antara, keterkaitan produksi, pola konsumsi dan belanja, aliran modal dan pendapatan, aliran komoditas sektoral dan interregional, keterkaitan silang	Pasar barang konsumsi dan pertanian, fasilitas penyediaan input, penyimpanan, fasilitas penyediaan jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar produksi pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>2. Fasilitas penyediaan input pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>3. Fasilitas pembelian dan perawatan peralatan pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>4. Outlet kredit untuk usaha pertanian dan usaha kecil lainnya</li> <li>5. Fasilitas pengembangan pariwisata baik berupa jasa maupun kelengkapan peralatan</li> </ol>



Tipe Keterkaitan	Elemen	Fasilitas Umum Tingkat Regional Maupun Nasional	Fasilitas Khusus untuk Pariwisata, dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
<b>Keterkaitan Teknologi</b>	Interdependensi teknologi, sistem irigasi, sistem Telkom	Tempat perawatan dan perbaikan, fasilitas suplai energi (listrik, BBM), fasilitas keuangan, investasi dan perbankan, sekolah, rumah sakit/klinik, fasilitas telkom dan pos, media massa, fasilitas akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas penyediaan input pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>2. Fasilitas/akses jejaring pemasaran</li> <li>3. Outlet kredit usaha</li> <li>4. Fasilitas pengembangan pariwisata</li> </ol>
<b>Keterkaitan Interaksi Sosial</b>	Pola kunjungan, pola kekerabatan, aktivitas agama, interaksi kelompok sosial	Fasilitas komunitas, Mesjid, Gereja, fasilitas olahraga, bioskop	Tidak ada fasilitas kecuali untuk memenuhi permintaan desa yang meningkat
<b>Keterkaitan penyediaan pelayanan</b>	Aliran dan jaringan energi, jaringan kredit dan finansial, keterkaitan pendidikan, pelatihan dan ekstensi, sistem pelayanan kesehatan	Fasilitas suplai energi (listrik, BBM), fasilitas keuangan, investasi dan perbankan, sekolah, rumah sakit, fasilitas telkom dan pos, media massa, fasilitas akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supply barang input berupa pertanian, perkebunan dan peternakan</li> <li>2. fasilitas sekolah khusus dan pelatihan pertanian perkebunan, peternakan dan pariwisata</li> </ol>
<b>Keterkaitan politik, administratif dan organisasi</b>	Keterkaitan struktural, aliran anggaran pemerintah, interdependensi organisasi, pola otoritas-persetujuan dan supervisi	Otoritas dan agen-agen sub nasional (administrasi, pemeliharaan, perencanaan, implementasi), kamar dagang, serikat buruh, peradilan, polisi	Kantor cabang Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kesehatan, Perindustrian, Pariwisata

Jejaring kawasan perdesaan dengan regional-nasional dapat digambarkan dalam konteks spasial dan sektoral sesuai karakter perekonomian yang dimiliki. Interdependensi ini dalam hal sektoral/ekonomi dapat dilihat dari aliran dua arah dalam pasar barang dan jasa



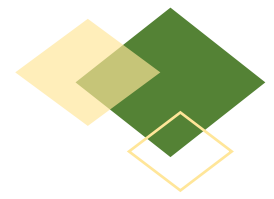
dalam perekonomian. Produksi pertanian dan komoditas lainnya dari perdesaan ke pasar di lingkup regional dan nasional ditujukan untuk konsumen lokal dan atau diekspor lebih lanjut ke tingkat regional, nasional dan internasional. Sebaliknya jejaring tersebut dapat juga diperlihatkan oleh aliran barang dan jasa yang diimpor dari pusat wilayah ke perdesaan dengan implikasi sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang tinggal di perdesaan akan memperoleh pendapatan yang tinggi dari produksi pertanian yang diminta oleh *non local market* dan meningkatkan permintaan mereka terhadap *consumer goods*.
2. Penciptaan lapangan kerja yang bersifat nonfarm jobs dan diversifikasi lapangan kerja, terutama di kota kecil (*peri-urban*) yang dekat dengan area produksi pertanian, perkebunan bahkan peternakan.
3. Pada akhirnya kondisi tersebut akan menyerap surplus tenaga kerja yang ada di perdesaan, meningkatkan permintaan untuk produksi pertanian, perkebunan bahkan peternakan untuk mendorong produktivitas dan pendapatan rumah tangga di perdesaan
4. Kelancaran arus barang dari desa ke wilayah yang lebih tinggi di tingkat regional maupun regional dan sebaliknya, difasilitasi oleh kemudahan akses terhadap pasar dan akses terhadap infrastruktur pendukung. Yang mana hasil dari ini akan mempermudah mobilitas masyarakat ke kawasan perdesaan untuk menikmati potensi unggulan perdesaan baik berupa hasil pertanian maupun non pertanian seperti pariwisata.

## 5.2 Konsep Pengembangan Kawasan

### 5.2.2 Tema Pengembangan Kawasan

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo mengangkat tema “**Agroecoedu Wisata**”. Tema kawasan ini diambil mengarahkan potensi di kawasan perdesaan selingkar Alas Purwo untuk dijadikan destinasi wisata dengan mengembangkan konsep wisata edukasi dimana wisata edukasi merupakan suatu perjalanan yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan dan pembelajaran sehingga dapat mengubah cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan guna mendapatkan pengalaman belajar secara langsung didalamnya. Maksudnya adalah dimana wisatawan selain dapat menikmati indahnya berwisata, wisatawan juga mendapatkan pendidikan tentang hal baru yang belum diketahui secara langsung. Wisata edukasi atau wisata pendidikan juga dikenal dengan sebutan “*edu-tourism*”.

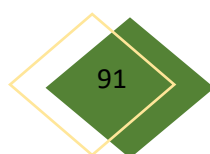


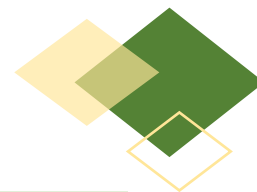
### 5.2.2 Hulu Hilir Pengembangan Kawasan

Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Sektor yang berperan penting adalah pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan industri yang dikembangkan melalui sistem keterpaduan. Kawasan Perdesaan Alas Purwo mempunyai tiga sektor kawasan inti yaitu agroindustri, agrowisata dan wisata. Sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, sektor industri, dan sektor pariwisata dikelola melalui sistem keterkaitan ke depan dan ke belakang. Begitu pula dalam pola keterkaitan, sektor industri harus mendukung sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan pariwisata, dari hulu hingga hilir.

Pengembangan perdesaan baik melalui sistem agroindustri, agrowisata dan wisata sangat erat hubungannya dengan interaksi antar wilayah, dalam konteks hubungan antardesa serta entitas didalamnya yang berkaitan dengan agroindustri, agrowisata maupun wisata. Hal tersebut didasarkan karena tidak semua desa memiliki potensi yang sama dalam sumberdaya fisik maupun manusianya. Dengan penerapan sistem tersebut merupakan bentuk pemanfaatan potensi sumberdaya lokal yang ada di wilayah serta berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan urbanisasi masyarakat. Untuk meningkatkan perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Banyuwangi baik bagi masyarakat, perekonomian, maupun pembangunan wilayahnya perlu upaya pengembangan potensi lokal secara intensif.

Dengan mengintegrasikan antara sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan wisata di kawasan perdesaan Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi maka akan dapat menjadi sektor tangguh kawasan perdesaan. Dalam menunjang keberlanjutan aktivitas tersebut, perlu adanya keterkaitan antar desa secara terpadu dalam konteks spasial, sehingga dapat menunjang hubungan antar desa untuk mendukung kemajuan kawasan perdesaan dalam pengembangan wilayah. Keterkaitan produksi, distribusi, dan konsumsi antar desa adalah sebagai representasi peran dan hubungan masing – masing desa dalam kesatuan wilayah kawasan perdesaan sebagai sentra input, produksi, dan pasca produksi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian akan muncul keterkaitan antar desa yang mengintegrasikan aktivitas agrobisnis dan industri untuk penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan ekonomi lokal.



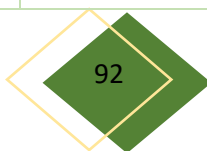


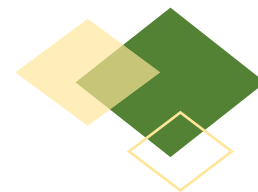
### 5.2.2.1 Pusat Produksi

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa untuk pusat kawasan produksi terdapat di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari untuk semua komoditas unggulan yaitu jeruk manis, buah naga, jagung, kedelai, kelapa, sapi, ayam, kambing etawa dan bebek.

**Tabel 5.4 Pusat Produksi Kawasan Perdesaan Alas Purwo**

No	Komoditas	Pusat	Pendukung
1	Jeruk Manis	Patoman	Plampangrejo
			Kalipait
			Kedunggebang
			Kaliploso
2	Buah Naga	Patoman	Sumberasri
			Kaliploso
			Kedunggebang
			Kalipait
			Plampangrejo
3	Jagung	Patoman	Sumberasri
			Plampangrejo
			Kalipait
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			kedungringin
			Kedunggebang
Blimbingsari			
4	Kedelai	Patoman	Kedungrejo
			Sumber beras
			Kalipait
5	Kelapa	Patoman	Sumberberas
			Sumberasri
			Plampangrejo
6	Sapi	Patoman	Kaliploso
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			Kedunggebang
			Sumberasri
			Plampangrejo
			Blimbingsari
Kalipait			



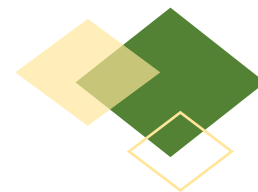


No	Komoditas	Pusat	Pendukung
7	Ayam	Patoman	Kaliploso
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			Kedunggebang
			Kalipait
			Sumberasri
			Blimbingsari
			Plampangrejo
8	Kambing Etawa	Patoman	Kedunggebang
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			Sumberasri
			Plampangrejo
9	Bebek	Patoman	Blimbingsari
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Kedunggebang
			Kalipait
			Sumberasri
			Plampangrejo
10	Perikanan	Kedungrejo	Blimbingsari
			Wringinputih
			Kalipait

*Sumber: Hasil Survei*

#### 5.2.2.2 Pusat Pengolahan

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa untuk pusat kawasan pengolahan komoditas jeruk manis, jagung dan kedelai terdapat di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo. Untuk komoditas buah naga pusat pengolahan terdapat di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo, untuk komoditas kelapa pusat pengolahan terdapat di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, untuk komoditas sapi pusat pengolahan terdapat di Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo, untuk komoditas ayam pusat pengolahan terdapat di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring, untuk komoditas kambing etawa pusat pengolahan terdapat di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo, dan untuk komoditas bebek pusat pengolahan terdapat di Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari serta untuk komoditas perikanan pusat pengolahan terdapat di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar.



**Tabel 5.5 Pusat Pengolahan Kawasan Perdesaan Alas Purwo**

No	Komoditas	Pusat	Pendukung
1	Jeruk Manis	Sumberasri	Plampangrejo
			Kalipait
			Kedunggebang
			Kaliploso
2	Buah Naga	Grajagan	Patoman
			Kaliploso
			Kedunggebang
			Kalipait
			Plampangrejo
			Sumberasri
3	Jagung	Sumberasri	Plampangrejo
			Kalipait
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			kedungringin
			Kedunggebang
			Blimbingsari
Patoman			
4	Kedelai	Sumberasri	Kedungrejo
			Sumber beras
			Kalipait
5	Kelapa	Patoman	Sumberberas
			Sumberasri
			Plampangrejo
6	Sapi	Kalipait	Kaliploso
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			Kedunggebang
			Sumberasri
			Plampangrejo
			Blimbingsari
Patoman			

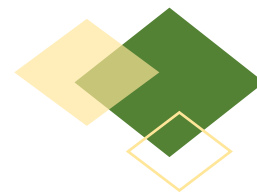


No	Komoditas	Pusat	Pendukung
7	Ayam	Plampangrejo	Kaliploso
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			Kedunggebang
			Kalipait
			Sumberasri
			Blimbingsari
			Patoman
8	Kambing Etawa	Kedunggebang	Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberberas
			Sumberasri
			Plampangrejo
			Patoman
			Plampangrejo
9	Bebek	Blimbingsari	Kedungrejo
			Wringinputih
			Kedunggebang
			Kalipait
			Sumberasri
			Plampangrejo
			Patoman
10	Perikanan	Kedungrejo	Blimbingsari
			Wringinputih
			Kalipait

*Sumber: Hasil Survei*

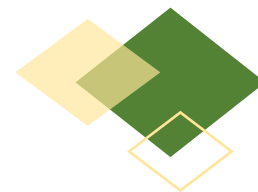
### 5.2.2.3 Pusat Pemasaran

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa untuk pusat kawasan pemasaran terdapat di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldimo untuk semua komoditas unggulan yaitu jeruk manis, buah naga, jagung, kedelai, kelapa, sapi, ayam, kambing etawa dan bebek.



**Tabel 5.6 Pusat Pemasaran Kawasan Perdesaan Alas Purwo**

No	Komoditas	Pusat	Pendukung
1	Jeruk Manis	Sumberberas	Plampangrejo
			Kalipait
			Sumberasri
			Kaliploso
2	Buah Naga	Sumberberas	Patoman
			Kaliploso
			Sumberasri
			Kalipait
			Plampangrejo
3	Jagung	Sumberberas	Plampangrejo
			Kalipait
			Kedungrejo
			Wringinputih
			kedungringin
			Sumberasri
			Blimbingsari
			Patoman
4	Kedelai	Sumberberas	Kedungrejo
			Kalipait
5	Kelapa	Sumberberas	Patoman
			Sumberasri
			Plampangrejo
6	Sapi	Sumberberas	Kaliploso
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberasri
			Plampangrejo
			Blimbingsari
			Patoman
			Kalipait
7	Ayam	Sumberberas	Kaliploso
			Kedungrejo
			Wringinputih
			Plampangrejo
			Kalipait
			Sumberasri
			Blimbingsari
			Patoman

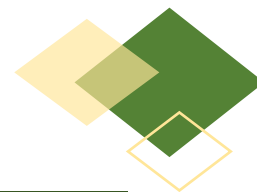


No	Komoditas	Pusat	Pendukung
8	Kambing Etawa	Sumberberas	Kedungrejo
			Wringinputih
			Sumberasri
			Plampangrejo
			Patoman
9	Bebek	Sumberberas	Kedungrejo
			Wringinputih
			Blimbingsari
			Kalipait
			Sumberasri
			Plampangrejo
			Patoman
10	Perikanan	Sumberberas	Kedungrejo
			Blimbingsari
			Wringinputih
			Kalipait

Sumber: Hasil Survei

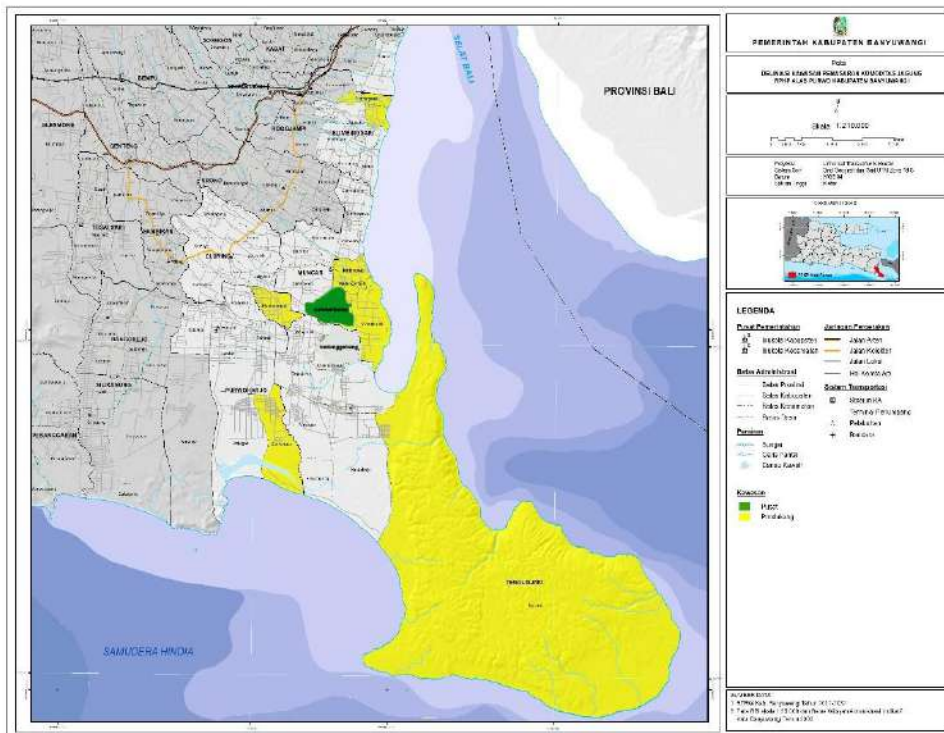
### 5.3 Pengembangan Jejaring Kawasan Perdesaan

Pembangunan perekonomian suatu daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan komoditas unggulan. Namun demikian, agar pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan dampak pengganda yang besar bagi komoditas lainnya, maka seyogyanya pengembangan komoditas unggulan daerah dimaksud didesain melalui basis klaster (*clustering*). Dengan berbasis klaster, maka pengembangan komoditas unggulan daerah memperhatikan keterkaitan (*linkages*) dengan unsur-unsur pendukungnya (industri input/pemasok, BDS, Perguruan Tinggi, Pasar dan sebagainya), sehingga tercipta keterkaitan yang kuat dan mampu menopang pengembangan komoditas unggulan secara berkelanjutan.



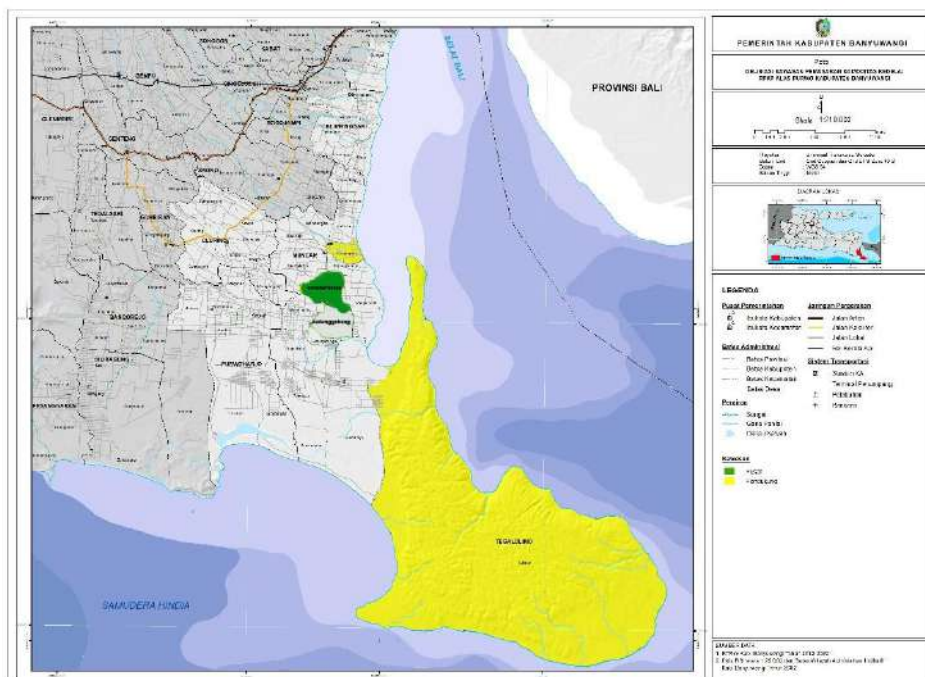
### 5.3.1 Kawasan Pemasaran

#### ➤ Komoditas Jagung

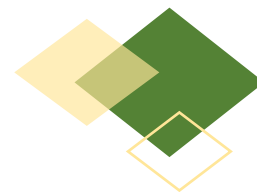


Gambar 5.4 Kawasan Pemasaran Komoditas Jagung

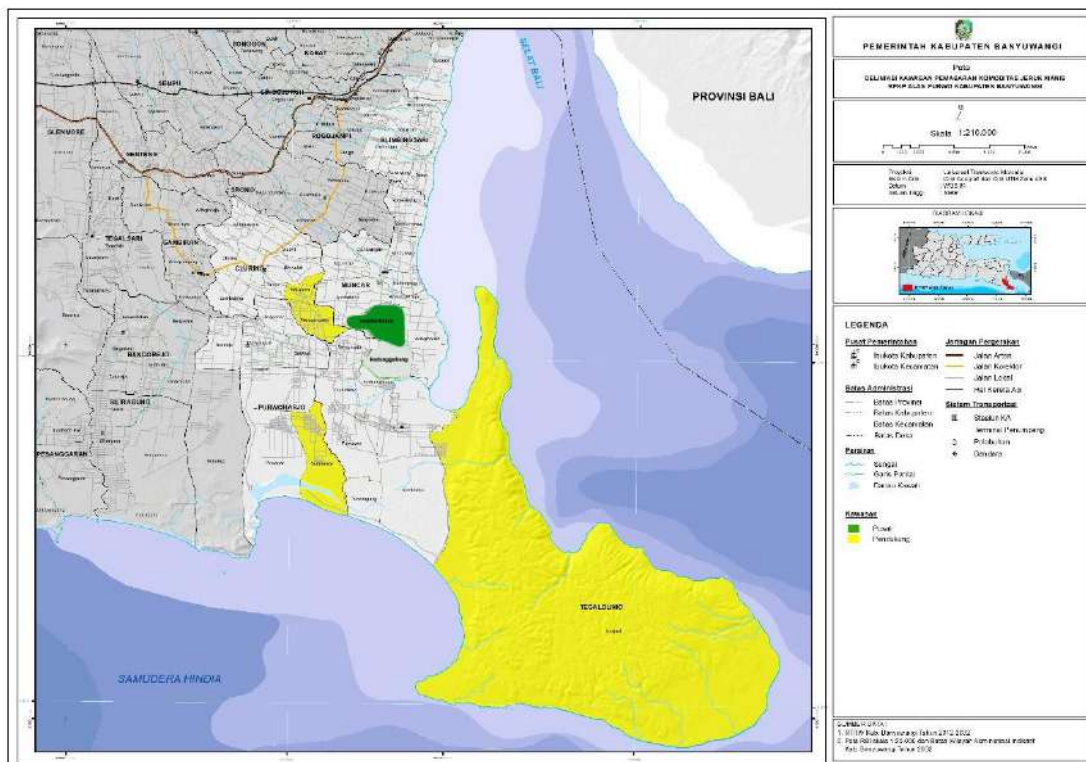
#### ➤ Komoditas Kedelai



Gambar 5.5 Kawasan Pemasaran Komoditas Kedelai

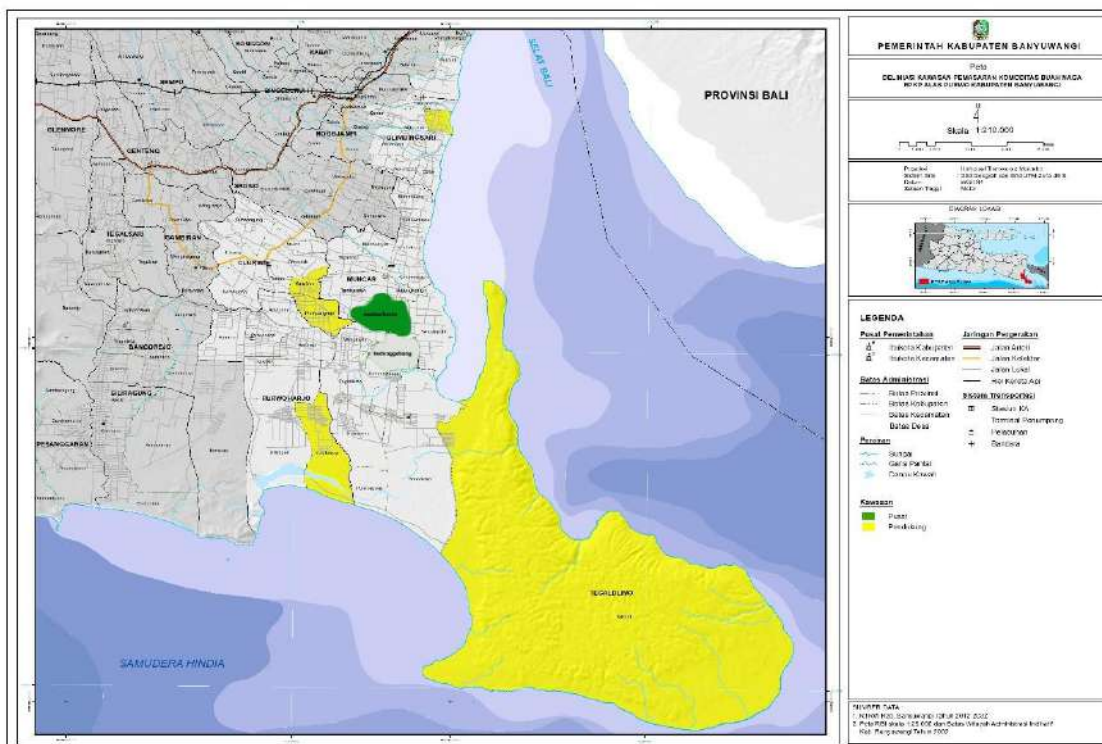


➤ **Komoditas Jeruk Manis**



**Gambar 5.6 Kawasan Pemasaran Komoditas Jeruk Manis**

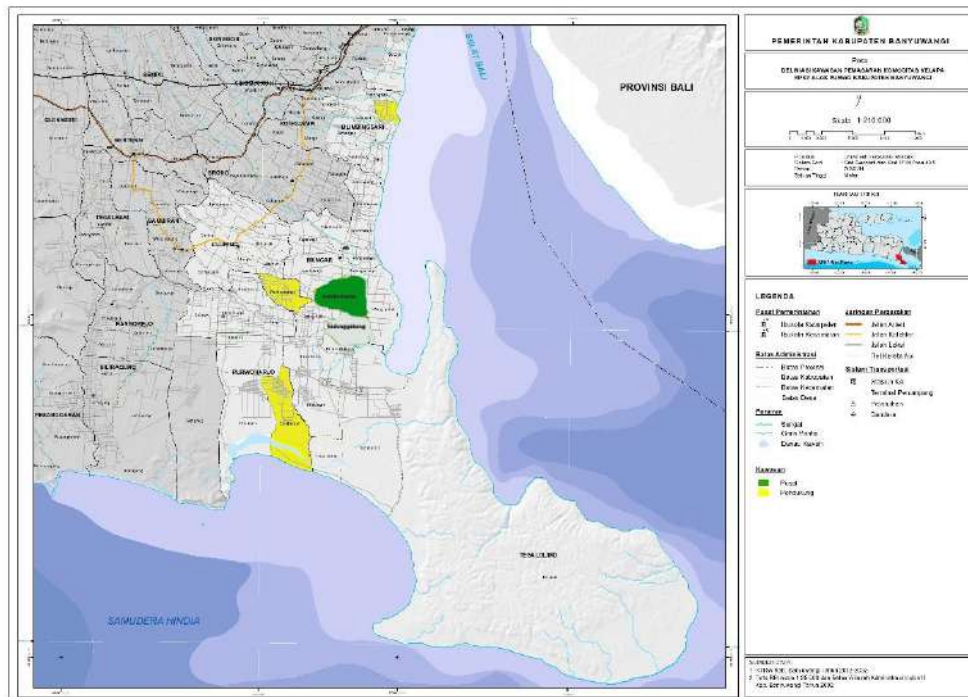
➤ **Komoditas Buah Naga**



**Gambar 5.7 Kawasan Pemasaran Komoditas Buah Naga**

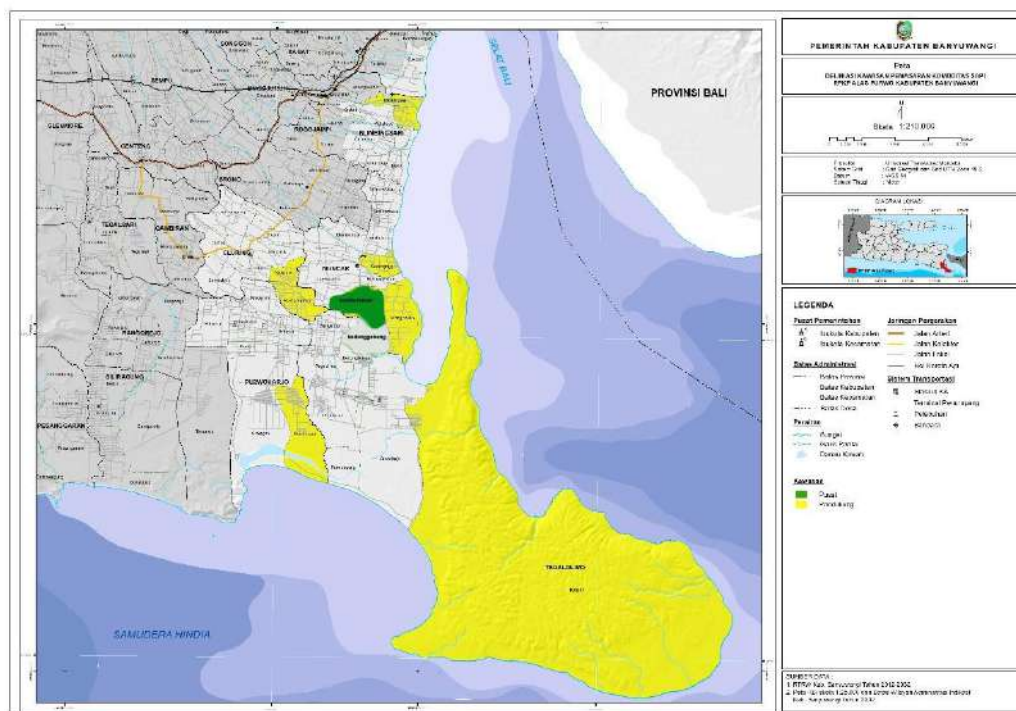


➤ **Komoditas Kelapa**

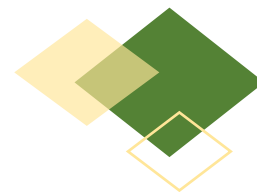


**Gambar 5.8 Kawasan Pemasaran Komoditas Kelapa**

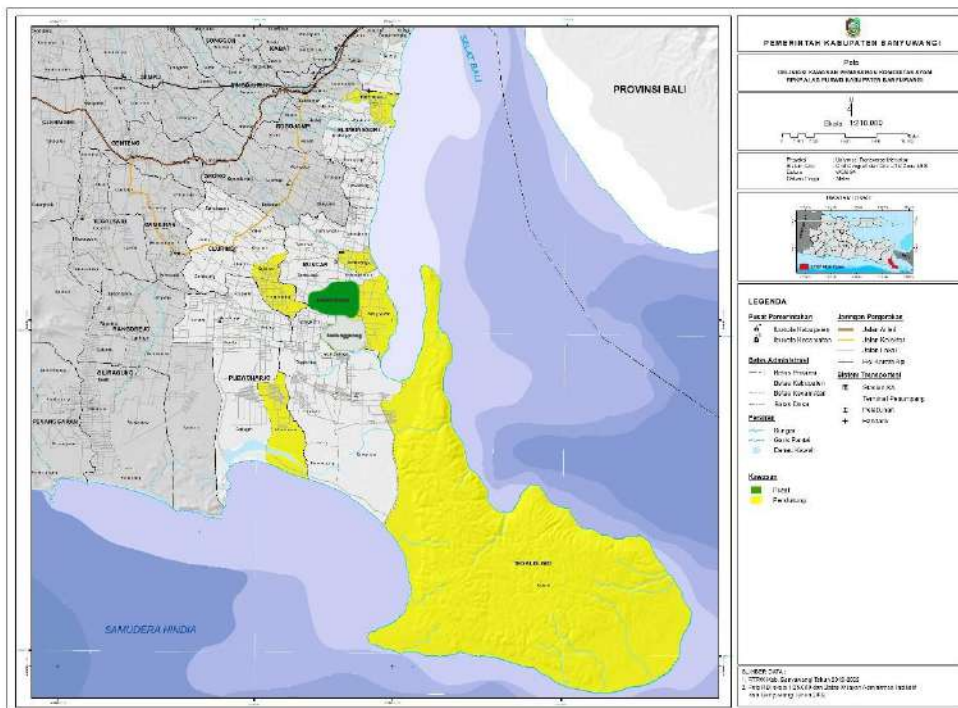
➤ **Komoditas Sapi**



**Gambar 5.9 Kawasan Pemasaran Komoditas Sapi**

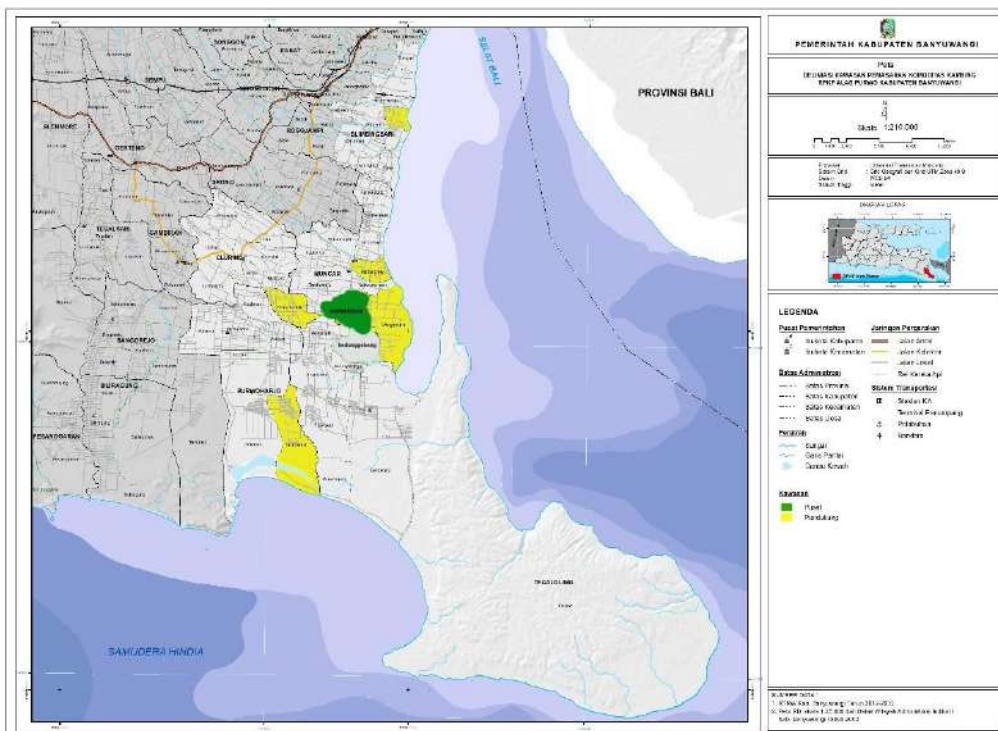


➤ **Komoditas Ayam**



**Gambar 5.10 Kawasan Pemasaran Komoditas Ayam**

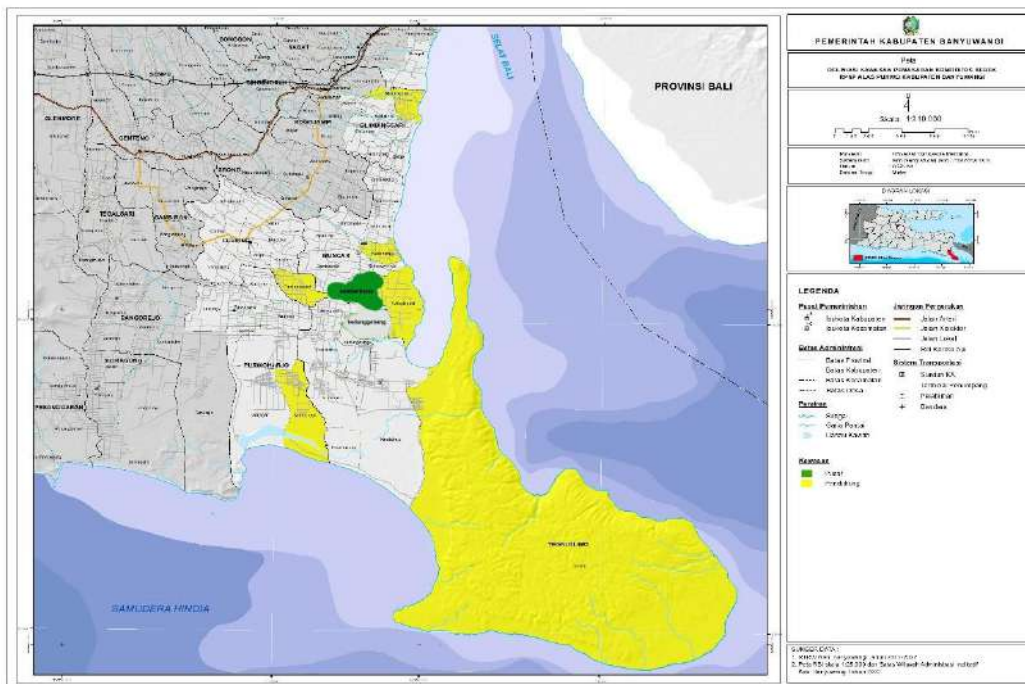
➤ **Komoditas Kambing Etawa**



**Gambar 5.11 Kawasan Pemasaran Komoditas Kambing Etawa**

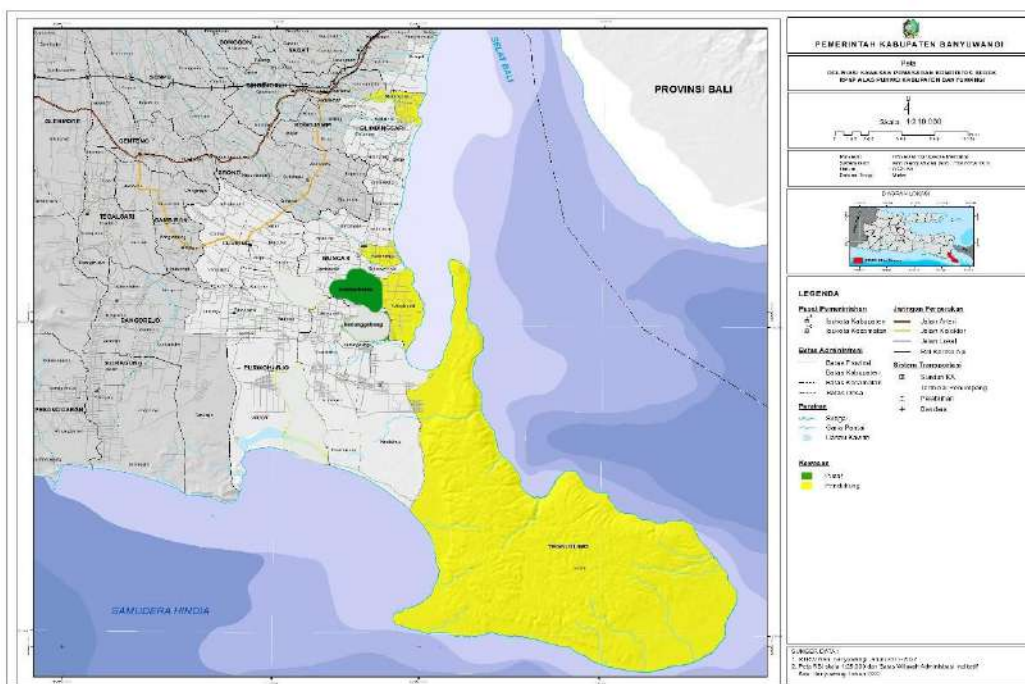


➤ **Komoditas Bebek**

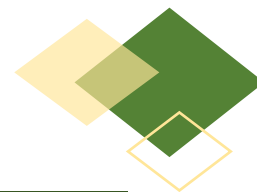


**Gambar 5.12 Kawasan Pemasaran Komoditas Bebek**

➤ **Komoditas Perikanan**

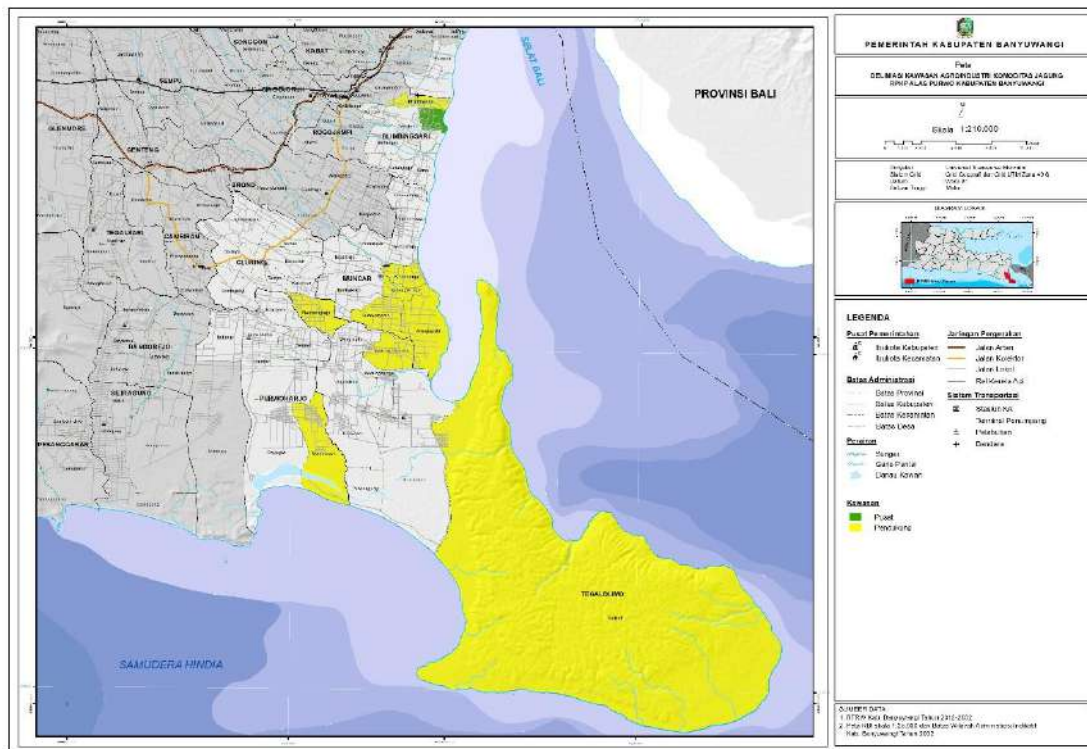


**Gambar 5.13 Kawasan Pemasaran Komoditas Perikanan**



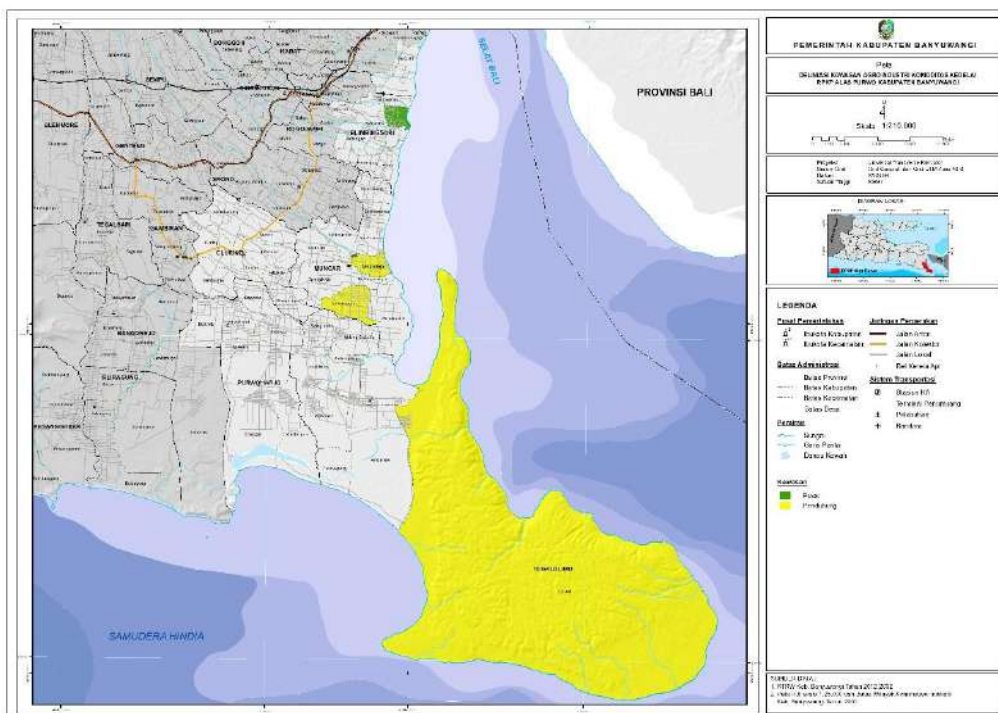
### 5.3.2 Kawasan Agroindustri

#### ➤ Komoditas Jagung



Gambar 5.14 Kawasan Agroindustri Komoditas Jagung

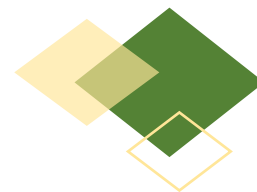
#### ➤ Komoditas Kedelai



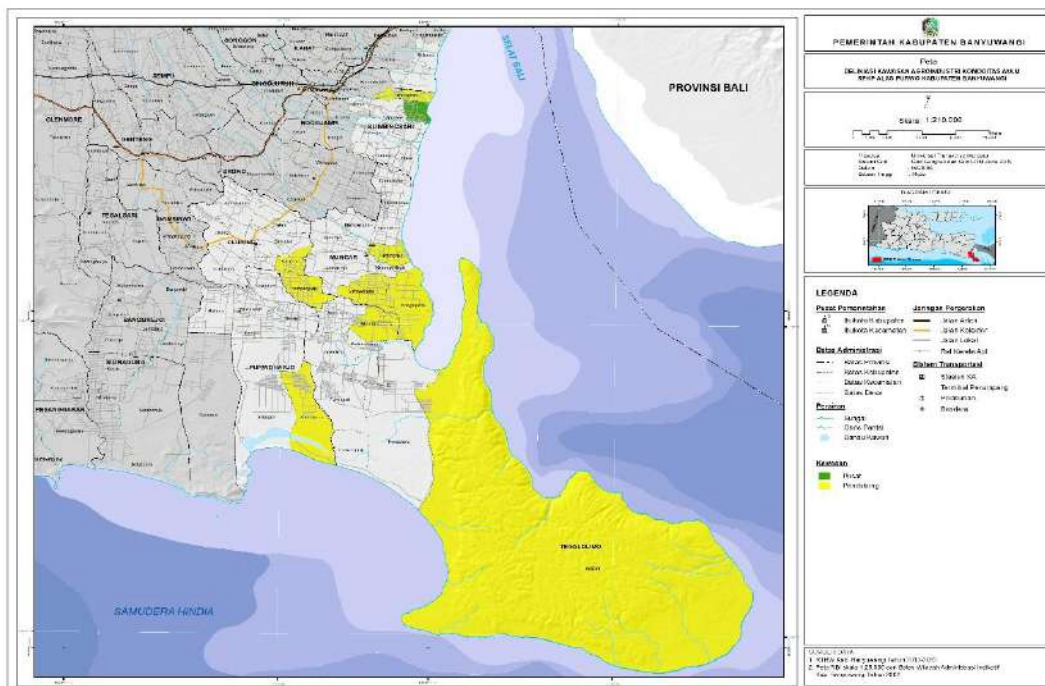
Gambar 5.15 Kawasan Agroindustri Komoditas Kedelai





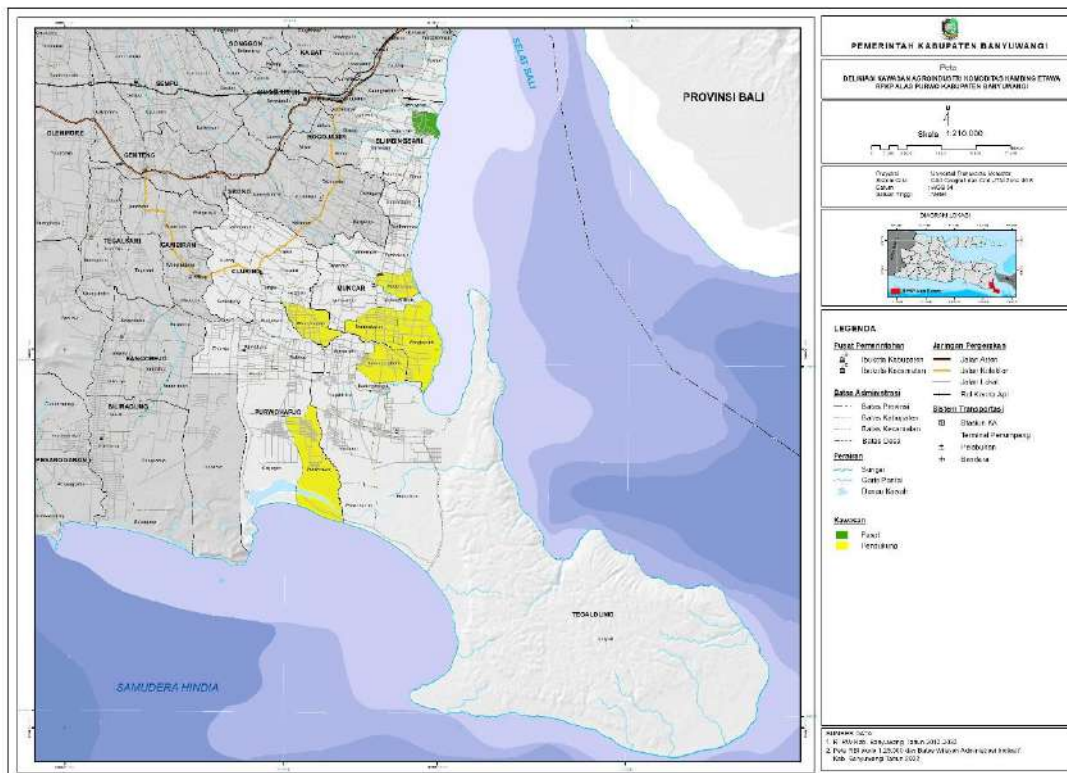


➤ **Komoditas Ayam**



**Gambar 5.20 Kawasan Agroindustri Komoditas Ayam**

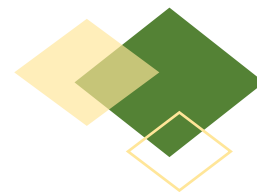
➤ **Komoditas Kambing Etawa**



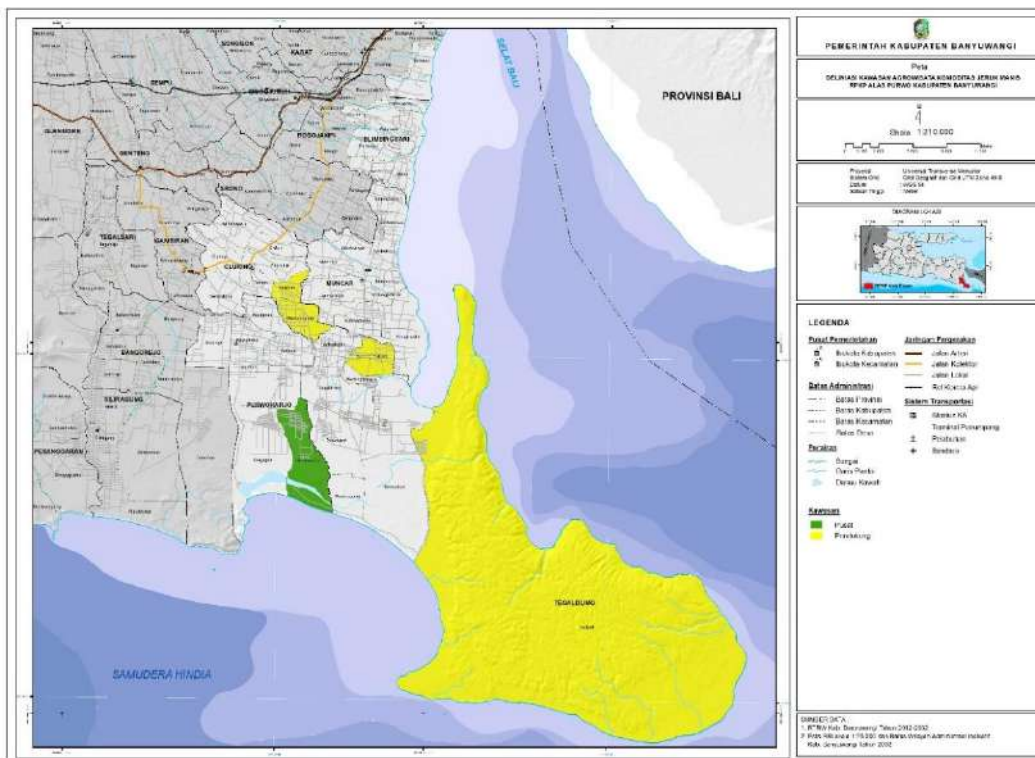
**Gambar 5.21 Kawasan Agroindustri Komoditas Kambing Etawa**





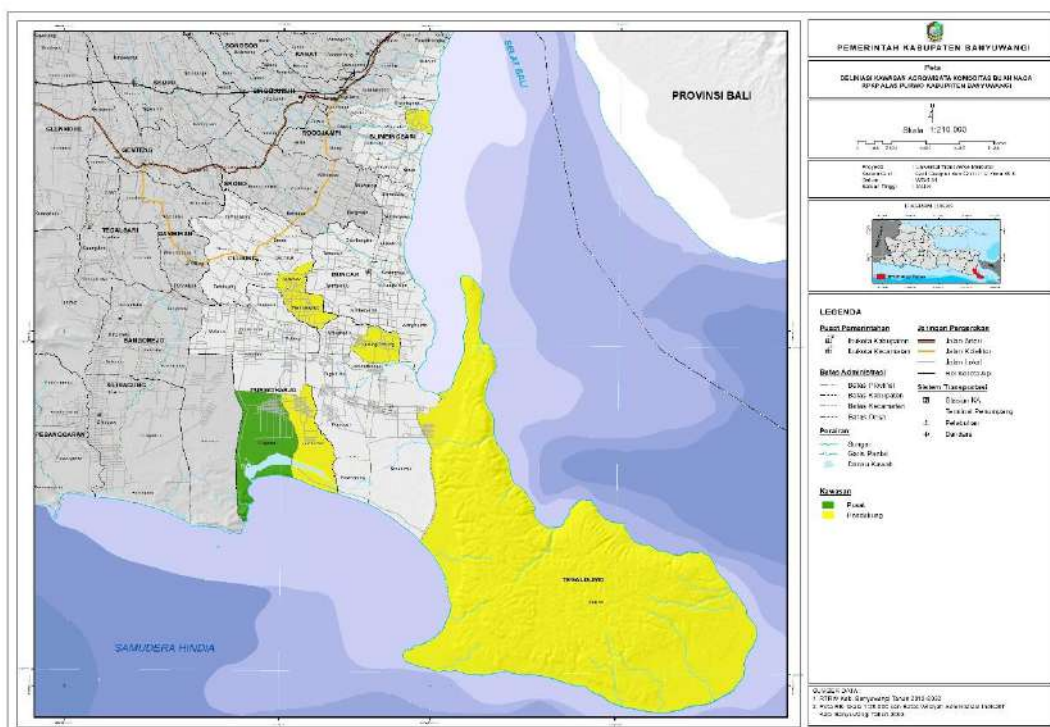


### 3. Komoditas Jeruk Manis



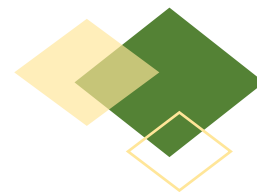
Gambar 5.26 Kawasan Agrowisata Komoditas Jeruk Manis

### 4. Komoditas Buah Naga

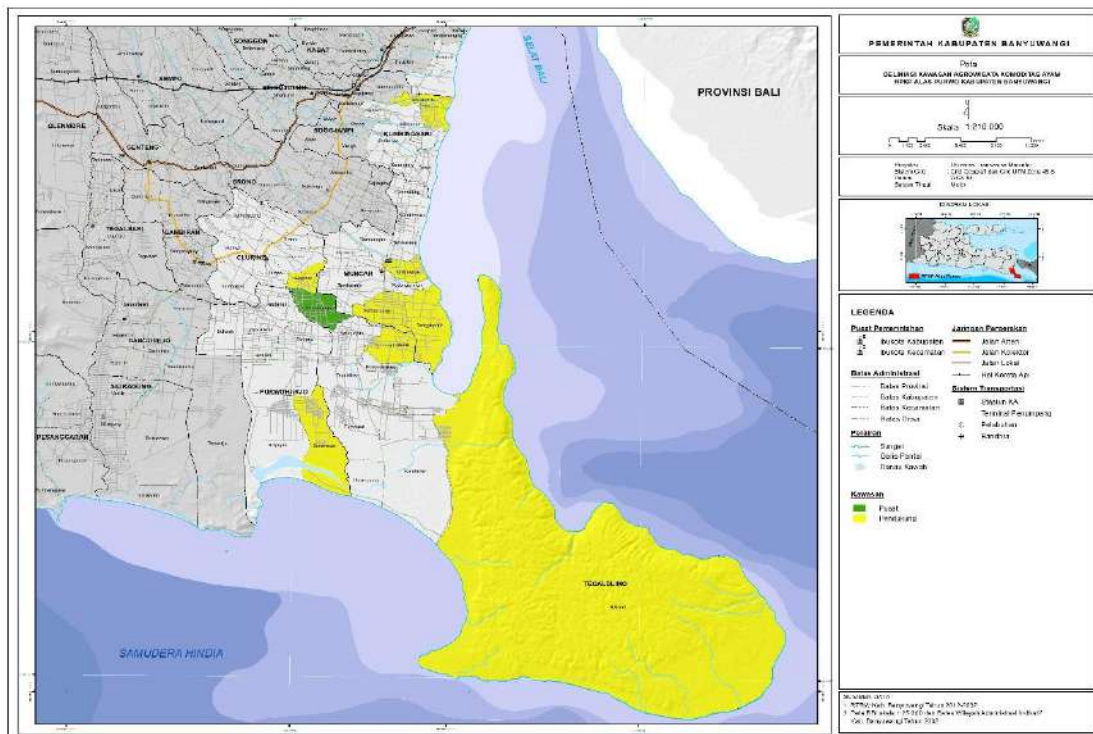


Gambar 5.27 Kawasan Agrowisata Komoditas Buah Naga



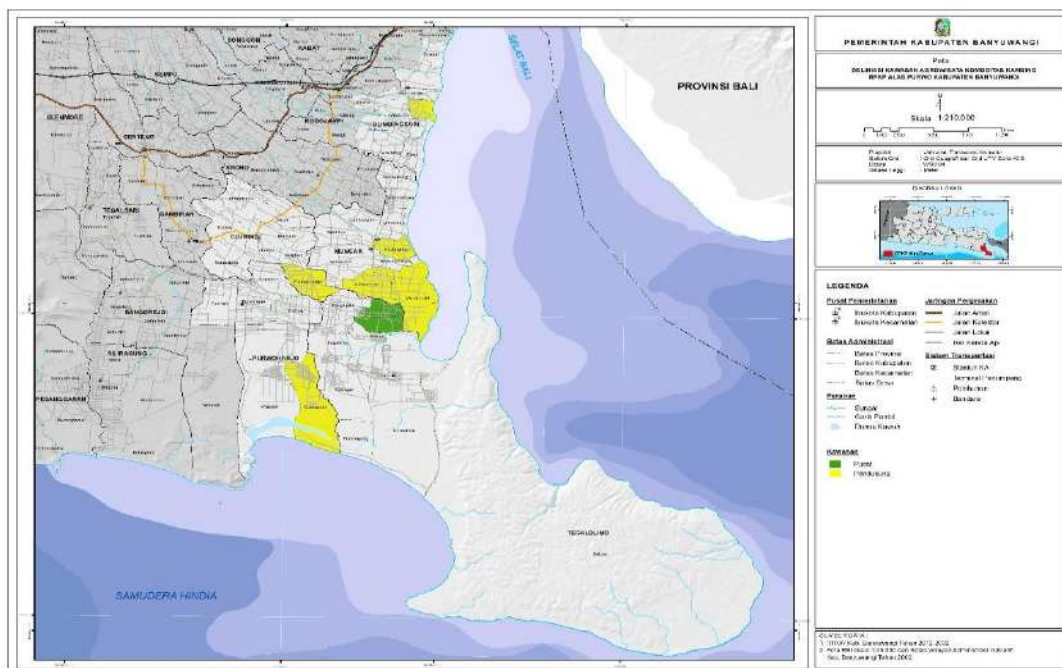


### 7. Komoditas Ayam

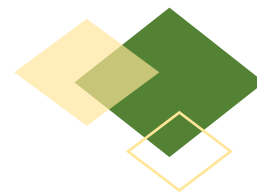


Gambar 5.30 Kawasan Agrowisata Komoditas Ayam

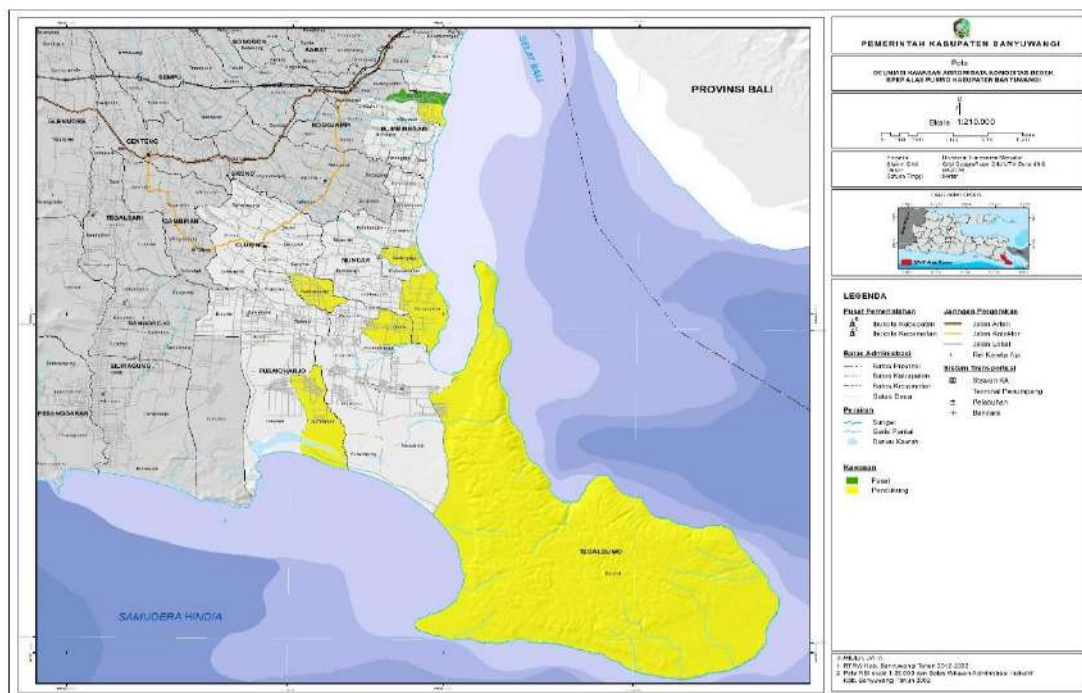
### 8. Komoditas Kambing Etawa



Gambar 5.31 Kawasan Agrowisata Komoditas Kambing Etawa

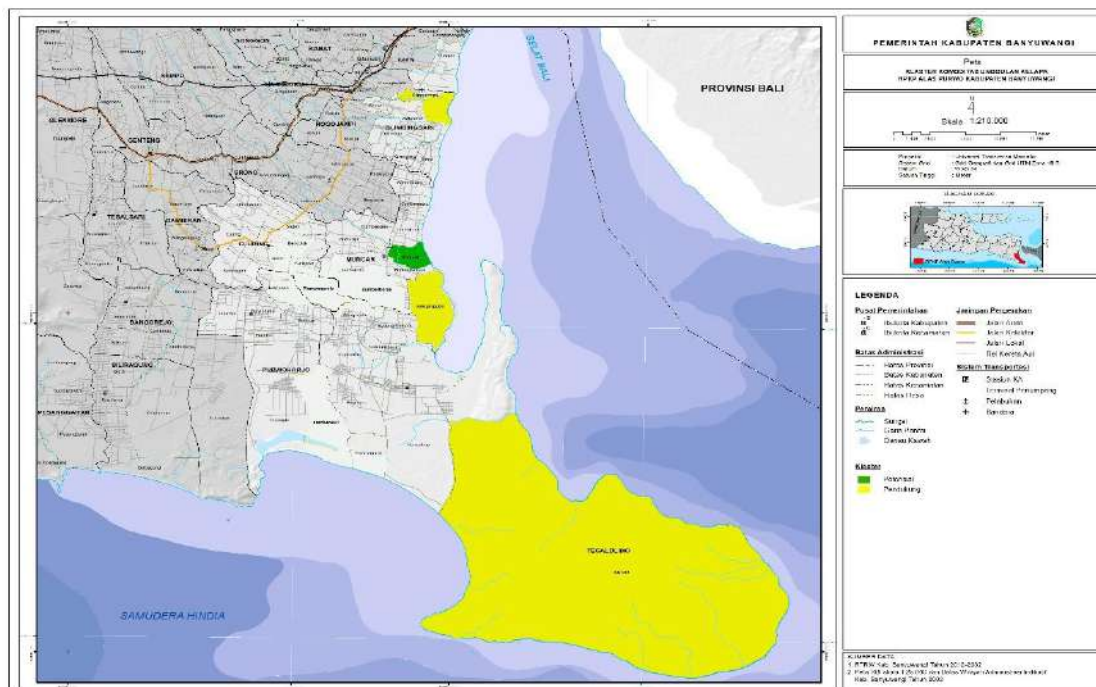


### 9. Komoditas Bebek

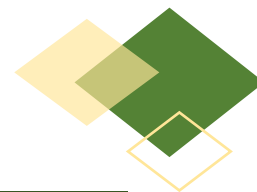


Gambar 5.32 Kawasan Agrowisata Komoditas Bebek

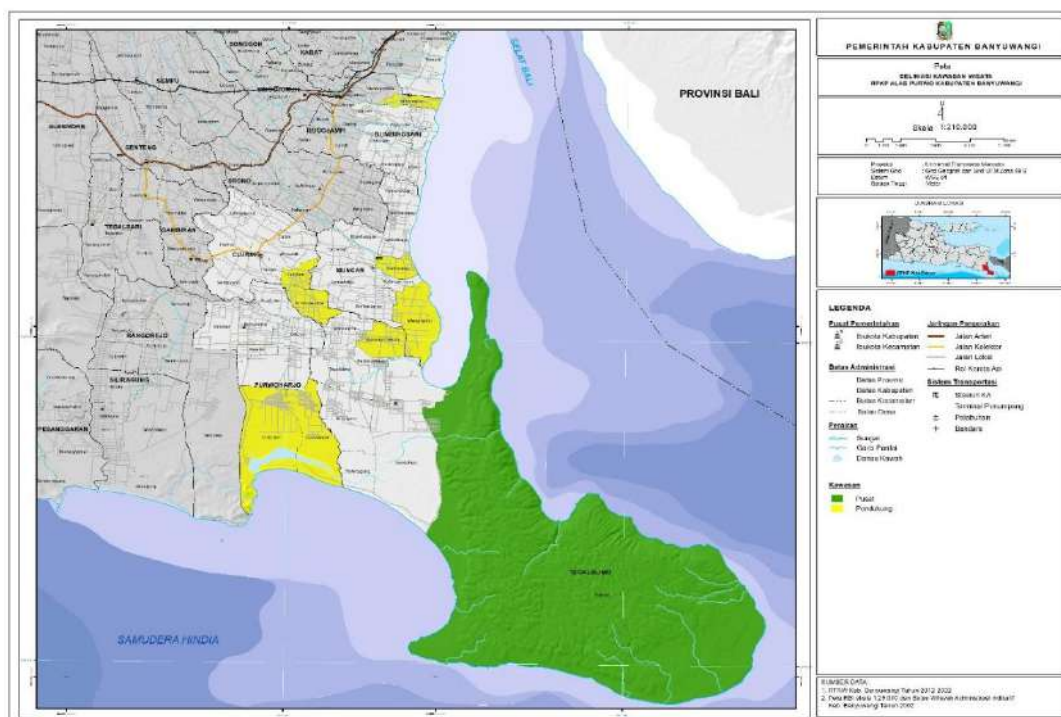
### 10. Komoditas Perikanan



Gambar 5.33 Kawasan Agrowisata Komoditas Perikanan



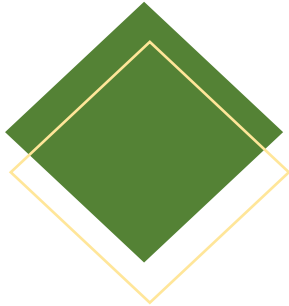
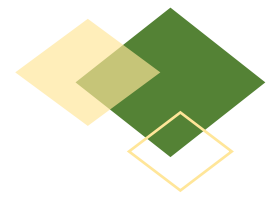
### 5.3.4 Kawasan Wisata



Gambar 5.34 Kawasan Wisata Selingkar Alas Purwo

Tabel 5.7 Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan Alas Purwo

No	Desa	Destinasi Wisata
1	Kaliploso	Agowisata Kebun Alqur'an (AKA)
2	Kedungrejo	Pelabuhan Ikan Muncar
3	Wringinputih	Ekowisata Mangrove Pantai Cemara
4	Kedunggebang	Ekowisata Mangrove Wisata Kili-Kili
5	Sumberasri	Wisata Mangrove Bedul
6	Kalipait	Taman Nasional Alas Purwo Pantai G land Pura Giri Salaka Cagar Budaya Situs Kawitan Goa Istana Air Terjun Kalipait
7	Grajagan	Pantai Grajagan
8	Plampangrejo	Bendungan DAM
9	Blimbingsari	Pantai Blimbingsari Wisata Kuliner
10	Patoman	Pantai Blibis



## BAB VI

# KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

### 6.1 Potensi dan Permasalahan

#### 6.1.1 Potensi

Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo memiliki potensi beragam mulai dari potensi wisata hingga pertanian. Berikut beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo:

- Potensi Wisata :
  1. Pantai Blimbingsari
  2. Pantai G land
  3. Pantai Cemara
  4. Wisata Kili-Kili
  5. Ekowista Mangrove
  6. Pantai Grajagan
  7. Agrowisata Kebun Alqur'an
  8. Bendungan DAM, dll.
- Pertanian Tanaman Pangan :
  1. Padi
  2. Jagung
  3. Kedelai
- Holtikultura :
  1. Buah Jeruk Manis
  2. Buah Naga
- Perkebunan
  1. Kelapa
- Peternakan :
  1. Sapi
  2. Ayam
  3. Kambing Etawa
  4. Bebek
- Perikanan

#### 6.1.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pengembangan produk unggulan kawasan selingkar alaspurwo diantaranya:

##### a) Permasalahan pada wisata selingkar Alas Purwo

1. Aksesibilitas menuju lokasi wisata yang cukup jauh
2. Kondisi infrastruktur jalan menuju lokasi wisata yang kurang memadai
3. Konektivitas transportasi menuju lokasi wisata yang masih kurang
4. Sarana dan prasarana dilokasi wisata yang kurang memadai
5. Promosi wisata yang masih kurang intensif



6. Kelembagaan pokdarwis yang masih kurang optimal
7. Pandemic covid 19 yang mengakibatkan mobilitas wisatawan menurun

**b) Permasalahan pada potensi Jeruk**

1. Produksi dan produktivitas jeruk yang masih kurang optimal
2. Efektivitas biaya produksi tanaman jeruk
3. Fluktuasi harga jual jeruk
4. Skala usaha produksi jeruk yang masih kecil
5. Aksesibilitas pemasaran jeruk yang masih kurang
6. Produksi olahan berbahan jeruk masih kurang berkembang

**c) Permasalahan pada potensi buah Naga**

1. Fluktuasi harga jual yang terkadang terlalu rendah disaat panen raya
2. Penggunaan bahan yang tidak aman untuk pembesaran buah naga.
3. Efektivitas biaya produksi buah naga yang kurang terutama dengan teknologi penyinaran
4. Pemasaran buah naga yang kurang berkembang
5. Produk olahan buah naga masih kurang berkembang

**d) Permasalahan pada potensi jagung**

1. Harga jual jagung yang masih rendah
2. Teknologi pertanian yang masih kurang berkembang
3. Produksi dan produktivitas yang masih kurang optimal
4. Alih fungsi lahan ke pertanian hortikultur
5. Pemasaran hasil pertanian masih terbatas
6. Belum mampu terkoneksi dengan industri besar
7. Produk olahan berbahan jagung masih kurang berkembang

**e) Permasalahan pada potensi kedelai**

1. Tingkat produksi dan produktivitas masih kurang optimal
2. Persaingan dengan kedelai impor
3. Fluktuasi harga jual yang terlalu rendah
4. Jalur perdagangan yang masih panjang
5. Konektivitas dengan industry hilir masih rendah
6. Produk olahan masih kurang berkembang

**f) Permasalahan potensi kelapa**

1. Kurang optimalnya perawatan tanamah kelapa
2. Permasalahan penjualan janur yang mengganggu produksi buah kelapa
3. Menurunnya produktivitas nira kelapa
4. Pemanfaatan produk olahan kelapa yang masih rendah



5. Produk olahan gula kelapa yang menggunakan bahan kurang aman (sulfide)
6. Kurang terkoneksi dengan industry pengolahan
7. Berkurangnya populasi pohon kelapa

**g) Permasalahan pada ternak Sapi**

1. Perawatan ternak yang masih tradisional
2. Tingkat kelahiran pedet yang masih kurang optimal
3. Pakan ternak
4. Pengolahan produk hasil ternak yang kurang optimal

**h) Permasalahan pada potensi ayam**

1. Fluktuasi harga jual ayam
2. Fluktuasi harga pakan ayam
3. Tingginya obat-obatan ayam
4. Rantai distribusi yang kurang optimal

**i) Permasalahan pada potensi kambing etawa**

1. Sulitnya perawatan kambing etawa
2. Produk olahan kambing etawa yang kurang berkembang
3. Teknologi pengolahan yang masih kurang berkembang
4. Kesulitan pemasaran produk olahan kambing etawa

**j) Permasalahan pada potensi bebek**

1. Teknologi perawatan bebek yang masih sederhana
2. Permintaan bebek yang masih rendah
3. Produk pengolahan bebek yang masih terbatas

**k) Permasalahan pada potensi perikanan**

1. Teknologi pengolahan perikanan yang masih sederhana
2. Produk pengolahan perikanan yang masih terbatas

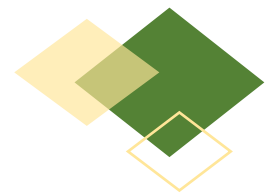
## 6.2 Isu Strategis

### 6.2.1 Isu Internal

#### A. Kekuatan

1. Potensi wisata yang beragam, asri dan indah sebagai daya tarik wisata.
2. Potensi sumberdaya alam yang berlimpah mulai pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perikanan sampai kehutanan
3. Desa kawasan didukung masyarakat yang memiliki historis dan pengalaman untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah
4. Kawasan wisata telah memiliki kelembagaan pokdarwis





5. Telah adanya kelompok pertanian baik kelompok tani maupun kelompok pengolahan hasil pertanian
6. Kawasan perdesaan telah memiliki potensi unggulan pertanian yaitu buah naga dan jeruk
7. Tersedianya sarana pendukung pengembangan pariwisata seperti bandara, penginapan

#### **B. Kelemahan**

1. Aksesibilitas lokasi wisata cukup jauh
2. Kondisi infrastruktur jalan penghubung yang masih kurang baik
3. Transportasi penghubung yang masih kurang
4. Pengelolaan potensi wisata yang belum optimal
5. Belum optimalnya teknologi pertanian dan perikanan
6. Inovasi pengembangan produk pengolahan hasil pertanian dan perikanan masih kurang berkembang
7. Keterampilan kelompok pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang masih rendah
8. Inovasi pertanian buah naga kurang efektif (teknik penyinaran boros listrik)

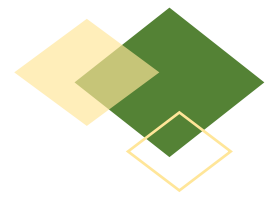
### **6.2.2 Isu Eksternal**

#### **A. Peluang**

1. Perkembangan teknologi pertanian dan perikanan yang berkembang pesat guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
2. Perkembangan teknologi pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang berkembang cepat
3. Perkembangan teknologi e-commerce dalam menunjang pemasaran potensi pariwisata, pertanian dan perikanan
4. Promosi pariwisata yang cukup masih mendukung peningkatan kunjungan wisata

#### **B. Ancaman**

1. Fluktuasi harga produk pertanian dan perikanan di pemasaran
2. Ancaman produk pertanian dan perikanan dari daerah penghasil lainnya
3. Tenaga kerja sektor pertanian dan perikanan yang semakin berkurang
4. Persaingan promosi wisata dari daerah lain
5. Perkembangan penanganan covid 19 yang mengancam industri pariwisata
6. persaingan produk olahan dari industri besar



### 6.3 Tujuan dan Sasaran

**A. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo adalah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan Daya Tarik Wisata Kawasan
2. Mengembangkan Komoditas Unggulan Kawasan
3. Mengembangkan Potensi Agro Ke Arah Agro Education dan Agro Konservasi
4. Mengembangkan Sentra Pengolahan Potensi Unggulan Agro
5. Mengembangkan Jaringan Pemasaran
6. Meningkatkan Tata Kelola Lembaga Ekonomi Kawasan
7. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kawasan

**B. Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo adalah sebagai berikut:**

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Kawasan
3. Terbentuknya Konektivitas Antar Destinasi Wisata Kawasan
4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Kawasan
5. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditas Unggulan Kawasan
6. Meningkatnya Teknologi Pertanian
7. Berkembangnya Sentra Usaha Produk Olahan Kawasan
8. Meningkatnya Jaringan Pemasaran
9. Meningkatnya Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)
10. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa Kawasan

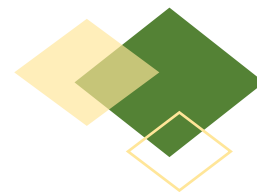
### 6.4 Visi dan Misi

Dengan tema kawasan “**Agroecoedu Wisata**” maka perumusan visi pada Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo adalah sebagai berikut:

**“Menjadikan Selingkar Alas Purwo Sebagai Wisata Berbasis CBT”**

Misi pada kawasan perdesaan selingkar alas purwo adalah sebagai berikut

1. Menjadikan Kawasan Selingkar Alas Purwo Pusat Wisata Alam
2. Memajukan Potensi Unggulan Berbasis Agro (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan)
3. Pengembangan Potensi Agroindustri
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat



## 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan

### 6.5.1 Strategi Pembangunan Potensi Unggulan Kawasan

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis pada kawasan perdesaan maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

#### A. Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

1. Intensifikasi pemanfaatan teknologi tepat guna produksi pertanian dan perikanan
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna produk olahan hasil pertanian dan perikanan
3. Kerjasama dan pemanfaatan teknologi pemasaran
4. Perbaikan sarana dan prasarana wisata serta optimalisasi promosi pariwisata

#### B. Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang

1. Optimalisasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna produksi pertanian dan perikanan
2. Optimalisasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna produk olahan hasil pertanian dan perikanan
3. Optimalisasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi pemasaran
4. Optimalisasi promosi Pariwisata

#### C. Strategi Berdasarkan Kekuatan Dan Ancaman

1. Pemanfaatan informasi harga pasar dan peningkatan pasar
2. Penguatan kualitas dan branding produk pertanian dan perikanan
3. Penguatan kader pertanian dan perikanan
4. Penguatan branding wisata
5. Peningkatan fasilitas protokol kesehatan di area wisata
6. Peningkatan kualitas dan konektivitas pemasaran produk hasil olahan

#### D. Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

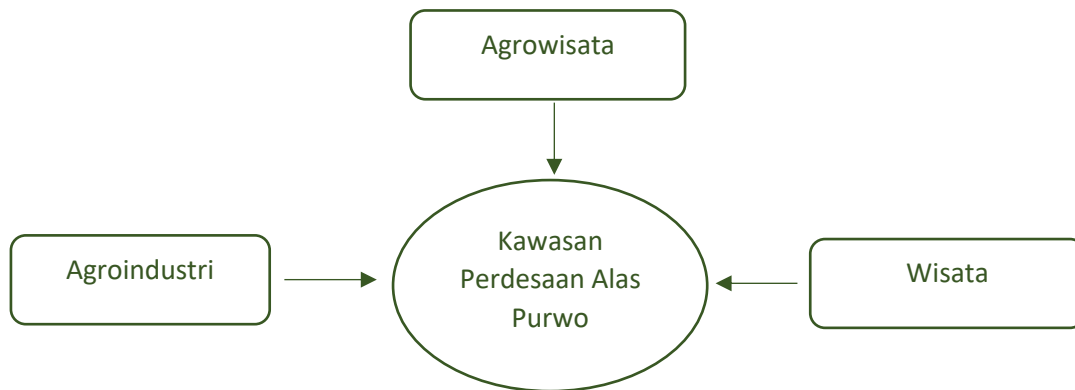
1. Peningkatan kualitas produk pertanian dengan pemanfaatan teknologi tepat guna
2. Peningkatan fasilitas dan konektivitas lokasi wisata
3. Peningkatan kualitas dan konektivitas pemasaran hasil olahan pertanian dan perikanan

### 6.5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Potensi Unggulan

Berdasarkan tema pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo yang akan dijadikan kawasan *agroecoedu tourism* atau wisata yang dikembangkan kearah wisata alam,



agrowisata dan wisata edukasi. Berdasarkan tujuan pengembangan kawasan perdesaan selingkar Alas Purwo tersebut maka arah kebijakan kedepan sebagai berikut:

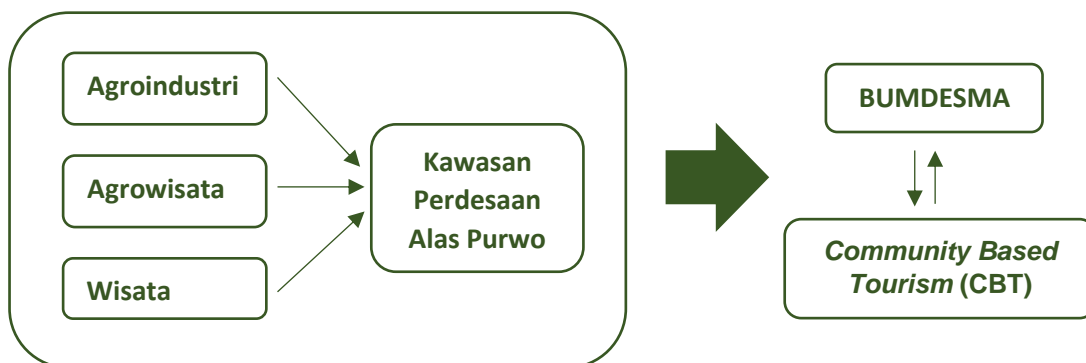


**Gambar 6.1 Sinkronisasi Kawasan Perdesaan Alas Purwo**

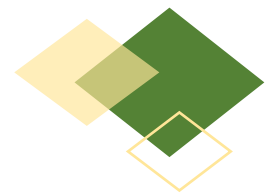
*Sumber: Data Diolah Penulis*

#### A. Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo

Dalam pembangunan Kawasan Perdesaan membutuhkan model sinergisme berikut model sinergisme pengembangan di Kawasan Perdesaan Alas Purwo:



BUMDESMA adalah *Badan Usaha Milik Desa Bersama* yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa. **BUMDESMA** ada sebagai “*usaha bersama*”, atau sebagai induk dari usaha BUMDes yang ada di desa-desa, di mana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDESMA agar usaha di setiap desa bisa semakin berkembang serta berdaya bersama. BUMDESMA pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa-desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDESMA sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdesma pada umumnya, yaitu:



1. Meningkatkan perekonomian antar desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa-desa;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi antar desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Dalam pembangunan kawasan perdesaan Alas Purwo yang terbagi kedalam 3 jenis potensi yaitu kawasan Agroindustri, Agrowisata dan Wisata, usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDESMA adalah melakukan kerjasama dengan BUMDes di masing-masing desa, Pokdarwis, dan Masyarakat. Berikut merupakan kegiatan atau event rutin kawasan dan antar kawasan yang dapat dilakukan:

- Peningkatan kelembagaan, SDM dan kerjasama melalui peningkatan kapasitas tourguide, peningkatan kapasitas pokdarwis, kerjasama tour agency, forum pelaku wisata kawasan, pertegas kerjasama dengan Taman Nasional/Perhutani/BKSDA, peningkatan kapasitas pengelola homestay dan peningkatan kapasitas pengelola kuliner.
- Peningkatan Produk Penunjang Wisata melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM berbasis, pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil alam, branding produk UMKM serta penyediaan tempat oleh-oleh.
- Peningkatan promosi wisata melalui pembuatan paket wisata bersama *tour agency* yang terdaftar di platform digital dan termuat di Web pariwisata Banyuwangi, pembuatan media sosial (WA, IG, FB, Twitter, Tiktok, Youtube, dll).
- Peningkatan aksesibilitas, amenity dan atraksi melalui konektivitas tujuan wisata, peningkatan sarana jalan menuju destinasi wisata, penyediaan tempat menginap, penyediaan wahana penunjang, penyediaan sarana penunjang seperti jasa transportasi wisata dan penguatan jaringan internet, penyediaan layanan keuangan (ATM Center, Money Changer), dan menjadikan lahan pertanian, perkebunan, peternakan menjadi atraksi wisata.

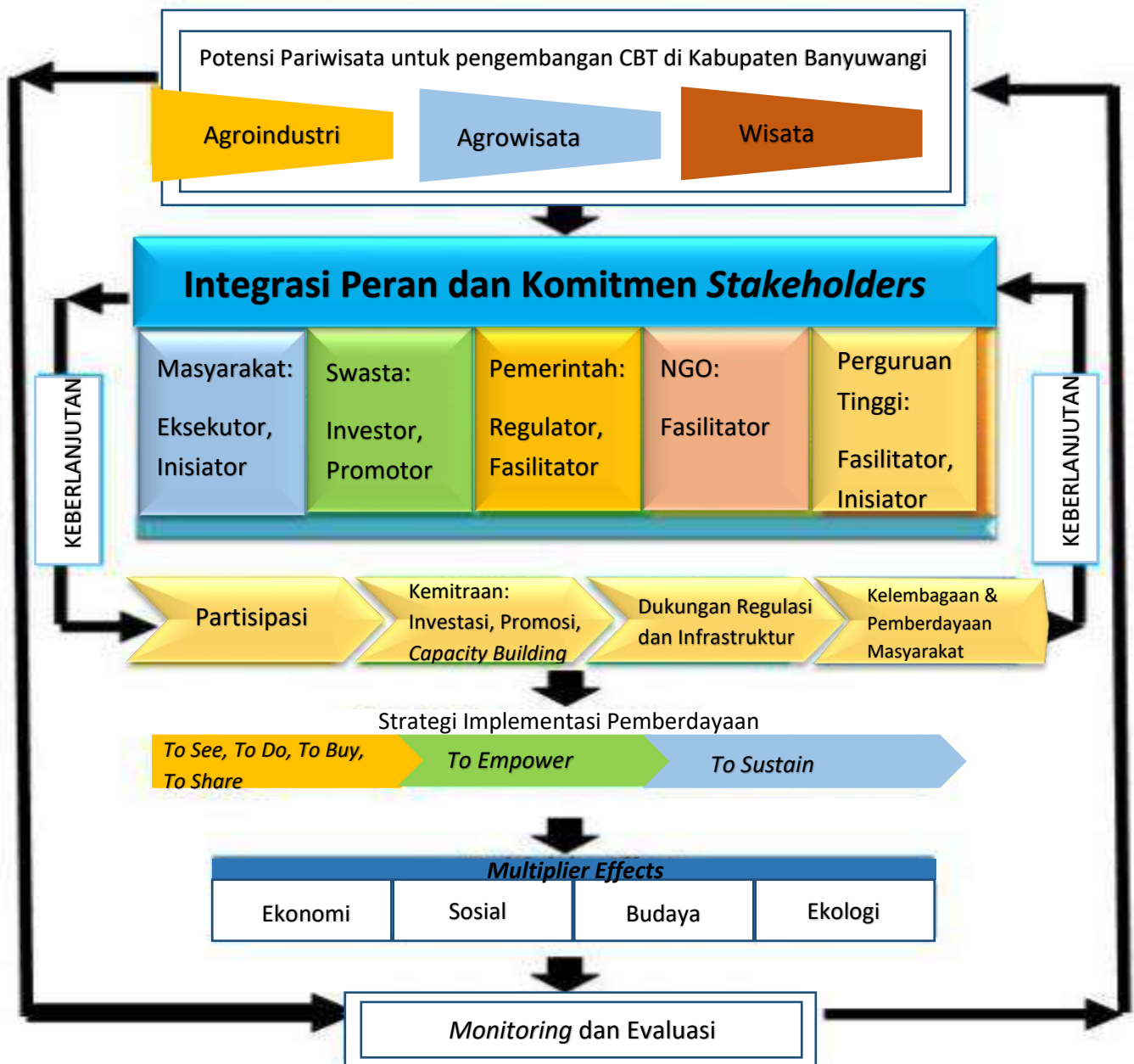
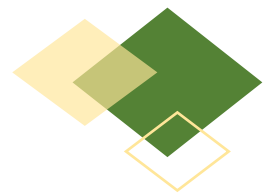
Selain peran BUMDESMA dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan Alas Purwo salah satu bentuk perencanaan yang berpartisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah menerapkan *community based tourism* (CBT) sebagai pendekatan pembangunan. *Community Based Tourism* merupakan konsep pengembangan suatu destinasi wisata lokal dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Ada tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni penjelajahan (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural tourism*) dan ekowisata (*ecotourism*). Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, sehingga menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan memiliki peluang yang lebih



besar untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu pariwisata yang berbasis komunitas memberikan peluang yang lebih bagi partisipasi dalam menikmati keuntungan perkembangan industry pariwisata, maka dari itu lebih memberdayakan masyarakat.

Adapun aspek utama pengembangan CBT terdapat lima dimensi yaitu:

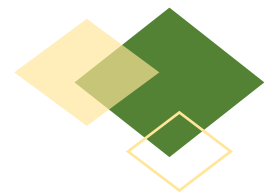
1. Dimensi ekonomi dengan indikator: adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
2. Dimensi sosial dengan indikator: meningkatkan kualitas hidup, kebanggaan komunitas dan pembagian peran yang adil antara laki-laki, perempuan, generasi muda dan tua serta membangun penguatan organisasi komunitas.
3. Dimensi budaya dengan indikator: mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, dan budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
4. Dimensi lingkungan dengan indikator: mempelajari carrying capacity area, mengatur pembuangan sampah, dan meningkatkan kepedulian akan perlu konservasi.
5. Dimensi politik. dengan indikator :meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, dan jaminan hak-hak pengelolaan SDA.



**Gambar 6.2 Model Community Based Tourism**

Sumber: Data Diolah Penulis

Dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata kawasan perdesaan Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui: (1) program pengembangan pariwisata, (2) pengembangan pemasaran pariwisata, dan (3) pengembangan kemitraan pariwisata. Potensi pariwisata yang dikembangkan sebagai model pengembangan CBT di kawasan perdesaan Kabupaten Banyuwangi dapat dikelompokkan dalam: (1) Agroindustri (2) Agrowisata dan (3) Wisata. Jenis pariwisata tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung pariwisata. Kegiatan pariwisata di atas juga dapat membangun jiwa kewirausahaan dan kreativitas masyarakat sehingga akan terjadi *multiplier*



*effects* yang dapat menyejahterakan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Model pengembangan CBT tersebut akan berhasil apabila semua komponen tersedia dan mendapat dukungan dari *stakeholders*. Dukungan tersebut berupa keberpihakan dalam bentuk program dan regulasi, modal usaha, kemitraan, maupun keterlibatan masyarakat dan infrastruktur.

Tahapan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkat Alas Purwo adalah sebagai berikut:



**Gambar 6.3 Tahapan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Selingkar Alas Purwo**

Pada gambar diatas arah tahapan dalam 5 tahun pembangunan kawasan perdesaan selingkar alaspurwo dibagi dalam 3 tahapan utama yaitu:

### 1. Penguatan Sumberdaya Kawasan

Pada tahapan ini merupakan tahapan awal untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya mulai sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya infrastruktur hingga organisasi di wilayah kawasan dengan beberapa kegiatan:

- Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi dan produktivitas potensi unggulan kawasan.
- Bantuan teknologi tepat guna pertanian dan perikanan
- Pelatihan kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan kualitas pengolahan hasil pertanian kawasan.
- Bantuan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian kawasan



- e. Pelatihan penguatan kelembagaan kawasan
- f. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata

## **2. Penguatan Identitas Spasial Wilayah Kawasan**

Pada tahapan ini identitas spasial diwilayah kawasan mulai dibentuk untuk mendorong minat konsumen luar. Pada tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur identitas wilayah kawasan.
- b. Inisiasi penciptaan branding wilayah kawasan sesuai dengan fungsi kawasan
- c. Pelatihan promosi wilayah kawasan
- d. Inisiasi kolaborasi dengan stakeholder luar

## **3. Akselerasi aktivitas ekonomi Kawasan**

Pada tahapan ini setelah kapasitas produksi sumberdaya wilayah berkembang serta identitas wilayah mulai berkembang selanjutnya dilakukan akselerasi dan percepatan aktivitas ekonomi kawasan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Akselerasi promosi melalui berbagai event maupun berbagai media
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan promosi
- c. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder
- d. Penguatan keterkaitan hulu – hilir aktivitas ekonomi kawasan



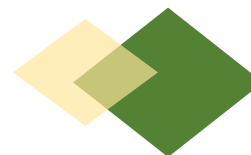
6.6 Program dan Kegiatan

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan

Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
<b>A. Pengembangan Klaster Pertanian Tanaman Pangan Jagung</b>								
Pengadaan Mesin Pengolahan Jagung	Desa Sumberasri		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedungrejo		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Wringinputih		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberberas		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedungringin		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedunggebang		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Blimbingsari		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Patoman		20.000.000				APBN	Kementerian Pertanian



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian mesin pengolahan Jagung	Desa Sumberasri		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedungrejo		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Wringinputih		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberberas		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedungringin		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedunggebang		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Blimbingsari		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Patoman		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pelatihan packaging produk pertanian	Desa Patoman			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Sumberasri			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Plampangrejo			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kalipait			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kedungrejo			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Wringinputih			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Sumberberas			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa kedungringin			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kedunggebang			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Blimbingsari			15.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
<b>B. Pengembangan Kluster Pertanian Tanaman Pangan Kedelai</b>								
Pengadaan Mesin Pengolahan Kedelai	Desa Sumberasri		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedungrejo		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberberas		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian mesin pengolahan Kedelai	Desa Sumberasri		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedungrejo		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberberas		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
<b>C. Pengembangan Kluster Holtikultura Jeruk Manis</b>								
Pelatihan penerapan teknologi pertanian	Desa Sumberasri	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedunggebang	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kaliposo	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pelatihan packaging produk pertanian	Desa Sumberasri		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Plampangrejo		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kalipait		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kedunggebang		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kaliposo		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pengembangan Destinasi Petik Jeruk	Desa Sumberasri		50.000.000	65.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Plampangrejo		50.000.000	65.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata Jeruk	Desa Sumberasri	50.000.000	75.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Plampangrejo	50.000.000	75.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
Pelatihan Alat Pengolahan Jeruk	Desa Sumberasri	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedunggebang	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kaliploso	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
Pelatihan pengemasan produk olahan jeruk	Desa Sumberasri		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Plampangrejo		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Kalipait		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kedunggebang		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kaliploso		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
<b>D. Pengembangan Kluster Holtikultura Buah Naga</b>								
Pelatihan penerapan teknologi pertanian	Desa Sumberasri	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Patoman	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kaliploso	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedunggebang	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pelatihan packaging produk pertanian	Desa Sumberasri	15.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Patoman	15.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kaliploso	15.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kedunggebang	15.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kalipait	15.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Plampangrejo	15.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
Pengembangan Destinasi Petik Buah Naga	Desa Grajagan		75.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata Buah Naga	Desa Grajagan		75.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
Pelatihan Alat Pengolahan Buah Naga	Desa Sumberasri	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Patoman	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kaliploso	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kedunggebang	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Kalipait	15.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
Pelatihan pengemasan produk olahan buah naga	Desa Sumberasri		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Patoman		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kaliploso		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kedunggebang		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Kalipait		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM
	Desa Plampangrejo		15.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Dinas Koperasi dan UMKM





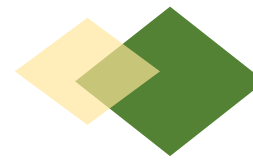
Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
<b>E. Pengembangan Kluster Perkebunan Kelapa</b>								
Pengadaan Mesin Pengolahan Kelapa	Desa Patoman		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberberas		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberasri		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo		15.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian mesin pengolahan Kelapa	Desa Patoman		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberberas		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberasri		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo		25.000.000				APBN	Kementerian Pertanian
<b>F. Pengembangan Kluster Peternakan Sapi</b>								
Peningkatan Produksi sapi, Pengadaan alat pengolahan Pakan Ternak, Pelatihan pupuk kandang, Perawatan sapi ternak	Desa Kalipait			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kaliposo			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kedungrejo			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Wringinputih			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Sumberberas			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kedunggebang			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Sumberasri			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Plampangrejo			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Blimbingsari			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Patoman			100.000.000			APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
<b>G.Pengembangan Kluster Peternakan Ayam</b>								
Peningkatan Produksi ayam, Pengadaan alat pengolahan Pakan Ternak, Pelatihan pupuk kandang, Perawatan ayam ternak	Desa Plampangrejo				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kaliploso				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kedungrejo				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Wringinputih				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Sumberberas				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kedunggebang				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Kalipait				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Sumberasri				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Blimbingsari				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Patoman				80.000.000		APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
<b>H. Pengembangan Kluster Peternakan Kambing Etawa</b>								
1. Pengadaan mesin pengolahan Susu kambing etawa	Desa Kedunggebang	130.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
2. Pengadaan alat pengolahan pakan ternak	Desa Kedungrejo	130.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
3. Bantuan kambing untuk warga miskin	Desa Wringinputih	130.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberberas	130.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Sumberasri	130.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
	Desa Plampangrejo	130.000.000					APBN	Kementerian Pertanian

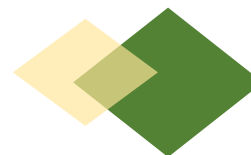


Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Patoman	130.000.000					APBN	Kementerian Pertanian
1.Pelatihan untuk pupuk kendang 2.Pelatihan dan bimbingan pengoperasian mesin pengolahan susu	Desa Kedunggebang		100.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Kedungrejo		100.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Wringinputih		100.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Sumberberas		100.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Sumberasri		100.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Plampangrejo		100.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
	Desa Patoman		100.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
1.Gebyar aneka olahan susu dan nyusu sepuluh ewu	Desa Kedunggebang				50.000.000		APBDes	Pemerintah Desa
	Desa Kedungrejo				50.000.000		APBDes	Pemerintah Desa
	Desa Wringinputih				50.000.000		APBDes	Pemerintah Desa
	Desa Sumberberas				50.000.000		APBDes	Pemerintah Desa
	Desa Sumberasri				50.000.000		APBDes	Pemerintah Desa
	Desa Plampangrejo				50.000.000		APBDes	Pemerintah Desa
	Desa Patoman				50.000.000		APBDes	Pemerintah Desa





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pengembangan Destinasi Wisata Edukasi	Desa Keduggebang		100.000.000	125.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Pertanian
Perawatan kambing ternak	Desa Kedunggebang	30.000.000					Swadaya	Masyarakat
	Desa Kedungrejo	30.000.000					Swadaya	Masyarakat
	Desa Wringinputih	30.000.000					Swadaya	Masyarakat
	Desa Sumberberas	30.000.000					Swadaya	Masyarakat
	Desa Sumberasri	30.000.000					Swadaya	Masyarakat
	Desa Plampangrejo	30.000.000					Swadaya	Masyarakat
	Desa Patoman	30.000.000					Swadaya	Masyarakat
<b>I. Pengembangan Kluster Peternakan Bebek</b>								
Peningkatan Produksi bebek, Pengadaan alat pengolahan Pakan Ternak, pengadaan alat pengolahan telur bebek, Perawatan bebek ternak	Desa Blimbingsari					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kedungrejo					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Wringinputih					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Kedunggebang					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kalipait					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Sumberasri					100.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Plampangrejo					100.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Patoman					100.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
<b>J. Pengembangan Klaster Perikanan</b>								
1. Pengadaan alat penangkapan ikan	Desa Kedungrejo	50.000.000					APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Blimbingsari	50.000.000					APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Wringin Putih	50.000.000					APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kalipait	50.000.000					APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
2. Pembinaan dan Pelatihan Inovasi Produk Perikanan	Desa Kedungrejo		100.000.000				APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Blimbingsari		100.000.000				APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Wringin Putih		100.000.000				APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat
	Desa Kalipait		100.000.000				APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Masyarakat





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
3. Pengembangan wisata layar tangkap ikan	Desa Kedungrejo					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Blimbingsari					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Wringin Putih					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Kalipait					200.000.000	APBN, APBD Kab / Kota, Swadaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>K. Pengembangan Klaster Wisata</b>								
Pengembangan destinasi wisata	Desa Kalipait	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Kaliploso	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Kedungrejo	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Wringinputih	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Kedunggebang	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Sumberasri	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Desa Kalipait	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Grajagan	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Plampangrejo	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Desa Blimbingsari	100.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>L. Pengembangan Klaster Penunjang</b>								
Pembangunan infrastruktur	Seluruh Desa Kawasan	2.000.000.000					APBD Kab / Kota	Dinas PU PR
Pembangunan shopping arcade/Cinderamata/Produk	Desa Kedunggebang		250.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Komunikasi dan Informasi & Dinas Pariwisata dan
	Desa Patoman		250.000.000				APBD Kab / Kota	Dinas Komunikasi dan Informasi & Dinas Pariwisata dan
Pembuatan film potensi daerah	Seluruh Desa Kawasan		50.000.000,00				APBD Kab / Kota	Dinas Komunikasi dan Informasi & Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Koordinasi dengan Agen Travel	Kawasan Perdesaan Agrowisata	50.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Langganan pemberitaan branding produk media massa	Kasawan Perdesaan Agrowisata	100.000.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian & Dinas Koperasi dan UMKM
<b>M. Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika</b>								
Pengembangan Web Desa yang terintegrasi pada Web Pemerintah Kabupaten Banyuwangi/ Pariwisata Banyuwangi	Seluruh Desa Kawasan Perdesaan Alas Purwo	10.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	APBD Kab / Kota	Diskominfo
<b>N. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro</b>								
Klinik Koperasi dan UMKM	Desa Kedunggebang	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	APBdes	Pemerintahan Desa
Pelatihan dan Pendampingan Penciptaan dan Pengembangan Design Produk UMKM	Desa Sumberasri	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Grajagan	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Patoman	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Kalipait	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Plampangrejo	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Blimbingsari	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
Pengadaan Alat Packaging	Desa Patoman	70.000.000,00					APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
<b>O. Program Penumbuhan Wirausaha Baru</b>								
Pendampingan dan Pelatihan Kewirausahaan berbasis IT	Desa Sumberasri						APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Grajagan		30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Patoman		30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Kalipait		30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Plampangrejo		30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Blimbingsari		30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Kedunggebang		30.000.000,00	30.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
<b>P. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar</b>								
Revitalisasi Pasar Desa	Desa Kedunggebang	500.000.000					APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
<b>Q. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/BUMDES</b>								
Pendidikan dan Pelatihan Pengolaan Bisnis bagi BUMDesa	Desa Kedunggebang		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Patoman		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Sumberasri		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Grajagan		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Kalipait		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Plampangrejo		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM
	Desa Blimbingsari		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Dinas Koperasi dan UM





Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pendidikan dan Pelatihan administrasi Perhotelan/Homestay	Desa Kedunggebang		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Disnaker
	Desa Patoman		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Disnaker
	Desa Sumberasri		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Disnaker
	Desa Grajagan		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Disnaker
	Desa Kalipait		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Disnaker
	Desa Plampangrejo		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Disnaker
	Desa Blimbingsari		30.000.000,00	35.000.000,00			APBD Kab / Kota	Disnaker
<b>R. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>								
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Seluruh Desa Kawasan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>S. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>								
Bimbingan teknis dan pelatihan anggota POKDARWIS;	Seluruh Desa Kawasan		150.000.000	150.000.000			APBD Kab / Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelatihan pemberdayaan PKK	Seluruh Desa Kawasan		150.000.000	150.000.000			APBdes	Pemerintah Desa





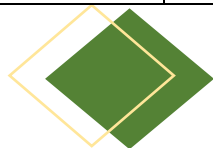
Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
<b>T. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>								
Pembangunan Jalan Desa	Desa Sumberasri				150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	Desa Grajagan				150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	Desa Patoman				150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	Desa Kalipait				150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	Desa Plampangrejo				150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang



Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Kedunggebang				150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
	Desa Blimbingsari				150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang
Pembangunan akses jalan untuk pusat kawasan pemasaran	Seluruh Kawasan Perdesaan (Desa Kedunggebang Pusat Pemasaran)		500.000.000.000				APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
<b>U. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>								
Bantuan Sarana dan Prasarana bagi masyarakat yang memiliki homestay	Desa Blimbingsari	50.000.000,00					APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
	Desa Grajagan	50.000.000,00					APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

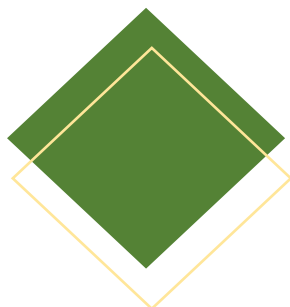
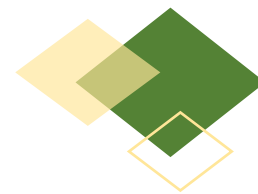


Rencana Pembangunan Kawasan  
Perdesaan Alas Purwo



Program	Lokasi	Jumlah Dana Tahun ke ( Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana
		2021	2022	2023	2024	2025		
	Desa Sumberasri	50.000.000,00					APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
	Desa Kalipait	50.000.000,00					APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi





## BAB VII

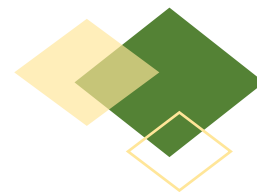
# NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

### 7.1 Produk Barang dan Jasa

Kemajuan ekonomi wilayah kawasan dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan sektoral dan keterkaitan sektoral perekonomian wilayah. Pertumbuhan dapat berupa wujud peningkatan jumlah produk barang dan jasa. Nilai produk-produk barang yang dihasilkan merupakan perkalian jumlah produk barang dengan harga per unit produksi pada masing-masing kawasan. Sedangkan produk-produk jasa dihitung berdasarkan nilai penerimaan dari jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.

Kontibusi wilayah kawasan perdesaan Alas Purwo meliputi 12 desa yang terbagi di Kecamatan Blimbingsari, Muncar, Cluring, Tegaldlimo dan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Produksi barang kawasan meliputi produk tanaman pangan, hortikultura dan produk peternakan. Sedangkan yang termasuk produk jasa kawasan adalah produk jasa sektor pariwisata. Untuk menilai seberapa strategis tingkat pengembangan kawasan perdesaan tersebut, maka dilakukan penilaian terhadap produk barang dan jasa tersebut pada tahun eksisting 2020 dan proyeksi 5 tahun ke depan yaitu tahun 2021-2025. Skenario penilaian didasarkan pada harga produk yang terjadi pada periode yang lalu dan melakukan proyeksi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, dengan asumsi terjadi kenaikan terhadap nilai produk barang dan jasanya dengan adanya mekanisme pasar input dan output terkait dengan sistem produksi dan pemasaran komoditas unggulan masing-masing kawasan ataupun kluster perdesaan dengan mempertimbangkan adanya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi lahan dengan perkembangan harga masing-masing produk unggulan.

Dalam pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan kluster sasaran utamanya adalah peningkatan skala usaha komoditas unggulan, namun untuk meningkatkan efektivitas pembangunan suatu wilayah perlu mengintegrasikan analisis sektoral dan analisis wilayah. Berdasarkan analisis sektoral pada sub kluster pertanian menunjukkan bahwa produk unggulan utama yang menonjol peranannya adalah sub sektor tanaman pangan yakni jagung dan kedelai. Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa nilai produk tanaman pangan yang menonjol adalah jagung berdasarkan perkembangan tahun terakhir diproyeksikan produksi



meningkat rata-rata 5% per tahun. Dengan memperhatikan perkembangan harga rata-rata 3,5% per tahun maka nilai produksi pada tahun 2021 sebesar Rp9.089.359,65 menjadi Rp 11.792.858 pada tahun 2025.

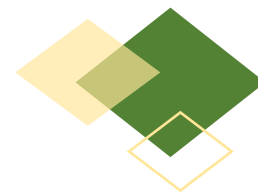
Komoditas tanaman pangan lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung pengembangan kawasan Alas Purwo adalah kedelai. Berdasarkan perkembangan tahun terakhir diproyeksikan produksi meningkat rata-rata 4,3% per tahun. Dengan memperhatikan perkembangan harga rata-rata 7,2% per tahun maka nilai produksi pada tahun 2021 sebesar Rp 41.221.361,25 menjadi Rp 65.055.770 pada tahun 2025.

**Tabel 7.1 Nilai Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun (%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Jagung</b>						
	Luas lahan	Ha	1.014,11	1.050,62	1.201,41	3,6%	18,47%
	Produksi	Ton	2.201	2.311,05	2.641,2	5%	20%
	Harga	Rp	3.800	3.933	4.465	3,5%	17,50%
	Nilai Produksi (000)	Rp	8.363.800	9.089.359,65	11.792.858		
2	<b>Kedelai</b>						
	Luas lahan	Ha	676	692,9	760,5	2,5%	12,5%
	Produksi	Ton	6.057	6.317,45	7.359,25	4,3%	21,5%
	Harga	Rp	6.500	6.525	8.840	7,2%	36%
	Nilai Produksi (000)	Rp	39.370.500	41.221.361,25	65.055.770		

Selanjutnya pada sub sektor perkebunan komoditas jeruk manis, berdasarkan perkembangan tahun terakhir 2020, luas lahan diproyeksikan meningkat 2% per tahun sementara produksi diproyeksikan meningkat 4,6% per tahun. Dengan perkembangan harga rata-rata 7% maka nilai produksi jeruk manis pada tahun 2021 mencapai Rp 47.130.290 meningkat menjadi Rp 69.923.520.

Komoditas perkebunan lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung pengembangan kawasan Alas Purwo adalah buah naga dan kelapa. Berdasarkan luas lahan buah naga diproyeksikan meningkat rata-rata 1% per tahun sama dengan peningkatan produksi. Dengan perkiraan harga yang meningkat 3,3% maka nilai produksi pada tahun 2021 mencapai Rp 66.395.145,3 meningkat menjadi Rp 89.142.072 pada tahun 2025 yang berarti terjadi peningkatan. Sedangkan kelapa, Berdasarkan luas lahan diproyeksikan meningkat rata-rata 0,3% per tahun sama dengan peningkatan produksi. Dengan perkiraan harga yang meningkat 2,4% per tahun maka nilai produksi pada tahun 2021 mencapai Rp 1.357.824 meningkat menjadi Rp 1.601.600 pada tahun 2025 yang dalam hal ini dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:



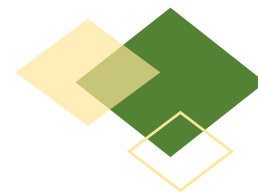
**Tabel 7.2 Nilai Produksi Perkebunan di Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun	
			2020	2021	2025	(%)	/5 tahun (%)
1	<b>Jeruk Manis</b>						
	Luas lahan	Ha	533.27	543,93	586,59	2%	10%
	Produksi	Ton	2105.5	2.202,35	2.589,76	4,6%	23%
	Harga	Rp	20.000	21.400	27.000	7%	35%
	Nilai Produksi (000)	Rp	42.110.000	47.130.290	69.923.520		
2	<b>Buah Naga</b>						
	Luas lahan	Ha	236.34	238.70	248,15	1%	5%
	Produksi	Ton	4080.9	4.284,94	5.101,12	5%	25%
	Harga	Rp	15.000	15.495	17.475	3,3%	16,5%
	Nilai Produksi (000)	Rp	61.213.500	66.395.145,3	89.142.072		
3	<b>Kelapa</b>						
	Luas lahan	Ha	84	84,25	85,26	0,3%	1,5%
	Produksi	Ton	130	132,6	143	2%	10%
	Harga	Rp	10.000	10.240	11.200	2,4%	12%
	Nilai Produksi (000)	Rp	1.300.000	1.357.824	1.601.600		

Selanjutnya produksi dari kelompok klaster peternakan berdasarkan perkembangan usaha peternakan di tahun terakhir 2020. Untuk jumlah produksi sapi diproyeksikan meningkat rata-rata 10% per tahun dan dengan perkembangan harga yang diproyeksikan 5% per tahun maka nilai produksi sapi pada tahun 2021 mencapai Rp363.888.000 meningkat menjadi Rp 590.850.000 pada tahun 2025.

Untuk jumlah produksi ayam diproyeksikan meningkat rata-rata 12% per tahun dan dengan perkembangan harga yang diproyeksikan 2,4% per tahun maka nilai produksi ayam pada tahun 2021 mencapai Rp 3.177.717.760 meningkat menjadi Rp 4.965.228.800 pada tahun 2025. Jumlah produksi kambing etawa diproyeksikan meningkat rata-rata 4,5% per tahun dan dengan perkembangan harga yang diproyeksikan 1,2% per tahun maka nilai produksi kambing etawa pada tahun 2021 mencapai Rp 97.504.176 meningkat menjadi Rp 119.741.840 pada tahun 2025.

Sedangkan untuk jumlah produksi bebek diproyeksikan meningkat rata-rata 6% per tahun dan dengan perkembangan harga yang diproyeksikan 3,3% per tahun maka nilai produksi bebek pada tahun 2021 mencapai Rp 200.329.690 meningkat menjadi Rp 276.996.225 pada tahun 2025.



**Tabel 7.3 Nilai Produksi Perternakan di Kawasan Alas Purwo**

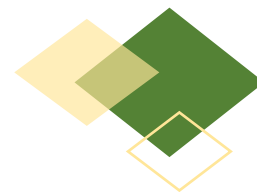
No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Sapi</b>	ekor	2.626	2.888	3.939	10%	50%
	Harga per kg daging	Rp	120.000	126.000	150.000	5%	25%
	Nilai produksi	Rp	315.120.000	363.888.000	590.850.000		
2	<b>Ayam</b>	ekor	79.165	88.664	126.664	12%	60%
	Harga per kg	Rp	35.000	35.840	39.200	2,4%	12%
	Nilai produksi	Rp	2.770.775.000	3.177.717.760	4.965.228.800		
3	<b>Kambing Etawa</b>	ekor	1.487	1.554	1.822	4,5%	22,5%
	Harga per liter susu	Rp	62.000	62.744	65.720	1,2%	6%
	Nilai produksi	Rp	9.114.000	97.504.176	119.741.840		
4	<b>Bebek</b>	ekor	3.326	3.526	4.323	6%	30%
	Harga per kg daging	Rp	55.000	56.815	64.075	3,3%	16,5%
	Nilai produksi	Rp	182.930.000	200.329.690	276.996.225		

Dalam pengembangan kawasan pedesaan Alas Purwo selain pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan juga dikembangkan sektor perikanan. Berdasarkan perkembangan usaha perikanan diproyeksikan meningkat rata-rata 5% per tahun dan dengan perkembangan harga yang diproyeksikan 10% per tahun maka nilai produksi rata-rata perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp 646.760.000 meningkat menjadi Rp 1.164.030.000 pada tahun 2025.

**Tabel 7.4 Nilai Produksi Perikanan di Kawasan Alas Purwo**

Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
		2020	2021	2025		
Perikanan	kg	5.624	5.905	6.748	5%	25%
Harga	Rp	115.000	126.500	172.500	10%	50%
Nilai produksi	Rp	646.760.000	746.982.500	1.164.030.000		

Untuk sektor pariwisata dimana berdasarkan perkembangan tahun terakhir di tahun 2020, obyek wisata diproyeksikan meningkat rata-rata 1,3% per tahun dari 268.032,23 orang pada tahun 2021 meningkat menjadi 495.965,15 orang pada tahun 2025. Untuk ketersediaan hotel diproyeksikan akan meningkat sebesar 6% per tahun, sedangkan untuk ketersediaan homestay diproyeksikan akan meningkat sebesar 5% per tahun. Tabel terkait nilai produksi pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 7.5 Nilai Produksi Pariwisata di Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Proyeksi		Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025	2020	2025		
1	<b>Jumlah Obyek Wisata</b>	Buah	18	18	19		1,3%	6.5%	
2	<b>Jumlah Hotel</b>	Buah	5	5	7		6%	30%	
	Rata-rata sewa per kamar	Rp	300.000	322.500	345.000		7.5%	15%	
3	<b>Jumlah Homestay</b>	Buah	16	16	20		5%	25%	
	Rata-rata sewa per kamar	Rp	120.000	124.800	144.000		4%	20%	
4	<b>Kunjungan Wisatawan</b>	Orang	211.049	268.032,23	495.965,15		27%	135%	

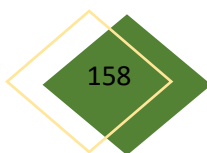
## 7.2 Penyerapan Tenaga Kerja

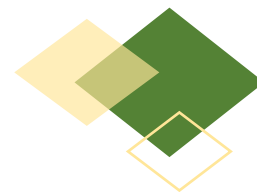
Ketenagakerjaan khususnya tingkat kesempatan kerja merupakan indikator ekonomi yang sangat penting seperti halnya tingkat pendapatan masyarakat yang biasanya diukur dalam bentuk produk domestik bruto. Pertumbuhan kesempatan kerja disuatu wilayah merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu analisis tentang ketenagakerjaan pada bagian ini menjadi sangat penting. Secara umum pertumbuhan kesempatan kerja biasanya akan sejalan dengan pertumbuhan produksi pada setiap sektor dan subsektor.

Struktur penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang mana dapat terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja pada komoditas jagung dan kedelai diproyeksikan meningkat sebesar 1% pertahun.

**Tabel 7.6 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian di Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Proyeksi		Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025	2020	2025		
1	<b>Jagung</b>								
	Tenaga kerja yang diserap	orang	1.868	1.886	1.963		1,0%	5,10%	
2	<b>Kedelai</b>								
	Tenaga kerja yang diserap	orang	354	357	372		1,0%	5,10%	





Struktur penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan pada komoditas jeruk diproyeksikan meningkat sebesar 1,3% per tahun, sedangkan buah naga dan kelapa sebesar diproyeksikan meningkat sebesar 1% pertahun.

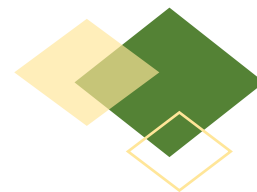
**Tabel 7.7 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Perkebunan di Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Jeruk manis</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	1.254	1.270	1.335	1,3%	6,5%
2	<b>Buah naga</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	976	985	1024	1%	5%
3	<b>Kelapa</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	258	260	270	1%	5%

Struktur penyerapan tenaga kerja di sektor peternakan pada komoditas sapi diproyeksikan meningkat sebesar 1,3% per tahun, sedangkan buah naga dan kelapa sebesar diproyeksikan meningkat sebesar 1% pertahun.

**Tabel 7.8 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Perternakan di Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Sapi</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	542	549	577	1,3%	6,5%
2	<b>Ayam</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	354	361	389	2%	10%
3	<b>Kambing Etawa</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	76	76	79.8	1%	5%
4	<b>Bebek</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	54	54	57	1%	5%



Untuk struktur penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan diproyeksikan meningkat sebesar 1% per tahun

**Tabel 7.9 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan di Kawasan Alas Purwo**

Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
		2020	2021	2025		
Perikanan						
<b>Tenaga kerja yang diserap</b>	orang	2.750	2.777	2.890	1,0%	5,10%

Selanjutnya untuk sub kluster pariwisata daya serap tenaga kerja berbeda bagi para pekerja yang bekerja pada pariwisata maupun perhotelan/homestay. Struktur penyerapan tenaga kerja di pariwisata dan hotel/homestay diproyeksikan meningkat sebesar 5% per tahun,

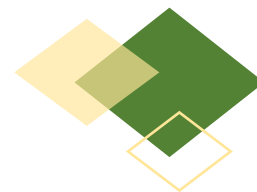
**Tabel 7.10 Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Pariwisata di Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun (%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Hotel/Homestay</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	807	847	1.008	5%	25%
2	<b>Pelayanan Kunjungan Wisata</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	147	154	183	5%	25%

### 7.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan itu keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada pertumbuhan pendapatan masyarakat terutama pendapatan perkapita. Di wilayah pedesaan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan tingkat pendapatan petani atau pelaku usaha perkapita. Peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan rencana kegiatan bagi penduduk miskin di kawasan. Konsep yang digunakan adalah untuk mengukur tingkat pendapatan rumah tangga petani atau pelaku usaha setelah perencanaan program kawasan dilaksanakan.

Dalam suatu kawasan kemajuan perekonomian dapat diukur berdasarkan peningkatan pendapatan masyarakat pada sektor tertentu dan daya serap tenaga kerja sektor yang



bersangkutan. Pada sub sektor pertanian, proyeksi pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 5% baik pada komoditas jagung maupun kedelai.

**Tabel 7.11 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Klaster Pertanian Kawasan Alas Purwo**

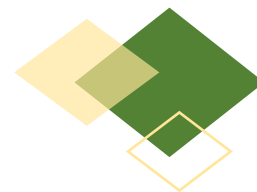
No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Jagung</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	1.868	1.886	1.963	1,0%	5,10%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	100.000	105.000	125.000	5%	25%
2	<b>Kedelai</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	354	357	372	1,0%	5,10%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	100.000	105.000	125.000	5%	25%

Selanjutnya kinerja perekonomian yang diukur pada tingkat pertumbuhan pada sub sektor perkebunan diukur dari pertumbuhan pendapatan perkapita. Proyeksi pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 10% baik pada komoditas jeruk, buah naga maupun kelapa.

**Tabel 7.12 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Klaster Perkebunan Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Jeruk manis</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	1.254	1.270	1.335	1,3%	6,5%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	50.000	55.0000	75000	10%	50%
2	<b>Buah naga</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	976	985	1024	1%	5%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	50.000	55.0000	75000	10%	50%
3	<b>Kelapa</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	258	260	270	1%	5%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	50.000	55.0000	75000	10%	50%

Untuk kinerja perekonomian yang diukur pada tingkat pertumbuhan pada sub sektor peternakan diukur dari pertumbuhan pendapatan perkapita. Proyeksi pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 5,4% baik pada komoditas sapi, ayam, kambing etawa dan bebek.



**Tabel 7.13 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Klaster Perternakan Kawasan Alas Purwo**

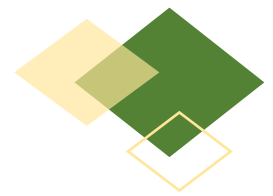
No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Sapi</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	542	549	577	1,3%	6,5%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	75.000	75.000	95.000	5.4	27%
2	<b>Ayam</b>						
	Tenaga kerja yang diserap (hari)	orang	354	361	389	2%	10%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	75.000	75.000	95.000	5.4	27%
3	<b>Kambing Etawa</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	76	76	79.8	1%	5%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	75.000	75.000	95.000	5.4	27%
4	<b>Bebek</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	54	54	57	1%	5%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	75.000	75.000	95.000	5.4	27%

Pada sub sektor perikanan, proyeksi pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 5% pertahun dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

**Tabel 7.14 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Klaster Perikanan Kawasan Alas Purwo**

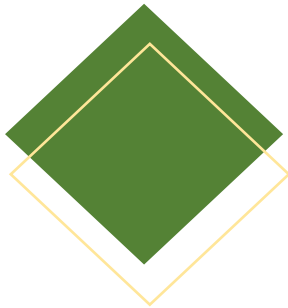
Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun(%)	Pertumbuhan/5 tahun (%)
		2020	2021	2025		
<b>Perikanan</b>						
Tenaga kerja yang diserap	orang	2.750	2.777	2.890	1,0%	5,10%
Pendapatan/kapita (hari)	Rp	100.000	105.000	125.000	5%	25%

Selanjutnya dalam klaster kawasan Alas Purwo, sektor yang penting peranannya dalam memperkuat kawasan adalah sektor pariwisata dimana pada sub sektor hotel/penginapan yang berada dalam kawasan dapat menghasilkan pendapatan yang meningkat sebesar 5,4% per tahun dan untuk pelayanan kunjungan wisata dapat menghasilkan pendapatan yang meningkat sebesar 11% per tahun.



**Tabel 7. 15 Nilai Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Pada Sub Kluster Pariwisata Kawasan Alas Purwo**

No	Produksi	Satuan	Jumlah			Pertumbuhan/tahun (%)	Pertumbuhan /5 tahun (%)
			2020	2021	2025		
1	<b>Hotel/Homestay</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	807	847	1.008	5%	25%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	150.000	150.000	200.000	11%	33%
2	<b>Pelayanan Kunjungan Wisata</b>						
	Tenaga kerja yang diserap	orang	147	154	183	5%	25%
	Pendapatan/kapita (hari)	Rp	50.000	55.000	75.000	5.4%	27%



## BAB VIII

# KESIMPULAN DAN SARAN

### 8.1 Kesimpulan

Kawasan perdesaan Alas Purwo memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata yang berada pada 12 desa kawasan yang tersebar di 5 Kecamatan seperti Kecamatan Blimbingsari, Cluring, Muncar, Tegaldlimo dan Purwoharjo. Dalam kajian ini terdapat beberapa isu strategis pengelolaan kawasan perdesaan Alas Purwo berdasarkan prioritasnya adalah:

1. intensifikasi pemanfaatan teknologi tepat guna produksi pertanian, peternakan dan perikanan
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna produk olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
3. kerjasama dan pemanfaatan teknologi pemasaran
4. Perbaikan sarana dan prasarana wisata serta Optimalisasi promosi Pariwisata
5. Optimalisasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna produksi pertanian kepada petani
6. Optimalisasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna produk olahan hasil pertanian
7. Optimalisasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi pemasaran
8. Optimalisasi promosi pariwisata
9. Pemanfaatan informasi harga pasar dan peningkatan pasar
10. Penguatan kualitas dan branding produk pertanian, dan perikanan
11. Penguatan kader pertanian
12. Penguatan branding wisata
13. Peningkatan fasilitas protokol kesehatan di area wisata
14. Peningkatan kualitas dan konetivitas pemasaran produk hasil olahan
15. Peningkatan kualitas produk pertanian, peternakan dan perikanan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna
16. Peningkatan fasilitas dan konektivitas lokasi wisata



17. Peningkatan kualitas dan konektivitas pemasaran hasil olahan pertanian, peternakan dan perikanan

## 8.2 Saran

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila pelaksanaan pembangunan Kawasan Alas Purwo dilakukan secara inklusif dan terintegrasi diantara para pihak yang terkait dengan klaster tersebut. Para pihak (stakeholders) utama didorong menjadi penggerak utama dalam pengembangan kawasan tersebut. Diusahakan agar pemerintah daerah, BUMDes dan para pelaku usaha di kawasan tersebut dapat menarik investor untuk bermitra dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan bersama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah dapat bekerja sama dan bersinergi untuk meengefektifkan implementasi RPKP ini dengan dukungan utama dari dunia usaha, Kementerian/Lembaga, dan Lembaga Donor. Stakeholder utama klaster dengan didukung oleh pemerintah daerah perlu terus mengupayakan peningkatan pemasaran barang dan jasa produk unggulan klaster di berbagai area baik lokal dan regional dengan cara konvensional maupun dengan sistem berbasis teknologi.



17. Peningkatan kualitas dan konektivitas pemasaran hasil olahan pertanian, peternakan dan perikanan

## 8.2 Saran

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila pelaksanaan pembangunan Kawasan Alas Purwo dilakukan secara inklusif dan terintegrasi diantara para pihak yang terkait dengan klaster tersebut. Para pihak (stakeholders) utama didorong menjadi penggerak utama dalam pengembangan kawasan tersebut. Diusahakan agar pemerintah daerah, BUMDes dan para pelaku usaha di kawasan tersebut dapat menarik investor untuk bermitra dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan bersama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah dapat bekerja sama dan bersinergi untuk meengefektifkan implementasi RPKP ini dengan dukungan utama dari dunia usaha, Kementerian/Lembaga, dan Lembaga Donor. Stakeholder utama klaster dengan didukung oleh pemerintah daerah perlu terus mengupayakan peningkatan pemasaran barang dan jasa produk unggulan klaster di berbagai area baik lokal dan regional dengan cara konvensional maupun dengan sistem berbasis teknologi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS